



SALINAN

BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK  
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah menyusun RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Demak Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 6);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019, yang selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2019, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- (2) RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I   Pendahuluan;  
Bab II   Gambaran Umum Kondisi Daerah;  
Bab III   Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;  
Bab IV   Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;  
Bab V   Rencana Kerja dan Pendanaan daerah;  
Bab VI   Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;  
Bab VII   Penutup.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2019 merupakan penjabaran tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

- (2) RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
- a. pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Kerja OPD Tahun 2019; dan
  - b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2019.

Pasal 3

Dalam menyusun RAPBD Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2019 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 4

Pelaksanaan lebih lanjut RKPD Tahun 2019 dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019.

Pasal 5

Rincian lebih lanjut RKPD Tahun 2019 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 28 Juni 2018

BUPATI DEMAK,  
TTD  
HM. NATSIR

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 29 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,  
TTD  
SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018 NOMOR 35

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Mengetahui:

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN DEMAK  
TTD

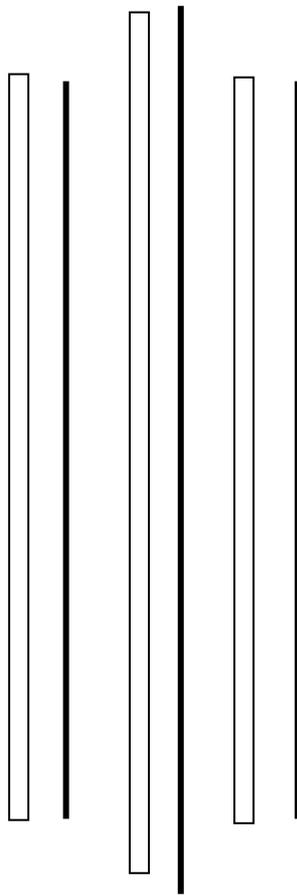
MUH. RIDHODHIN, SH. MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650330 199603 1 001



# **RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019**



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
TAHUN 2018**

## DAFTAR ISI

### BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang .....	I-1
1.2 Dasar Hukum .....	I-2
1.3 Hubungan antar Dokumen .....	I-3
1.4 Maksud dan Tujuan .....	I-8
1.5 Sistematika Dokumen RKPD .....	I-9

### BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI WILAYAH

2.1 Kondisi Umum Daerah .....	II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi .....	II-1
2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah .....	II-1
1. Luas dan Batas Wilayah Adminstrasi.....	II-1
2. Letak dan Kondisi Geografis .....	II-2
3. Topografi.....	II-2
4. Geologi.....	II-3
5. Hidrologi .....	II-3
2.1.1.2 Penggunaan Lahan .....	II-4
2.1.1.3 Kondisi Demografi Daerah .....	II-5
2.1.1.4 Potensi Pengembangan Wilayah.....	II-6
2.1.1.5 Wilayah Rawan Bencana.....	II-7
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	II-8
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi .....	II-8
1. Pertumbuhan Ekonomi dan Perkembangan Ekonomi .....	II-8
2. Laju Inflasi.....	II-13
3. Indeks Gini dan Indeks Williamson.....	II-14
4. Nilai Tukar Petani .....	II-14
5. Kemiskinan.....	II-15
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial .....	II-16
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum .....	II-17
2.1.3.1 Fokus Layanan Wajib Pelayanan Dasar .....	II-17
1. Pendidikan.....	II-17
2. Kesehatan.....	II-22
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	II-27
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman .....	II-30
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	II-31
6. Sosial.....	II-33

2.1.3.2 Fokus Layanan Wajib Bukan Pelayanan Dasar .....	II-36
1. Tenaga Kerja .....	II-36
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	II-38
3. Pangan .....	II-39
4. Pertanahan .....	II-42
5. Lingkungan Hidup .....	II-42
6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil .....	II-43
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .....	II-44
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .....	II-45
9. Perhubungan .....	II-47
10. Komunikasi dan Informatika .....	II-48
11. Kepemudaan dan Olahraga .....	II-49
12. Statistik .....	II-50
13. Persandian .....	II-50
14. Kebudayaan .....	II-51
15. Perpustakaan .....	II-52
16. Kearsipan .....	II-53
2.1.3.3 Fokus Layanan Pilihan .....	II-53
1. Kelautan dan Perikanan .....	II-53
2. Pariwisata .....	II-54
3. Pertanian .....	II-56
4. Perdagangan .....	II-58
5. Perindustrian .....	II-59
6. Transmigrasi .....	II-61
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD	
sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD .....	II-62
2.2.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar .....	II-62
2.2.2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar .....	II-82
2.2.3 Urusan Pilihan .....	II-103
2.2.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan .....	II-112
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah .....	II-126
2.3.1 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan	
Urusan Pemerintah Daerah .....	II-126
2.3.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar .....	II-126
2.3.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar .....	II-127
2.3.1.3 Urusan Pilihan .....	II-130
2.3.1.4 Permasalahan Urusan Penunjang Pembangunan .....	II-132

<b>BAB III</b>	<b>KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH</b>	
	3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....	III-1
	3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah .....	III-1
	3.1.2 Tantangan dan Prospek Pengembangan Perekonomian Daerah.....	III-9
	3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....	III-9
	3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah .....	III-9
	3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah .....	III-13
	3.3 Proyeksi Keuangan Daerah .....	III-18
<b>BAB IV</b>	<b>SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH</b>	
	4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan .....	IV-1
	4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019 .....	IV-1
<b>BAB V</b>	<b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH</b>	
	5.1 Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar .....	V-1
	5.2 Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.....	V-3
	5.3 Urusan Pilihan .....	V-6
	5.4 Fungsi Penunjang Pemerintahan .....	V-7
<b>BAB VI</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	
	6.1 Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2019 .....	VI-1
<b>BAB VII</b>	<b>PENUTUP.....</b>	VII-1

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan ketentuan Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun Rencana Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri dari RPJPD, RPJMD dan RKPD.

RPJPD merupakan merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Sedangkan RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. RKPD menjadi pedoman Kepala Daerah dalam menyusun KUA serta PPAS.

RKPD Kabupaten Demak Tahun 2019 merupakan perwujudan Tahun ke tiga dalam RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2016 – 2021 yang mengambil tema 'Penguatan sektor perekonomian (pertanian, perikanan, pariwisata, perindustrian, perdagangan, UMKM) menuju kemandirian pangan.

RKPD memuat kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maupun sumber - sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan RKPD dilaksanakan dengan pendekatan teknokratik, perencanaan dari bawah (*bottom up planning*), arahan kebijakan Pemerintah (*top down planning*), pendekatan politik dan partisipatif sebagai kerangka landasan filosofi, serta dilakukan melalui pentahapan yaitu: persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan

rancangan RKPD, pelaksanaan Musrenbang RKPD 2019 yang sebelumnya didahului dengan kegiatan Forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan RKPD Kabupaten Demak.

## **1.2 Dasar Hukum**

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019, itu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah.
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013 – 2018;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011 – 2031.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak 2016 – 2021.

### **1.3 Hubungan Antar Dokumen**

Penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Demak Tahun 2019 berpedoman pada:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 – 2021;
2. Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Tengah;
3. Arah dan kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional Tahun 2019 yang mengambil tema “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”;
4. Program Strategis Nasional Tahun 2019;
5. Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 yang mengambil tema “Peningkatan Daya Saing Daerah melalui Pemerataan Pembangunan dan Pemanfaatan Iptek. Pembangunan Tahun 2019 diprioritaskan pada:
  1. Penanggulangan Kemiskinan;
  2. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah;
  3. Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM;
  4. Pengelolaan SDA – LH dan Penanggulangan Bencana;
  5. Ketahanan Pangan dan Energi;
  6. Kesenjangan Wilayah;
  7. Tata Kelola Pemerintahan.

6. Surat Edaran Bupati Demak tentang Arah Kebijakan Pembangunan Untuk Penyusunan RKPD Tahun 2019.

Rencana pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2019 diprioritaskan pada “Penguatan sektor perekonomian (pertanian, perikanan, pariwisata, perindustrian, perdagangan, UMKM) menuju kemandirian pangan. Tujuan yang ingin dicapai adalah:

- 1) Meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan kelautan menuju kedaulatan pangan;
- 2) Meningkatkan kinerja perindustrian dan perdagangan serta kapasitas koperasi dan UMKM;
- 3) Meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja;
- 4) Meningkatkan daya saing pariwisata dan pelestarian kebudayaan.

Sasaran tercapainya prioritas tersebut adalah:

- 1) Meningkatnya produktivitas dan produksi pertanian, perkebunan dan peternakan;
- 2) Meningkatnya produksi perikanan dan kelautan;
- 3) Meningkatnya ketersediaan, distribusi, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- 4) Meningkatnya perkembangan industri kecil dan menengah;
- 5) Meningkatnya nilai ekspor, kualitas pasar dan penataan PKL;
- 6) Meningkatnya kapasitas UMKM dan koperasi;
- 7) Menurunnya angka pengangguran;
- 8) Meningkatnya kontribusi pendapatan pariwisata dalam PAD;
- 9) Meningkatnya pelestarian keragaman dan kekayaan budaya daerah.

RKPD tahun 2019 juga merupakan bagian dalam mewujudkan 9 Misi dan 16 Program Unggulan Bupati. Adapun kebijakan-kebijakan yang dilakukan tercantum dalam RPJMD 2016-2021 didasarkan pada masing-masing Misi, yaitu sebagai berikut:

A. Misi 1 : Menjadikan nilai-nilai agama melekat pada setiap kebijakan pemerintah dan perilaku masyarakat.

Kebijakan untuk mengarahkan pencapaian misi ini yaitu :

- Pelaksanaan pembangunan dan kehidupan masyarakat harus berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan.

B. Misi 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efektif, efisien, dan akuntabel.

Kebijakan untuk mengarahkan pencapaian misi ini yaitu:

- a. Reformasi birokrasi difokuskan pada peningkatan kualitas ASN dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pengawasan dan monitoring evaluasi berdasarkan prinsip akuntabilitas, dan transparan;

- b. Peningkatan kinerja keuangan difokuskan pada pengelolaan aset daerah;
  - c. Mempercepat perwujudan *Smart City* melalui pembuatan sistem informasi pada pelayanan publik (pendidikan, kesehatan, penanaman modal, kependudukan catatan sipil, pengelolaan SDA dan Perumahan serta penanggulangan kemiskinan), peningkatan pemahaman masyarakat dalam penerapan *Smart City*.
- C. Misi 3 : Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal serta mengurangi tingkat pengangguran.

Kebijakan untuk mengarahkan pencapaian misi ini, yaitu:

- a. Intensifikasi dan optimasi lahan, penerapan teknologi tepat guna, peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pertanian ditingkat poktan/gapoktan, perencanaan dan pengawasan, penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida, pengaman pertanaman dan produksi dari gangguan OPT dan bencana alam (banjir, kekeringan dan intrusi air laut), peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pertanian, perkebunan dan peternakan dan kelembagaan petani, pekebun dan peternak, perlindungan plasma nutfah pertanian dan varietas lokal unggulan daerah yang mendukung peningkatan pendapatan keluarga petani pengembangan komoditas perkebunan tahunan pada lahan kritis dan kawasan lindung dalam upaya perlindungan tanah dan pencegahan bencana, peningkatan jumlah usaha peternakan, optimalisasi peran dan fungsi rumah potong hewan, peningkatan jumlah akseptor inseminasi buatan, peningkatan jumlah sentra peternakan rakyat, pembinaan dan penertiban ternak bantuan pemerintah, partisipasi kegiatan promosi produk pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan ditingkat kabupaten, provinsi maupun nasional, penguatan peran desa agropolitan, optimalisasi peran dan fungsi lumbung desa modern, optimalisasi peran poskeswan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan dan zoonosis, pengendalian peredaran ternak dari dalam dan luar daerah, pengujian mutu bahan pangan asal ternak yang beredar dimasyarakat, koordinasi dengan instansi/lembaga yang menangani perijinan, pertanahan dan penegak Perda serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan yang mengarah atau berpotensi melakukan alih fungsi lahan pertanian;
- b. Meningkatkan produksi perikanan di fokuskan pada peningkatan produksi perikanan tangkap;

- c. Pengembangan industri kecil menengah dan besar difokuskan pada pembinaan industri kecil menjadi industri menengah serta daya saing produk produk unggulan;
- d. Peningkatan daya saing sektor perdagangan difokuskan pada penataan pasar tradisional yang memenuhi persyaratan dan penataan PKL;
- e. Peningkatan usaha mikro kecil difokuskan pada pertumbuhan usaha kecil, dan pengembangan usaha mikro menjadi usaha kecil;
- f. Peningkatan kualitas koperasi difokuskan pada pengembangan koperasi tidak aktif menjadi koperasi aktif;
- g. Pengurangan pengangguran terbuka difokuskan pada peningkatan kapasitas calon tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja;
- h. Peningkatan daya saing sektor pariwisata difokuskan pada peningkatan kontribusi pariwisata pada Pendapatan Asli Daerah dan pengembangan destinasi baru.

D. Misi 4 : Mengakselerasikan pembangunan infrastruktur strategis, kewilayahan dan meningkatkan keterpaduan perkembangan antara kota dan desa.

Kebijakan untuk mengarahkan pencapaian misi ini, yaitu:

- a. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar difokuskan pada perbaikan jalan kondisi buruk, pembangunan jaringan irigasi pada wilayah selatan Kabupaten Demak dan drainase;
- b. Pemenuhan sarana dan prasarana pemukiman sehat difokuskan pada penyediaan air bersih pada semua penduduk, penataan kawasan kumuh dan peningkatan akses sanitasi dasar;
- c. Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang difokuskan pada revisi RTRW, penyusunan dokumen RTR lainnya dan penyediaan ruang terbuka publik serta mempertahankan LP2B;
- d. Peningkatan pelayanan perhubungan darat difokuskan pada penyediaan angkutan pada akses atau jaringan jalan dan penyediaan rambu rambu lalu lintas.

E. Misi 5 : Meningkatkan Pelayanan kualitas Pendidikan dan kesehatan sesuai standar serta perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

Kebijakan untuk mengarahkan pencapaian misi ini, yaitu:

- a. Peningkatan kualitas pendidikan difokuskan pada peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dan pengurangan penduduk usia sekolah yang tidak sekolah;

- b. Peningkatan minat baca difokuskan pada peningkatan kunjungan pemustaka;
  - c. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat difokuskan pada penurunan AKI, AKB, AKABA, gizi buruk, peningkatan kualitas FKTP, pembangunan Rumah Sakit Tipe D di daerah Karangawen dan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat;
  - d. Penanganan PMKS difokuskan pada fakir miskin, penyandang disabilitas dan anak terlantar, program keluarga harapan serta penguatan kelembagaan penanganan PMKS;
  - e. Penanganan kemiskinan difokuskan pada kelurahan/desa dengan zona merah pada data kemiskinan PBDT 2015.
- F. Misi 6 : Menciptakan keamanan, ketertiban dan lingkungan masyarakat yang kondusif.  
Kebijakan untuk mengarahkan pencapaian misi ini, yaitu:
- a. Peningkatan ketertiban, keamanan dan perlindungan masyarakat difokuskan pada peningkatan patroli pada daerah rawan;
  - b. Penanganan bencana difokuskan pada daerah rawan bencana.
- G. Misi 7 : Mengembangkan kapasitas pemuda, olahraga, seni-budaya, meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak dan mengendalikan pertumbuhan penduduk.  
Kebijakan untuk mengarahkan pencapaian misi ini, yaitu:
- a. Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga difokuskan pada prestasi olahraga unggulan dan prestasi wirausaha pemuda;
  - b. Pengendalian pertumbuhan penduduk difokuskan pengurangan unmetneed dan pengendalian jumlah anggota keluarga;
  - c. Peningkatan partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan difokuskan pada peningkatan peran lembaga desa/kelurahan;
  - d. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak difokuskan pada penanganan kekerasan perempuan dan anak.
- H. Misi 8 : Mewujudkan kualitas pelayanan Investasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.  
Kebijakan untuk mengarahkan pencapaian misi ini, yaitu:
- a. Peningkatan investasi difokuskan pada peningkatan/pelayanan perijinan dan non perijinan pada PTSP;
  - b. Peningkatan pelayanan publik difokuskan pada peningkatan kepuasan masyarakat atas pemberian

pelayanan di semua Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan publik.

I. Misi 9 : Mewujudkan Kelestarian Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam.

Kebijakan untuk mengarahkan pencapaian misi ini, yaitu:

- Peningkatan kualitas sumberdaya lingkungan difokuskan pada pencegahan terjadinya pencemaran, penanaman mangrove di wilayah pesisir dan kebersihan kota, perbaikan kualitas lingkungan.

Selain itu, RKPD Kabupaten Demak juga memperhatikan beberapa dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersifat multi sektoral antara lain : Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Demak (Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011) dan RTRW Provinsi Jawa Tengah (Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010), Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD); Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goal`s) tahun 2015 – 2030 sebagai tindak lanjut dari Tujuan Pembangunan Millenium.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka RKPD Kabupaten Demak Tahun 2019 dapat sejalan dengan arah kebijakan pembangunan yang telah ditegaskan dalam RKP Nasional 2019, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019. Hal ini sesuai dengan kebijakan pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen rencana pembangunan secara nasional. Dengan demikian maka pencapaian hasil-hasil pembangunan daerah berkontribusi dalam pencapaian keberhasilan pembangunan secara nasional.

#### **1.4 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan RKPD Kabupaten Demak Tahun 2019 adalah tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang merupakan penjabaran dari perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka panjang daerah.

Tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Demak Tahun 2019 adalah:

1. Menyusun pedoman pembangunan tahun 2019 yang akan menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
2. Menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019, sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019;

3. Menjadi pedoman dalam rangka menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.

## **1.5 Sistematika RKPD**

Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Demak Tahun 2019 ini disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah secara sistematis disusun sebagai berikut :

### **BAB I      Pendahuluan**

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, hubungan antar dokumen perencanaan dan sistematika RKPD.

### **BAB II     Gambaran Umum Kondisi Daerah**

Pada bab ini menguraikan tentang kondisi eksisting Kabupaten Demak; berdasarkan aspek geografi dan demografi, Evaluasi pelaksanaan RKP Daerah Tahun 2017, dan isu-isu strategis pembangunan daerah.

### **BAB III    Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah**

Memuat kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, arah kebijakan ekonomi daerah, serta arah kebijakan keuangan daerah.

### **BAB IV     Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah**

Memuat perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil evaluasi dan analisis pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

### **BAB V     Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah**

Memuat rencana kerja dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2019.

**BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Memuat indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci pada akhir tahun perencanaan.

**BAB VII Penutup**

Memuat harapan berkenaan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

#### 2.1. Kondisi Umum Daerah

##### 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

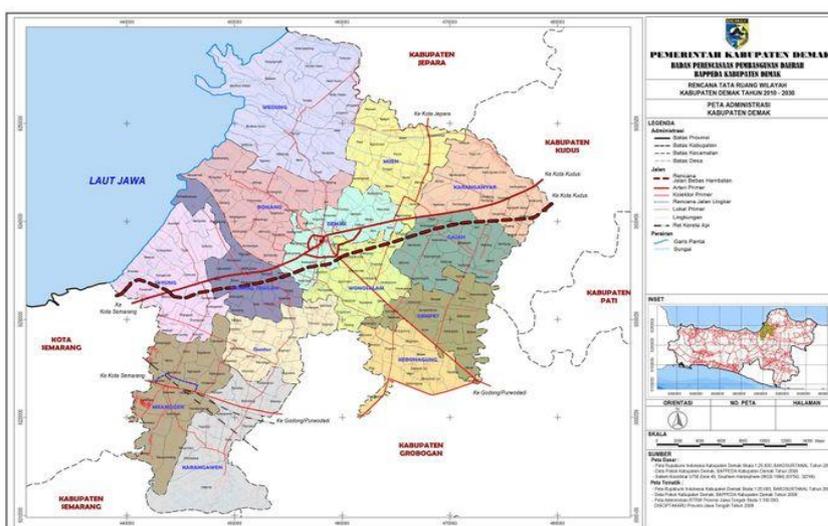
##### 2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

###### 1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Secara administratif luas wilayah Kabupaten Demak adalah 89.743 ha terdiri dari 14 kecamatan, 243 desa dan 6 kelurahan. Kemudian terbagi menjadi 786 dusun, 1.324 RW dan 6.940 RT, dengan batas-batas administrasi Kabupaten Demak adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Laut Jawa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang;
- Serta sebelah Barat berbatasan dengan Kota Semarang.

Jarak terjauh dari Barat ke Timur sepanjang 49 km, sedangkan dari Utara ke Selatan terbentang sepanjang 41 km. Semua wilayah kecamatan di Kabupaten Demak mudah dijangkau dan memiliki akses transportasi umum dengan mudah, terutama pusat-pusat perkembangan perekonomian daerah. Wilayah administrasi Kabupaten Demak dapat dilihat dari peta berikut.



Peta 2.1  
Peta Administrasi Kab. Demak

## 2. Letak dan Kondisi Geografis

Demak sebagai salah satu kabupaten di Jawa Tengah terletak pada koordinat 6°43'26" - 7°09'43" Lintang Selatan dan 110°27'58" - 110°48'47" Bujur Timur.

## 3. Topografi

Wilayah Kabupaten Demak terdiri atas dataran rendah, kawasan pantai/pesisir serta perbukitan, dengan rata-rata ketinggian permukaan antara 0-100 meter di atas permukaan air laut (DPL). Berdasarkan letak ketinggian dari permukaan air laut, wilayah Kabupaten Demak dibatasi atas 3 region, sebagai berikut:

- a. Region A : 0-3 meter, meliputi sebagian besar Kecamatan Bonang, Demak, Karang tengah, Mijen, Sayung dan Wedung.
- b. Region B : 3-10 meter, meliputi sebagian besar di tiap-tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Demak; 10-25 meter, meliputi sebagian besar Kecamatan Dempet, Karangawen dan Mranggen; 5-100 meter, meliputi sebagian besar Kec. Karangawen dan Mranggen
- c. Region C : lebih dari 100 meter, meliputi sebagian kecil Kecamatan Karangawen dan Mranggen. Kemiringan Lahan di Kabupaten Demak sebagian besar relatif datar, yaitu berada pada lahan dengan kemiringan 0 – 8%. Sedangkan pada bagian selatan Kabupaten Demak memiliki kemiringan lahan yang sangat bervariasi terutama di wilayah Desa Banyumeneng dan Sumberejo. Kedua desa ini memiliki lahan dengan kemiringan 0 – 2%, 2 – 8%, 8 – 15%, 15 - 40%, dan lebih besar dari 40%.

Luas lahan berdasarkan kelas kelerengan dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.1

Luas Lahan Berdasarkan Kelas Lereng Kabupaten Demak

Luas Lahan Berdasarkan Kelas Lereng	Luas (Ha)
Datar (0-2 derajat)	88.765
Bergelombang (2-15 derajat)	834
Curam (15-40 derajat)	408
Sangat curam (> 40 derajat)	136

Sumber: Demak Dalam Angka Tahun 2017

#### 4. Geologi

Ada beberapa jenis tanah yang ada di Kabupaten Demak, yaitu: (1) Alluvial hidromorf, terdapat di sepanjang pantai; (2) Regosol, terdapat di sebagian besar Kecamatan Karangawen dan Kecamatan Mranggen; (3) Gromosol kelabu tua, terdapat di Kecamatan Bonang, Kecamatan Wedung, Kecamatan Kebonagung, Kecamatan Mijen, Kecamatan Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Gajah, Kecamatan Demak, Kecamatan Wonosalam, Kecamatan Dempet dan Kecamatan Sayung, dan (4) Mediteran, terdapat di sebagian besar Kecamatan Karangawen dan Kecamatan Mranggen.

Sebagian besar kondisi tanah yang ada di Kabupaten Demak pada musim kemarau menjadi keras dan retak-retak, sehingga tidak dapat ditanami secara intensif untuk pertanian. Pada musim penghujan tanahnya bersifat lekat sekali dan volumenya membesar, serta lembab sehingga agak sulit untuk ditanami dan memerlukan sistem drainase yang memadai. Pada beberapa daerah tertentu kondisi air tanah yang asin dapat mempengaruhi usaha-usaha petani. Gejala-gejala yang disebabkan oleh air tanah yang asin terutama nampak pada dekat pantai dan sungai/saluran pembuangan yang pada musim kemarau dimasuki air laut.

Struktur Geologi Kabupaten Demak terdiri dari: (1) Struktur Aluvium terdapat hampir semua Kecamatan di Kabupaten Demak yaitu di Kecamatan Mijen, Bonang, Demak, Gajah, Karanganyar, Wonosalam, Karangtengah, Dempet, Sayung, Guntur, Mranggen dan Karangawen; (2) Miosen, fasies sedimen terdapat di sebagian Kecamatan Karangawen yaitu di Desa Jragung dan sebagian di Kecamatan Mranggen; (3) Pliosen, fasies sedimen terdapat di sebagian kecamatan Karangawen yaitu di Desa Jragug dan sebagian di Kecamatan Mranggen; (4) Plistosen, fasies gunung api terdapat di sebagian Kecamatan Karangawen (Desa Margohayu dan Wonosekar) dan terdapat di Kecamatan Mranggen (Desa Sumberejo); dan (5) Pliosen, fasies batu gamping yaitu hanya terdapat di Kecamatan Mranggen.

#### 5. Hidrologi

Sistem jaringan sumber daya air di Kabupaten Demak meliputi sistem air baku dan irigasi serta sistem penggunaan air tanah. Sistem air baku dan irigasi meliputi Daerah Aliran Sungai Babon, Daerah Aliran Sungai Tuntang, Daerah Aliran Sungai Jragung dan Daerah Aliran

Sungai Serang. Sedangkan, peningkatan prasarana air irigasi terdiri atas pencegahan pendangkalan saluran irigasi dan peningkatan pintu-pintu air berada diseluruh bendungan dan jaringan irigasi. Peningkatan prasarana air irigasi meliputi:

1. Daerah Irigasi Sedadi Dempet;
2. Daerah Irigasi Klambu Kiri;
3. Daerah Irigasi Sedadi Godong;
4. Daerah Irigasi Guntur Kanan;
5. Daerah Irigasi Guntur Kiri;
6. Daerah Irigasi Polder Batu;
7. Daerah Irigasi Gablok;
8. Daerah Irigasi Glapan Kanan;
9. Daerah Irigasi Glapan Kiri;
10. Daerah Irigasi Jragung;
11. Daerah Irigasi Pelayaran Sayung Baru;
12. Daerah Irigasi Pelayaran Buyaran;
13. Daerah Irigasi Dolok Kanan;
14. Daerah Irigasi Dolok Kiri; dan
15. Daerah Irigasi Pucanggading Kanan.

Selain pemanfaatan air baku dan air irigasi, di wilayah Kabupaten Demak juga memanfaatkan pengambilan air tanah dalam. Air tanah dalam yaitu air tanah yang berada di bawah lapisan air tanah dangkal dan diantara 2 lapisan bebatuan impermeable. Air tanah dalam ini disebut juga air artesis. Kawasan yang memanfaatkan air tanah dalam meliputi: Kecamatan Sayung, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Demak, Kecamatan Bonang dan Kecamatan Wedung.

#### 2.1.1.2 Penggunaan Lahan

Secara administrasi luas wilayah Kabupaten Demak adalah 89.743 Ha, terdiri atas 14 kecamatan, 243 desa dan 6 kelurahan. Sebagian besar wilayah Kabupaten Demak merupakan lahan persawahan yang subur mencapai seluas 52.315 Ha (sebesar 58,29% dari luas wilayah) dan selebihnya seluas 37.428 Ha (sebesar 41,71%) merupakan lahan kering yang dipergunakan untuk perumahan-pemukiman, industri, perdagangan dan perkantoran serta prasarana umum lainnya.

Berdasarkan data penggunaan lahan, lahan persawahan di Kabupaten Demak merupakan sawah berpengairan irigasi sebesar 33.754 (37,61%) dan tadah hujan 18.424 (20,52%) sehingga Kabupaten Demak merupakan salah satu sektor basis penghasil padi di Jawa Tengah dengan jumlah

produksi padi pada tahun 2017 sebanyak 653.942 ton. Sedangkan untuk lahan kering 13,09% digunakan untuk tegal/kebun dan 10,83% digunakan untuk tambak.

### 2.1.1.3 Kondisi Demografi Daerah

Jumlah penduduk tahun 2016 di Kabupaten Demak sebanyak 1.129.298 jiwa. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2015 sebanyak 1.117.901 jiwa, atau terjadi peningkatan sebanyak 11.397 jiwa (1,01%). Jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Penduduk perempuan sebanyak 569.810 jiwa (50,46%) dan laki-laki sebanyak 559.488 jiwa (49,54%). Sedangkan jumlah rumah tangga (RT) sebanyak 307.621 RT, dengan rata-rata anggota keluarga sebanyak 3,67 (4 jiwa per Rumah Tangga). Rata-rata anggota RT sama dengan rata-rata anggota RT di Jawa Tengah sebesar 3,7 per RT. Penyebaran penduduk Kabupaten Demak berdasarkan wilayah kecamatan (2016) dapat dikemukakan sebagai berikut.

Table 2.2  
Penyebaran dan Kepadatan Penduduk  
Kabupaten Demak Tahun 2016

Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan (jiwa/Km <sup>2</sup> )
1. Mranggen	72.22	184.758	2.558
2. Karangawen	66.95	89.150	1.332
3. Guntur	57.53	76.859	1.336
4. Sayung	78.69	105.152	1.336
5. Karangtengah	51.55	62.678	1.216
6. Bonang	83.24	101.587	1.220
7. Demak	61.13	101.238	1.656
8. Wonosalam	57.88	75.959	1.312
9. Dempet	61.61	53.312	865
10. Kebonagung	41.99	40.139	956
11. Gajah	47.83	43.729	914
12. Karanganyar	67.76	70.563	1.041
13. Mijen	50.29	51.191	1.018
14. Wedung	98.76	72.983	739
Jumlah (2016)	897.43	1.129.298	1.258
2015	897.43	1.117.901	1.246
2014	897.43	1.106.328	1.233
2013	897.43	1.094.472	1.220
2012	897.43	1.082.472	1.206

Sumber: Demak Dalam Angka Tahun 2017

Kepadatan penduduk di Kabupaten Demak (2016) mencapai sebesar 1.258 jiwa/Km<sup>2</sup>. Kecamatan terpadat terdapat di Kecamatan Mranggen dengan tingkat kepadatan 2.558 jiwa/km<sup>2</sup>, sedangkan wilayah kecamatan dengan tingkat kepadatan terendah adalah Kecamatan Wedung sebesar 739 jiwa/Km<sup>2</sup>.

Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Demak dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Perkembangan penduduk tahun 2012-2016 berdasarkan jenis kelamin dapat dikemukakan dalam tabel berikut.

Tabel 2.3  
Perkembangan Penduduk Kabupaten Demak Tahun 2012 – 2016

No	Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (jiwa)
1	2012	536.367	546.105	1.082.472
2	2013	542.310	552.162	1.094.472
3	2014	548.195	558.133	1.106.328
4	2015	553.876	564.025	1.117.901
5	2016	559.488	569.810	1.129.298

Sumber : Kabupaten Demak Dalam Angka Tahun 2017

Penduduk Kabupaten Demak tahun 2012 sebanyak 1.082.472 jiwa meningkat menjadi sebanyak 1.129.298 jiwa pada tahun 2016 atau selama empat tahun meningkat sebanyak 48.826 jiwa.

Berdasarkan kelompok umur, sebagian besar penduduk Kabupaten Demak termasuk dalam usia produktif (15-64) tahun yaitu sebanyak 768.286 orang (68,03%), dan selebihnya 296.599 orang (26,26%) berusia di bawah 15 tahun dan 64.517 orang (5,71 %) berusia 65 tahun ke atas.

#### 2.1.1.4 Potensi Pengembangan Wilayah

Penataan ruang di Kabupaten Demak bertujuan mewujudkan ruang wilayah daerah berbasis sektor pertanian dan perikanan yang unggul didukung sektor perdagangan dan jasa, industri, usaha mikro kecil menengah, dan pariwisata. Pola rencana ruang di Kabupaten Demak terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung adalah kawasan yang berfungsi memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air dengan luas ± 622 Ha yang meliputi Kecamatan Karangawen dan Kecamatan Mranggen. Kawasan Budidaya terdiri dari kawasan hutan

produksi, kawasan pertanian, kawasan pertambangan, kawasan pariwisata dan kawasan permukiman dan kawasan industri, dan ruang terbuka hijau.

Pengembangan ruang terbuka hijau kawasan permukiman perkotaan dengan luas kurang lebih 4.563. Pengembangan Kawasan pertanian lahan bawah pangan direncanakan kurang lebih 55.569 di seluruh wilayah Kabupaten Demak. Sedangkan, kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan di Daerah ditetapkan 58.891 hektar yang terdiri atas:

- a. Lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas kurang lebih 54.000 Ha (lima puluh empat ribu delapan ratus) hektar; dan
- b. Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas kurang lebih 4.891 Ha. Penetapan lokasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan cadangan lahan pertanianpangan berkelanjutan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Rencana kawasan peruntukan industri dengan luas lebih 6.696 Ha hektar meliputi : Kecamatan Bonang, Kecamatan Demak, Kecamatan Gajah, Kecamatan Karang Tengah, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Karangawen, Kecamatan Kebonagung, Kecamatan Mijen, Kecamatan Mranggen, Kecamatan Sayung dan Kecamatan Wonosalam yang terdiri dari industri besar, industri menengah dan industri kecil.

#### 2.1.1.5 Wilayah Rawan Bencana

Secara umum, wilayah rawan bencana di Kabupaten Demak meliputi:

1. Wilayah rawan banjir yang terdapat di semua wilayah kecamatan di Kabupaten Demak.
2. Wilayah rawan gelombang pasang dan abrasi terdapat di Kecamatan Sayung, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Bonang dan Kecamatan Wedung. Permasalahan gelombang pasang dan rob yang cukup parah terjadi di Kecamatan Sayung, yang menyebabkan beberapa desa tenggelam dan masuk dalam kategori kumuh. Permasalahan rob merupakan hal yang sulit ditangani terutama oleh pemerintah Kabupaten Demak, karena membutuhkan penanganan khusus dan biaya yang besar, sehingga memerlukan campur tangan dari pemerintah pusat.
3. Wilayah rawan kekeringan juga terjadi di hampir seluruh Kabupaten Demak. Hal ini terjadi apabila musim kemarau

panjang sampai mengakibatkan tanah persawahan menjadi retak-retak.

4. Wilayah rawan longsor meliputi: Kecamatan Mranggen dan Kecamatan Karangawen.

Tabel 2.4

Jumlah Daerah Rawan Bencana Alam yang Dipantau  
Kabupaten Demak Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Daerah Rawan Bencana Alam Yang Dipantau	36	24	22	81	22

Sumber: BPBD Kabupaten Demak Tahun 2018

Bencana alam yang terjadi selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 adalah banjir, kebakaran, angin topan dan kalap. Kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Demak terdiri atas kawasan rawan banjir, kawasan rawan gelombang pasang dan abrasi, kawasan rawan longsor, kawasan rawan kekeringan, kawasan rawan angin topan.

## 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

### 2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

#### 1. Pertumbuhan Ekonomi dan Perkembangan Ekonomi

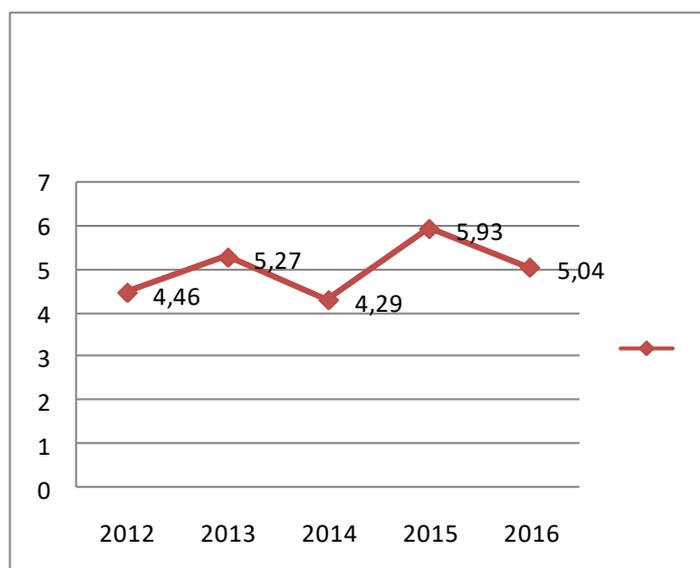
Perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan Provinsi Jawa Tengah pada khususnya, selama kurun waktu 3 tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif, begitu juga dengan perkembangan perekonomian di Kabupaten Demak. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Demak Tahun 2016 sebesar 5,04% lebih rendah dari tahun 2015 sebesar 5,93%. Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Demak dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5

Laju Pertumbuhan Ekonomi  
Kabupaten Demak Tahun 2012-2016

No	Tahun	Laju Pertumbuhan Ekonomi
1	2012	4,46
2	2013	5,27
3	2014	4,29
4	2015	5,93
5	2016	5,04

Sumber: BPS Kabupaten Demak Tahun 2018



Sumber: BPS Kabupaten Demak Tahun 2018

Grafik 2.1

Laju Pertumbuhan Ekonomi  
Kabupaten Demak Tahun 2012-2016

PDRB pada tingkat kabupaten menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. PDRB digunakan dengan dua pendekatan yaitu pendekatan lapangan usaha dan pendekatan pengeluaran. Pertumbuhan PDRB berdasarkan Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012-2016 sebagai berikut.

Tabel 2.6  
Distribusi Pertumbuhan PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha  
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012 – 2016

No.	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016
A	Pertanian Kehutanan, dan Perikanan	27,66	27,71	25,39	25,65	24,28
B	Pertambangan dan Penggalian	0,42	0,4	0,41	0,41	0,4
C	Industri Pengolahan	26,7	27,05	28,49	28,54	29,63
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
F	Konstruksi	8,19	8,12	8,38	8,39	8,37
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,6	15,47	15,5	15,47	15,65
H	Transportasi dan Pergudangan	2,57	2,52	2,65	2,69	2,65
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,4	2,26	2,28	2,2	2,16
J	Informasi dan Komunikasi	1,74	1,67	1,62	1,57	1,61
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,44	2,44	2,5	2,51	2,59
L	Real Estate	1,18	1,14	1,2	1,19	1,22
M,N	Jasa Perusahaan	0,22	0,22	0,23	0,24	0,25
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,87	3,75	3,77	3,68	3,59
P	Jasa Pendidikan	3,82	3,98	4,16	4,09	4,19

No.	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,69	0,69	0,72	0,71	0,72
R,S,T, U	Jasa Lainnya	2,37	2,42	2,55	2,5	2,54
Perkembangan PDRB (ADHB) (%)		100	100	100	100	100

Sumber : Kab. Demak Dalam Angka, 2017

Sektor industri merupakan sektor penyumbang urutan pertama dalam penyusunan PDRB Kabupaten Demak, yaitu sebesar 27,75%. Berdasarkan sumber data dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM ada 7.706 unit usaha dengan tenaga kerja sebanyak 54.401 orang. Unit usaha tersebut merupakan gabungan dari industri besar/ sedang dan kecil. Jenis industri yang berkembang terdiri dari industri makanan dan minuman, industri sandang, bahan bangunan serta industri kerajinan rakyat.

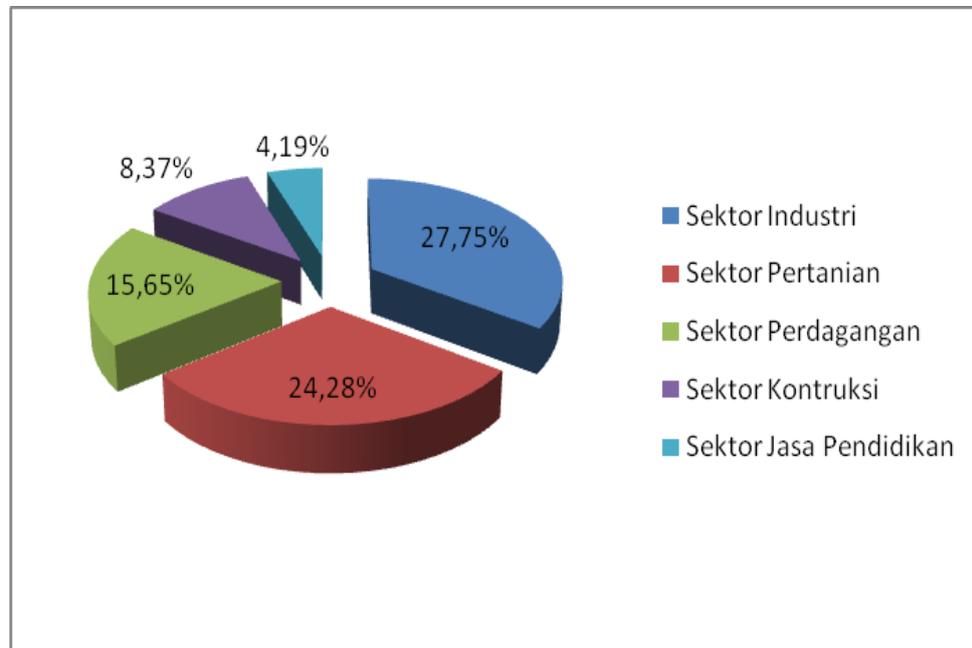
Selain sektor industri, komponen penyumbang besar terhadap PDRB di Kabupaten Demak yaitu: sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 24,28%, sektor perdagangan sebesar 15,65%, sektor konstruksi sebesar 8,37% dan sektor jasa pendidikan sebesar 4,19%. Sedangkan laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Demak menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2012-2016 sebagai berikut.

Tabel 2.7

Distribusi Pertumbuhan PDRB (ADHB) Berdasarkan Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2012 – 2016

No.	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016
A	Pertanian Kehutanan, dan Perikanan	26,75	25,8	23,92	23,93	22,54
B	Pertambangan dan Penggalian	0,44	0,42	0,42	0,41	0,4
C	Industri Pengolahan	26,09	26,9	27,77	27,79	28,74
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,1	0,11	0,11	0,11	0,11
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07
F	Konstruksi	8,43	8,42	8,5	8,46	8,54
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,4	16,4	16,62	16,63	16,77
H	Transportasi dan Pergudangan	2,82	2,88	2,97	3,03	3,04
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,58	2,53	2,57	2,53	2,52
J	Informasi dan Komunikasi	1,97	2,06	2,19	2,26	2,35
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,31	2,28	2,32	2,33	2,39
L	Real Estate	1,27	1,29	1,35	1,35	1,38
M,N	Jasa Perusahaan	0,22	0,22	0,24	0,24	0,25
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,85	3,73	3,72	3,59	3,5
P	Jasa Pendidikan	3,54	3,64	3,83	3,91	3,98
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,67	0,67	0,72	0,73	0,74
R,S,T, U	Jasa Lainnya	2,48	2,58	2,67	2,63	2,67
Perkembangan PDRB (ADHB) (%)		100	100	100	100	100

Sumber : Kab. Demak Dalam Angka, 2017



Sumber : Kab Demak Dalam Angka Tahun 2017

Grafik 2.2

Persentase Sektor-Sektor Penyumbang PDRB  
Kabupaten Demak Tahun 2016

Nilai PDRB atas Dasar Harga Berlaku tahun 2016 sebesar Rp. 20.843.920,87 juta rupiah meningkat dari tahun 2015 sebesar 19.330.295,28 juta rupiah. Peningkatan ini terjadi berturut-turut dari 2012. Hal ini menunjukkan kecenderungan yang positif dalam perekonomian di Kabupaten Demak. Selibuhnya pertumbuhan PDRB dapat dilihat dari table berikut.

Tabel 2.8

Produk Domestik Bruto (PDRB) menurut Lapangan Usaha  
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012-2016

No	Uraian	Tahun				
		2012 (juta rupiah)	2013 (juta rupiah)	2014 (juta rupiah)	2015 (juta rupiah)	2016 (juta rupiah)
1	Pertanian, Kesehatan, dan Perikanan	3.929.184,74	4.370.166,06	4.412.703,18	4.957.469,45	5.060.735,28
2	Pertambangan dan Penggalian	59.730,55	62.930,19	71.442,67	79.551,78	84.059,09
3	Insdustri Pengolahan	3.792.965,98	4.265.324,32	4.952.193,13	5.516.695,87	6.176.952,27
4	Pengadaan Listrik dan Gas	13.194,58	13.816,71	15.246,41	16.622,99	18.238,22
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10.213,29	11.094,57	11.963,82	12.955,00	13.631,63
6	Kontruksi	1.163.129,90	1.280.982,24	1.456.526,73	1.622.519,66	1.744.622,12
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.216.099,47	2.439.795,18	2.693.577,73	2.990.495,78	3.261.932,98
8	Transportasi dan Pergudangan	365.176,93	397.694,41	459.753,93	520.839,53	553.330,23

No	Uraian	Tahun				
		2012 (juta rupiah)	2013 (juta rupiah)	2014 (juta rupiah)	2015 (juta rupiah)	2016 (juta rupiah)
9	Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minuman	340.585,63	356.768,93	395.635,96	425.101,64	449.396,82
10	Informasi dan Komunikasi	247.395,33	263.219,98	280.843,83	304.426,26	334.601,23
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	346.143,63	385.467,75	435.251,70	485.196,47	538.876,30
12	Real Estate	167.714,30	179.753,10	208.972,27	230.186,48	253.342,35
13	Jasa Perusahaan	30.998,44	35.438,89	40.067,41	45.551,79	51.405,11
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	549.211,19	591.676,56	656.035,52	711.429,93	748.672,16
15	Jasa Pendidikan	542.163,76	627.183,18	723.251,04	789.874,43	873.415,24
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	97.498,50	108.108,67	125.574,79	137.523,44	150.765,47
17	Jasa Lainnya	336.155,85	381.276,47	442.356,96	483.854,78	529.944,37
	Produk Domestik Regional Bruto	14.207.562,06	15.770.997,22	17.381.397,08	19.330.295,28	20.843.920,87
	PDRB Per Kapita (Rupiah)	13.124.793,00	14.409.383,00	15.712.580,00	17.291.537,00	18.455.715,00

Sumber: Demak dalam Angka Tahun 2017

Sedangkan nilai PDRB atas Dasar Harga Konstan tahun 2016 sebesar Rp. 15.665.204,78 juta rupiah meningkat dari tahun 2015 sebesar 14.913.837,51 juta rupiah. Peningkatan ini juga berturut-turut dari tahun 2012. Hal ini menunjukkan kecenderungan yang positif dalam perekonomian di Kabupaten Demak. Selibuhnya pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan dapat dilihat dari table berikut.

Tabel 2.9  
Produk Domestik Bruto (PDRB) menurut Lapangan Usaha  
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2012-2016

No.	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pertanian Kehutanan, dan Perikanan	3.430.569,19	3.482.389,26	3.367.148,04	3.568.630,08	3.531.701,43
2	Pertambangan dan Penggalian	56.031,98	57.107,20	59.176,76	60.463,56	62.471,25
3	Industri Pengolahan	3.345.669,57	3.630.720,10	3.909.987,58	4.144.938,68	4.501.770,24
4	Pengadaan Listrik dan Gas	13.231,38	14.492,90	15.352,68	16.330,25	17.297,72
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	10.028,90	10.375,10	10.717,48	11.147,25	11.501,73
6	Konstruksi	1.080.689,30	1.137.070,55	1.196.920,82	1.262.142,93	1.338.123,93
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.103.259,55	2.214.102,43	2.339.527,54	2.480.422,72	2.627.538,97
8	Transportasi dan Pergudangan	362.243,42	388.412,21	418.490,31	451.159,70	476.281,59

No.	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	330.921,42	342.056,26	361.784,17	377.709,41	394.811,63
10	Informasi dan Komunikasi	252.131,41	277.891,51	308.431,79	337.471,85	368.856,74
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	295.973,96	307.907,38	327.280,09	346.838,14	374.982,19
12	Real Estate	163.396,36	173.574,23	189.842,48	201.861,38	215.466,84
13	Jasa Perusahaan	27.871,11	30.277,70	33.220,76	35.899,62	38.868,52
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	494.070,19	502.858,40	523.576,17	536.089,64	548.061,96
15	Jasa Pendidikan	453.446,14	491.425,33	539.732,44	582.749,11	623.152,28
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	85.593,16	90.860,63	101.060,88	108.464,32	116.371,37
17	Jasa Lainnya	318.100,00	347.705,30	376.169,82	391.518,87	417.946,39
Perkembangan PDRB (ADHB) (%)		12.823.227,04	13.499.226,49	14.078.419,81	14.913.837,51	15.665.204,78
PDRB Per Kapita (Rupiah)		11.845.959	12.333.749	12.726.727	13.340.881	13.870.353

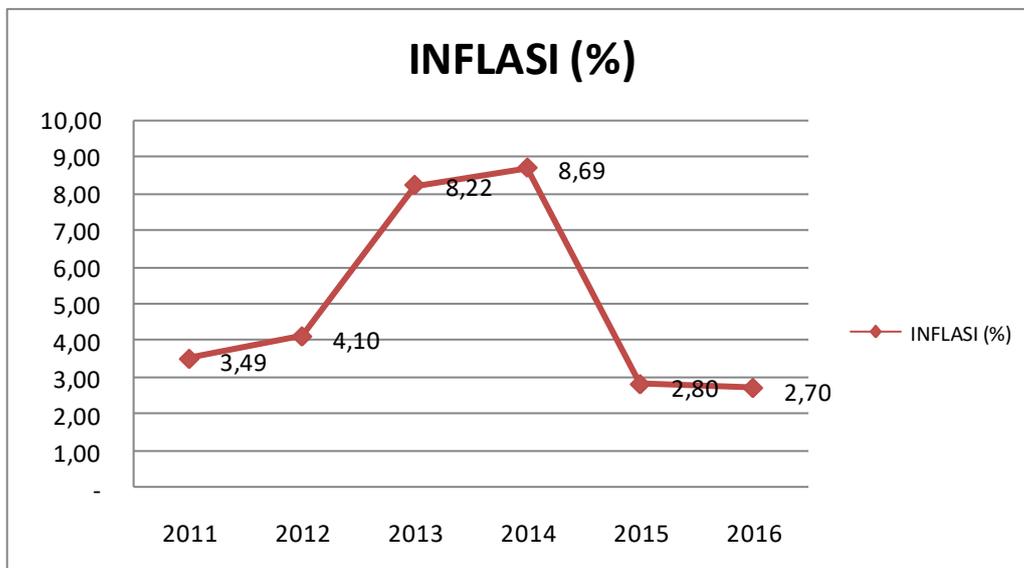
Sumber: Demak dalam Angka Tahun 2017

Dilihat dari laju pertumbuhan PDRB, kinerja perekonomian Kabupaten Demak melambat pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015, yaitu sebesar 5,93% menjadi 5,04%. Pada Tahun 2016 hampir semua sektor ekonomi mengalami peningkatan kecuali sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.

## 2. Laju Inflasi

Laju inflasi sebagai tolok ukur kestabilan perekonomian daerah saat ini sangat penting keberadannya dalam perencanaan dan penetapan anggaran daerah. Pada Tahun 2016, inflasi di Kabupaten Demak mencapai angka 2,70 %, lebih rendah dari tahun sebelumnya yang sebesar 2,8 %. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan juli yaitu sebesar 1,04 %.

Penyebab inflasi tahun 2016 terutama disebabkan oleh andil kelompok makanan yang cukup besar yaitu sebesar 7,34 % dan kelompok makanan jadi sebesar 4,49 %. Laju inflasi di Kabupaten Demak dari tahun 2011 sampai tahun 2016 sebagai berikut.



Sumber : Kab. Demak Dalam Angka, 2017

Grafik 2.3

Laju Inflasi Kabupaten Demak Tahun 2011 - 2016

### 3. Indeks Gini dan Indeks Williamson

Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Selama kurun waktu tahun 2013 – 2017 perkembangan Indeks Gini di Jawa Tengah menunjukkan angka yang cenderung membaik. Sedangkan di Kabupaten Demak Indeks Gini dari tahun 2012 sampai tahun 2017 sudah menunjukkan perubahan yang positif walau masih belum optimal. Indeks gini pada Tahun 2012 sebesar 0,383 menurun pada tahun 2017 sebesar 0,365.

Guna melihat tingkat kesenjangan antar wilayah kabupaten Demak digunakan Indeks Williamson. Pada kurun waktu tahun 2012 – 2016, Indeks Williamson Jawa Tengah semakin menurun yaitu dari 0,64 menjadi 0,62. Kondisi ini menggambarkan kesenjangan antar wilayah di Kabupaten Demak yang semakin mengecil.

### 4. Nilai Tukar Petani

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani adalah Nilai Tukar Petani (NTP). Pengukuran NTP dilakukan dengan membandingkan indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib) dalam persen pada sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat, peternakan dan perikanan.

Selama tiga tahun terakhir, capaian NTP mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014 NTP Kabupaten Demak sebesar

103,17. Pada tahun 2015 mengalami kenaikan menjadi 103,27 dan menurun kembali pada tahun 2016 menjadi 103,03. NTP pada tahun 2016 mengalami titik terendah disebabkan oleh rendahnya harga jual gabah petani akibat pengaruh kondisi iklim yang ekstrim (curah hujan yang tinggi) sehingga untuk pengeringan hasil panen padi kurang maksimal, yang menyebabkan tingginya kadar air gabah, sehingga harga relatif jatuh. Namun begitu masih relative lebih tinggi dari NTP Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016 sebesar 99,35.

#### 5. Kemiskinan

Secara absolute, kemiskinan merupakan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bias hidup dan bekerja. Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, ada 3 (tiga) indikator kemiskinan yang digunakan yaitu:

1. Persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan;
2. Indeks Kedalaman kemiskinan, yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan;
3. Indeks keparahan kemiskinan, yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Demak dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Pada tahun 2012 turun menjadi 178.100 jiwa atau 16,73% dari jumlah penduduk sejumlah 1.082.472 jiwa, pada tahun 2013 menjadi 172.500 jiwa atau 15,72 % dari jumlah penduduk sejumlah 1.094.472 jiwa. Pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin turun menjadi 161.600 jiwa atau 14,60 %, pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin turun menjadi 160.900 jiwa atau 14,44%, dan pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin turun menjadi 159.231 atau sebesar 14,10%. Data sementara untuk tahun 2017 jumlah penduduk miskin menurun sebesar 13,41%. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Demak dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2017 sebagai berikut.

Tabel 2.10  
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin  
Kabupaten Demak Tahun 2012-2017

No	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase
1	2013	172.500	15,72%
2	2014	161.600	14,60%
3	2015	160.900	14,44%
4	2016	158.800	14,10%
5	2017	152.620	13,41%

Sumber : Kab. Demak Dalam Angka, 2018

Jumlah penduduk miskin terbanyak terdapat di Kecamatan Bonang, Karangawen dan Mranggen. Jumlah penduduk miskin yang semakin menurun dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: pendidikan, ketenaga kerjaan, kesehatan, pola konsumsi, dan fasilitas perumahan. Peningkatan fasilitas pada beberapa faktor tersebutlah yang menjadikan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Demak semakin menurun dari tahun ke tahun.

#### 2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Beberapa indikator yang dapat menggambarkan kesejahteraan sosial antara lain: Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah., dan Indeks Pembangunan Manusia. Berdasarkan data statistik dapat disimpulkan bahwa dalam waktu lima tahun terakhir tingkat kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Demak semakin membaik. Kondisi ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.11  
Perkembangan Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata  
Lama Sekolah dan IPM yang Disesuaikan Tahun 2012 – 2016  
Kabupaten Demak

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016*
1	Angka Harapan Hidup	75,12	75,16	75,18	75,21	75,27
2	Harapan Lama Sekolah		11.62	11.84	12.43	12.44
3	Rata-rata Lama Sekolah		7.22	7.44	7.45	7.46
4	IPM	67,55	68,38	68,95	69,75	

Sumber : BPS Kabupaten Kudus Demak 2017

Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang

ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Angka Harapan Hidup di Kabupaten Demak Tahun 2016 relatif meningkat menjadi 75,27 dibanding Tahun 2015 sebesar 75,21. Demikian halnya Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kudus relatif meningkat dari Tahun 2015 sebesar 7,45 menjadi 7,46. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat semakin membaik.

### 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### 2.1.3.1 Fokus Layanan Wajib Pelayanan Dasar

Analisis kinerja atas layanan wajib pelayanan dasar dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yaitu:

##### 1. Pendidikan

Dalam rangka menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas, salah satu faktor penting yaitu meningkatkan derajat pendidikan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Demak memberikan perhatian khusus terhadap penyelenggaraan pendidikan melalui jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, antara lain melalui peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP), Bantuan bagi siswa dari keluarga kurang mampu berupa Beasiswa Miskin dan Kartu Indonesia Pintar (BSM, KIP), pendidikan gratis bagi warga miskin berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)/Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan peningkatan kualitas tenaga pendidik.

Layanan urusan pendidikan dapat dilihat dari indikator Angka Partisipasi Sekolah, rasio ketersediaan sekolah, dan rasio jumlah guru dan siswa sebagaimana tertera pada tabel berikut.

Tabel 2.12  
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) dengan Isian Versi APK  
Tahun 2013 – 2017 Kabupaten Demak

No	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
1	SD/MI					
1.1	Jumlah Murid Usia 7-12 Th (siswa)	103.422	109.422	95.170	100.640	102.742
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Th (orang)	121.039	119.039	111.419	108.805	107888
1.3	APK SD/MI/Paket A (%)	85,45 %	91,92 %	85,42	92,50	95,23
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah Murid Usia 13-15 Th (siswa)	49.720	60.102	46.407	39.673	42.588
2.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Th (orang)	64.520	64.320	59.616	56.281	54.419
2.3	APK SMP/MTs/Paket B (%)	77,06 %	93,44 %	77,84	70,59	78,26
3	SMA/SMK/MA					
3.1	Jumlah Murid Usia 16-18 Th (siswa)	29.303	30.305	34.524	32.182	34.122
3.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 16-18 Th (orang)	56.412	61.333	60.664	47.349	57.026
3.3	APK SMA/SMK/MA/Paket C (%)	51,94 %	49,41 %	56,91	67,97	59,84

*Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun 2018*

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa Angka Partisipasi Kasar pada jenjang pendidikan dasar dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dari tahun 2016 sebesar 92,50% menjadi 95,23% di tahun 2017. Begitu juga APK SMP/MTs?Paket B mengalami kenaikan walaupun nilainya masih relatif rendah yaitu sebesar 78,26%. Hal ini berarti masih terdapat penduduk usia 13-15 tahun yang tidak sekolah pada jenjang pendidikan menengah.

Tabel 2.13  
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)  
Tahun 2013- 2017 Kabupaten Demak

No	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Usia 7-12 Th					
1.1	Jumlah Murid Usia 7-12 Th (siswa)	103.422	109.422	95.170	100.640	102.742
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Th (orang)	121.039	119.039	111.419	108.805	107888
1.3	APS 7-12 Th (%)	85,45 %	91,92 %	85,42	92,50	95,23
2	Usia 13-15 Th					
2.1	Jumlah Murid Usia 13-15 Th (siswa)	49.720	60.102	46.407	39.673	42.588
2.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Th (orang)	64.520	64.320	59.616	56.281	54.419

No	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
2.3	APS Usia 13-15 Th (%)	77,06 %	93,44 %	77,84	70,59	78,26
3	Usia 16-18 Th					
3.1	Jumlah Murid Usia 16-18 Th (siswa)	29.303	30.305	34.524	32.182	34.122
3.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 16-18 Th (orang)	56.412	61.333	60.664	47.349	57.026
3.3	APS Usia 16-18 Th (%)	51,94 %	49,41 %	56,91	67,97	59,84

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun 2018

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dan juga sebagai ukuran daya serap, pemerataan dan akses terhadap pendidikan khususnya penduduk usia sekolah. APS SD/MI usia 7-12 tahun pada Tahun 2013 tercapai 85,45% meningkat setiap tahunnya hingga di Tahun 2017 tercapai 95,23%. Kondisi ini menggambarkan penduduk usia sekolah SD/MI telah terlayani secara baik. Adapun APS SMP/MTs usia 13-15 tahun di Kabupaten Demak juga cenderung naik, yaitu pada Tahun 2013 mencapai 77,06 naik menjadi 78,26 di Tahun 2017. Untuk APS SMA/MA/SMK usia 16-18 tahun pada Tahun 2013 mencapai 51,94 cenderung fluktuatif dan tahun 2017 sebesar 59,84%. Dengan demikian penduduk usia 16-18 yang bersekolah di Kabupaten Demak baru mencapai 59,84%, sedangkan sisanya tidak sekolah. Hal ini disebabkan keterbatasan pembiayaan dari orang tua, pilihan sekolah di kabupaten/kota lain, dan keinginan siswa melanjutkan ke Pondok pesantren. Pemberian beasiswa dan dana untuk sekolah oleh Pemerintah yang dimaksudkan untuk menjamin setiap anak bisa bersekolah, masih diperlukan untuk meningkatkan APS di Kabupaten Demak, terutama pada tingkat SMP/MTs dan SMA/MA/SMK demi mewujudkan program Pemerintah Wajib Belajar 12 tahun, namun dibutuhkan kecermatan sehingga dapat tepat sasaran.

Tabel 2.14

Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah  
Tahun 2013–2017 Kabupaten Demak

NO	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
1	SD/MI					
1.1	Jumlah Gedung Sekolah (unit)	614	612	624	624	626
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Th (orang)	121.039	119.039	111.419	108.805	107.888
1.3	Rasio	185,36	194,60	178,55	174,37	172,34
2	SMP/MTs					

NO	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
2.1	Jumlah Gedung Sekolah (unit)	216	220	217	219	216
2.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Th (orang)	64.520	64.320	59.616	56.281	54.419
2.3	Rasio	298,70	292,36	274,73	256,99	251,94
3	SMA/SMK/MA					
3.1	Jumlah Gedung Sekolah (unit)	160	164	169	169	170
3.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 16-18 Th (orang)	56.412	61.333	60.664	47.349	57.026
3.3	Rasio	352,58	373,98	358,96	280,17	335,44

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun 2018

Pelayanan pendidikan dapat dilihat dari rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah. Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah untuk jenjang pendidikan SD/MI dari Tahun 2013 sampai dengan 2017 cenderung fluktuatif, dari 185,36 di tahun 2013 menjadi 194,60 di tahun 2014 dan kemudian turun menjadi 178,55 di tahun 2015. Untuk jumlah gedung sekolah naik dari tahun 2013 sebanyak 614 unit menjadi 626 unit di tahun 2017.

Adapun jenjang SMP/MTs rasio ketersediaan sekolah cenderung fluktuatif, dimana Tahun 2013 sebesar 298,70% dan turun menjadi 251,94% di tahun 2017. Dengan melihat rasio ketersediaan sekolah per penduduk SMP/MTs menunjukkan bahwa pelayanan pendidikan berupa penyediaan sekolah relatif memadai, namun yang perlu mendapat perhatian adalah kesenjangan kualitas sarpras yang cukup lebar di desa dibandingkan di kota.

Untuk jenjang SMA/MA pada Tahun 2017 rasio gedung sekolah dibandingkan jumlah penduduk usia 16-18 tahun mencapai 335,44 dimana besaran rasio juga mengalami naik-turun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Besaran rasio ketersediaan sekolah tingkat SMA/MA sebesar 23,00 menunjukkan masih kurang memadai penyediaan sekolah tingkat SMA/MA, apalagi untuk menunjang wajib belajar 12 tahun.

Tabel 2.15  
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2013 - 2017  
Kabupaten Demak

No	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
1	SD/MI					
1.1	Jumlah Guru (orang)	7.063	7.509	6.767	6347	6.202
1.2	Jumlah Murid (siswa)	116.035	118.151	115.556	117.063	118.073

No	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
1.3	Rasio	16,42	15,73	17,07	18,44	19,03
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah Guru (orang)	5.030	4.583	4.992	3.020	4.091
2.2	Jumlah Murid (siswa)	55.975	59230	57685	55710	54.948
2.3	Rasio	11,12	12,92	11,55	18,44	13,43
3	SMA/MA					
3.1	Jumlah Guru (orang)	2.717	3.650	4.203	3.031	2.949
3.2	Jumlah Murid (siswa)	26.127	38.829	34.768	44.612	46.363
3.3	Rasio	9,61	10,63	8,27	14,71	15,72

*Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun 2018*

Pelayanan pendidikan dapat dilihat dari rasio jumlah guru terhadap murid sebagaimana tertuang pada table di atas. Dapat dilihat perkembangan rasio guru terhadap murid tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA. Rasio jumlah guru terhadap murid jenjang pendidikan SD/MI Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 menunjukkan trend yang cenderung naik. Begitu juga rasio guru untuk SMP/MTs yang juga mengalami kenaikan. Namun, pada tahun 2017 rasio guru turun dari 18,44% di tahun 2016 menjadi 13,43% di tahun 2017. Untuk SMA/MA perkembangannya juga fluktuatif dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelayanan pendidikan berupa penyediaan guru cenderung mengalami peningkatan, namun masih perlu memperhatikan dalam rangka peningkatan kualitas guru. Adapun untuk pendidikan gratis di sekolah negeri, mulai SD sampai dengan SMP telah dibiayai oleh Pemerintah Daerah. Untuk SMA baru teranggarkan untuk biaya operasionalnya di Tahun 2015 dan Tahun 2016. Sedangkan untuk sekolah-sekolah swasta juga mendapatkan dana BOS dengan besaran yang lebih kecil, sehingga masih diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya dari iuran siswa. Namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana terdapat pembagian urusan kewenangan khususnya di Bidang Pendidikan, bahwa untuk Program Pendidikan Menengah (Dikmen) yaitu SMA/SMK sederajat pengelolaannya menjadi kewenangan Provinsi, sedang Pemerintah Kabupaten menangani Pendidikan Dasar (Dikdas), Pendidikan Non Formal dan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini).

Tabel 2.16  
Angka Putus Sekolah Tahun 2013 s.d 2017  
Kabupaten Demak

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Angka Putus Sekolah Usia 7 – 12 (SD/MI)	0,09	0,07	0,07	0,10	0,03
2	Angka Putus Sekolah Usia 13 – 15 (SMP/MTs)	0,06	0,5	0,05	0,42	0,21
3	Angka Putus Sekolah Usia 17 – 19 (SMA/MA/SMK)	0,6	0,5	0,07	0,05	

Sumber :Dindikbud Kab. Demak Tahun 2018

Angka putus sekolah usia 7–12 (SD/MI) di Kabupaten Demak pada tahun 2013 sebesar 0,09% dan pada tahun 2014 turun sebesar 0,07% dan tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 0,08%. Pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 0.10%, sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 0.03%.

Capaian Angka Putus Sekolah di kecamatan yang tertinggi adalah kecamatan Mranggen dan Karangawen sebesar 0.08 . Sedangkan angka putus sekolah di kecamatan yang terendah adalah Kecamatan Sayung, Karangtengah, Wonosalam, Gajah dan Wedung. Penyebab tingginya angka putus sekolah yang paling dominan adalah faktor ekonomi.

## 2. Kesehatan

Pembangunan kesehatan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari pembangunan nasional, karena kesehatan sangat terkait, dapat mempengaruhi aspek demografi/kependudukan, keadaan dan perkembangan perekonomian. Sebagai upaya peningkatan kualitas hidup manusia, pembangunan bidang kesehatan merupakan komponen penting untuk mendorong produktivitas masyarakat. Hal ini dikarenakan apabila kondisi kesehatan manusia terjaga, maka dapat memenuhi kebutuhan hidup dalam meningkatkan kesejahteraan. Pembangunan kesehatan dilakukan melalui promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, dimana sebagai upaya pencegahan terhadap kejadian kesakitan upaya yang dilakukan adalah promotif dan preventif. Upaya meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan telah didukung melalui pemenuhan sarana prasarana dan tenaga medis serta paramedis yang masih perlu ditingkatkan. Tabel berikut menunjukkan jumlah puskesmas dan Pustu sebagai sarana pelayanan kesehatan dasar di Kabupaten Demak.

Tabel 2.17  
Jumlah Puskesmas dan Pustu Tahun 2013 – 2017  
Kabupaten Demak

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Puskesmas	27	27	27	27	27
2.	Jumlah Pustu	52	52	52	52	52
3.	Jumlah Penduduk	1.162.997	1.176.720	1.117.901	1.129.402	1.140.675
4.	Rasio Puskesmas per 1000 penduduk	0,0232	0,0229	0,0242	0,0239	0,0237
5.	Rasio Pustu per 1000 penduduk	0,0447	0,0442	0,0465	0,0460	0,0456

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, disebutkan bahwa jumlah puskesmas pada tahun 2017 masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu 27 unit. Begitu juga dengan jumlah pustu yang sama dengan tahun sebelumnya yang berjumlah 52 unit. Rasio puskesmas sebesar 0,0237 dan rasio pustu sebesar 0,0456 pada tahun 2017.

Tabel 2.18  
Jumlah Rasio Rumah Sakit per Jumlah Penduduk  
Kabupaten Demak Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	1	1	1	1	1
2.	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/AI /POI RI	0	0	0	0	0
3.	Jumlah Rumah Sakit Swasta:					
	a. Rumah Sakit Umum Swasta	2	2	2	2	2
	b. Rumah Sakit Bersalin					
	c. Rumah Sakit Anak					
4.	Jumlah seluruh Rumah Sakit	3	3	3	3	3
5.	Jumlah Penduduk	1.162.997	1.176.720	1.117.901	1.129.402	1.140.67
Su	Rasio (per 1000 penduduk)	0,00258	0,00255	0,00268	0,00266	0,00026

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Tahun 2018

Rasio jumlah rumah sakit dibanding jumlah penduduk pada tahun 2017 tidak ada peningkatan dari tahun 2016 karena tidak ada penambahan rumah sakit sedangkan jumlah penduduk mengalami penambahan tetapi tidak signifikan. Sampai dengan Tahun 2017 di Kabupaten Demak hanya terdapat 3 sarana kesehatan (rumah sakit) milik pemerintah dan swasta yang dapat diakses oleh masyarakat dan belum terdapat Rumah Sakit Bersalin serta Rumah Sakit Anak. Hal ini menyebabkan masih rendahnya rasio jumlah rumah sakit terhadap jumlah penduduk. Untuk tahun 2019 direncanakan terdapat penambahan satu rumah sakit lagi yaitu Rumah Sakit Karangawen yang diharapkan dapat menambah pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan.

Tabel 2.19  
Jumlah Dokter di Kabupaten Demak  
Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Dokter	140	141	160	161	188
2.	Jumlah Penduduk	1.162.997	1.176.720	1.117.901	1.129.402	1.140.675
3.	Rasio (per 1000 penduduk)	0,120	0,120	0,143	0,143	0,165

*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Tahun 2018*

Menurut standart WHO, target Indonesia Sehat 2010, perlu disediakan 40 dokter umum untuk melayani 100.000 penduduk. Berdasarkan data Tabel di atas, rasio jumlah dokter per jumlah penduduk pada Tahun 2017 mengalami kenaikan bila dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, jumlah dokter tersebut belum mencapai rasio ideal tiap dokter terhadap 100.000 penduduk berdasarkan Indonesia Sehat 2010 yaitu 40 per 100.000 jumlah penduduk (satu orang dokter melayani 2.500 penduduk), sehingga perlu penambahan lagi jumlah dokter di Kabupaten Demak.

Tabel 2.20  
Jumlah Tenaga Perawat, Bidan dan Tenaga Kesehatan Lainnya  
di Kabupaten Demak Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Perawat	408	669	584	629	640
2.	Jumlah Bidan	381	487	416	379	423
3.	Jumlah Tenaga Kesehatan Lainnya	78	165	164	165	174
4.	Jumlah Penduduk	1.162.9977	1.176.720	1.117.901	1.129.402	1.140.675
5.	Rasio (per 1000 penduduk)	0,745	1,123	1,041	1,039	1,084

*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Tahun 2018*

Untuk rasio jumlah tenaga perawat, bidan dan tenaga kesehatan lainnya dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017 cenderung tidak mengalami peningkatan, namun menurun bila dibandingkan dengan tahun 2013 dan 2014. Hal ini disebabkan karena tenaga kesehatan hanya mengalami sedikit penambahan, namun tidak sebanding dengan peningkatan jumlah penduduk.

Tabel 2.21  
 Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan  
 Angka Kematian Balita Kabupaten Demak  
 Tahun 2013 – 2017

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Angka Harapan Hidup (tahun)	75,16	75,18	75,21	75,27	75,27
2	Angka Kematian Ibu Melahirkan	116,48	81,68	106,46	72,53	67,14
3	Angka Kematian Bayi (per 1000 KH)	5,8	6,4	7,2	6,1	6,3
4	Angka Kematian Balita (per 1000 KH)	1,12	1,3	1,65	1,6	3,06

*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Tahun 2018*

Berdasarkan tabel diatas, untuk mengukur peningkatan derajat kesehatan masyarakat antara lain dengan indikator Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup, Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup. AHH cenderung mengalami peningkatan dari Tahun 2012 sampai Tahun 2016. Kasus kematian ibu dari tahun 2013-2017 cenderung mengalami penurunan. pada Tahun 2015 mengalami peningkatan yang signifikan (106,46 per 100.000 kelahiran hidup), angka ini lebih tinggi dibanding target nasional maupun target Provinsi Jawa Tengah yaitu 102 per 100.000 kelahiran hidup. Penyebab kematian terbanyak adalah penyebab langsung diantaranya karena penyakit penyerta atau penyakit kronis seperti jantung, TB Paru, hepatitis dan hipertensi. Faktor penyebab kematian yang lain adalah faktor usia, jumlah anak (paritas), eklamsia, perdarahan dan emboli. Tahun 2016 sampai tahun 2017 angka Kematian Ibu cenderung mengalami penurunan dan sudah lebih rendah pabila dibandingkan dengan target yang diharapkan sebesar 102/100.000 KH.

Faktor penyebab kematian ibu karena perdarahan, infeksi dan adanya 3 terlambat (terlambat merujuk, terlambat sampai ditempat rujukan, terlambat mendapatkan pertolongan). Penyakit penyerta saat kehamilan seperti penyakit pada jantung, paru serta asma, hipertensi, DM juga mempengaruhi kematian pada ibu. Penanganan kasus Kematian Ibu memerlukan kerjasama yang baik antara lintas program dan lintas sektoral terkait. Dinas Kesehatan telah berupaya untuk melaksanakan kegiatan yang mengacu pada rencana aksi nasional tentang penurunan AKI dan AKB dengan dukungan dana baik dari APBN (DAK Non Fisik), APBD, dan Pajak rokok. Program kegiatan sudah dilaksanakan dengan baik dan capaiannya juga

menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Untuk itu kerja sama lintas sektoral (Dinpermasdes P2KB, Dindikbud, Kementerian Agama, PKK, dan pihak lain terkait) harus diperkuat lagi agar ibu hamil benar-benar merupakan kehamilan yang diinginkan dan kondisi ibu sehat.

Angka Kematian Bayi mengalami kenaikan dari Tahun 2013 sampai Tahun 2015, dan menurun pada tahun 2016 namun sedikit meningkat kembali pada tahun 2017. Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Demak Tahun 2015 sebesar 7,2 per 1000 Kelahiran Hidup (KH) masih lebih rendah dibandingkan target nasional yaitu 23 per 1000 KH. Tahun 2016 terjadi penurunan Angka Kematian Bayi menjadi 6,1 per 1000 KH. Analisis penyebab kematian bayi tertinggi karena kasus BBLR (Berat Badan Lahir Rendah) yang membutuhkan intervensi adekuat karena belum ada kematangan organ. Penyebab BBLR adalah persalinan sebelum waktunya atau prematur, disamping itu kasus yang lain adalah asfiksia (kegagalan bayi baru lahir untuk bernapas secara spontan & teratur), sepsis (kondisi medis serius di mana terjadi peradangan di seluruh tubuh yang disebabkan oleh infeksi), kelainan congenital aspirasi. Program kegiatan pelayanan anak memang sudah cukup baik capaian targetnya tapi belum diikuti oleh kualitas layanannya sehingga masih perlu dilakukan pembinaan dan pelatihan petugas, untuk itu di program anak dilaksanakan pelatihan manajemen asfiksia dan BBLR.

Angka Kematian Balita (AKBa) dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 cenderung mengalami kenaikan. Tahun 2016 AKBa sebesar 1,6 per 100 Kelahiran Hidup (KH) dan tahun 2017 meningkat menjadi 6,3 per 1000 KH. Kecenderungan Angka Kematian Balita dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 mengalami kenaikan dikarenakan faktor lain-lain yang intervensinya memang sulit penanganannya contoh, kanker, talasemia, kelainan jantung walaupun masih ditemukan juga kasus-kasus yang sebenarnya bisa ditangani secara adekuat (memenuhi syarat/memadai) agar tidak timbul kematian misalnya DBD, DIARE, FEBRIS.

Tabel 2.22  
Status Gizi Balita Tahun 2013 – 2017  
Kabupaten Demak

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Balita Gizi Kurang	9,44	10,00	7,59	6,26	6,17
2	Balita Gizi Buruk	1,38	1,53	1,38	0,95	0,94
3	Cakupan Balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Tahun 2018

Perkembangan persentase balita gizi kurang cenderung mengalami penurunan dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017. Sedangkan persentase balita gizi buruk pada Tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 mengalami penurunan hanya sedikit meningkat pada tahun 2014. Cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan sebesar 100%.

### 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sarana-prasarana (infrastruktur/pekerjaan umum) memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, budaya, serta dalam memfasilitasi interaksi dan komunikasi antar kelompok masyarakat. Peningkatan kualitas infrastruktur, terutama jalan, jembatan, irigasi dan pasar memiliki fungsi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang memungkinkan orang, barang dan jasa bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, serta mendorong produksi dan distribusi komoditi ekonomi, sehingga sangat mendukung daya saing ekonomi daerah. Selain itu penyediaan air bersih dan pembangunan sanitasi yang memadai sangat diperlukan mengingat wilayah Kabupaten Demak masih sangat potensial rawan kekeringan.

Tabel 2.23  
Kondisi Jalan Tahun 2012 – 2016  
Kabupaten Demak

Kondisi Jalan	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
Baik/ Sedang	meter	33.696,83	373.110,95	374.006,62	386.162,15	390.472,25
	%	77,77	87,48	87,69	90,54	91,54

Sumber: Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Demak Tahun 2017

Prasarana jalan di Kabupaten Demak sudah terbangun cukup baik. Hal ini memang menjadi prioritas Kabupaten Demak mengingat fungsi jalan yang sangat vital dalam menunjang kegiatan perekonomian daerah. Jalan yang dibangun bahkan sudah sampai pada jalan poros desa dan penghubung antar kecamatan dengan total panjang jalan kabupaten sebanyak 426.510 km dan panjang jalan negara/provinsi sebanyak 42.860 km.

Aspek pelayanan umum dilihat dari kondisi jalan di Kabupaten Demak sudah tergolong baik. Kondisi jalan baik dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 terus mengalami peningkatan. Hal ini dilaksanakan guna memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pelayanan umum. Pada tahun 2016 sudah 91,54% kondisi jalan di Kabupaten Demak dalam kondisi baik. Dari total 426.559,15 meter hanya 36.086,9 dalam kondisi rusak ringan sampai berat. Selebihnya kondisi jalan

dalam kondisi baik di Kabupaten Demak dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.24  
Jumlah dan Kondisi Jembatan Tahun 2012 – 2016  
Kabupaten Demak

Kondisi Jembatan	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
Baik	Unit	77	101	148	220	231
	%	25,67	33,67	49,33	73,33	77,00

Sumber: Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Demak Tahun 2017

Pembangunan jembatan di Kabupaten Demak dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 mengalami peningkatan baik dari aspek peningkatan kondisi jembatan maupun peningkatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi jembatan. Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa proporsi jembatan dalam kondisi baik pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 77% dibandingkan tahun 2015 sebesar 73,33%.

Tabel 2.25  
Kondisi Daerah Irigasi Tahun 2012 – 2016  
Kabupaten Demak

Kondisi Daerah Irigasi	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
Baik	Ha	1.464,46	1.465,28	1.466,09	1.466,90	1.467,72
	%					
Jumlah Pembulatan	Ha	1.464	1.465	1.466	1.467	1.368
Persentase	%	90,01	90,06	90,11	90,16	90,21

Sumber: Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Demak Tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas, kondisi Irigasi dalam keadaan baik sebesar 1.467,72 Ha. Daerah irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Demak pada tahun 2016 telah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 panjang drainase terbangun adalah 1.588,83 meter dan 1.298 meter atau sekitar 81,69% dalam kondisi baik. Kondisi Daerah Irigasi (DI) dengan kondisi baik perlu dipertahankan kualitasnya melalui pemeliharaan, sehingga mampu mengairi lahan pertanian secara optimal, sedangkan DI dengan kondisi rusak sedang rusak ringan dan rusak berat perlu dilakukan rehabilitasi sehingga kondisinya menjadi baik untuk meningkatkan ketersediaan air irigasi. Pada tahun 2016 luas lahan pertanian di Kabupaten Demak sebesar 52.315 Ha (58,29% dari luas wilayah), dan lahan pertanian yang merupakan sawah berpengairan irigasi sebesar 33.754 (37,61%).

Penataan Ruang yang dilaksanakan di Kabupaten Demak meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang

dan pengendalian pemanfaatan ruang. Rencana umum yang disusun berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten yang sudah ditetapkan melalui Perda Nomor 16 Tahun 2012. Sedangkan rencana rinci disusun sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang, yang terdiri atas 6 (enam) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan dan 2 (dua) Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Kabupaten. Dokumen tata ruang yang telah disusun tahun 2012 – 2016. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.26  
Perencanaan Penataan Ruang Tahun 2012-2016  
Kabupaten Demak

KEGIATAN				
2013	2014	2015	2016	2017
1. Peyusunan draf RDTRK Karanganyar	1. Peyusunan draf RDTRK Karangtengah	1. Peyusunan draf RDTRK Bonang	1. Peyusunan draf RDTRK Kebonagung	1. Keputusan DPRD Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011 – 2031 untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah
2. Peyusunan draf RDTRK Karangawen		2. Peyusunan draf RDTRK Wedung	2. Peyusunan KLHS RDTRK Kebonagung	2. Persetujuan Bersama Bupati Demak dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 /MoU/2017 Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
3. Peyusunan draf RDTRK Mijen		3. Peyusunan KLHS RDTRK Bonang	3. Penyusunan Revisi RTRW Kabupaten Demak Tahun 2011-2031	
		4. Peyusunan draf KLHS RDTRK Wedung		
		5. Penyusunan Review Perda Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Demak Tahun 2011-2031		

KEGIATAN				
2013	2014	2015	2016	2017
				Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011 – 2031 untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah 3. Konsultasi Publik I Revisi RTRW Kabupaten Demak Tahun 2011-2031. 4. Konsultasi Publik II Revisi RTRW Kabupaten Demak Tahun 2011-2031

Sumber: Bappeda Litbang Kabupaten Demak Tahun 2018

Pelaksanaan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang lebih diarahkan untuk monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang melalui mekanisme perizinan serta sosialisasi regulasi penataan ruang dan pelatihan pengendalian pemanfaatan ruang untuk aparat Pemerintah daerah. Permasalahan dalam pemanfaatan ruang salah satunya adanya alih fungsi lahan karena peningkatan pembangunan ekonomi pada sektor perdagangan, industri, dan perumahan. Pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang lebih diarahkan untuk monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang melalui mekanisme perizinan serta sosialisasi regulasi penataan ruang dan pelatihan pengendalian pemanfaatan ruang untuk aparat Pemerintah daerah. Permasalahan dalam pemanfaatan ruang salah satunya adanya alih fungsi lahan karena peningkatan pembangunan ekonomi pada sektor perdagangan, industri, dan perumahan.

#### 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman telah dilaksanakan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perumahan dan permukiman yang layak huni dan sehat, pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran, pemberdayaan komunitas perumahan dan pemeliharaan areal pemakaman.

Tabel 2.27  
Capaian Indikator Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  
Kabupaten Demak Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi	221.333	223.330	233.479	233.679	243.972
3	Persentase Penduduk yang Mengakses Air Minum	35,47	46,80	50,23	56,35	

*Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak Tahun 2018*

Berdasarkan tabel di atas, indikator keberhasilan yang telah dicapai antara lain terwujudnya fasilitas permukiman yang layak huni dan bersanitasi banik. Capaian penduduk yang mengakses air minum mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2016 sebesar 56,35%. Peningkatan pelaksanaan program PAMSIMAS, pembuatan embung desa, bantuan hibah air minum merupakan upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Demak dalam peningkatan akses masyarakat terhadap kebutuhan air minum.

#### 5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Salah satu upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Demak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap kondusif adalah melalui kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan tindak kejahatan, pengembangan wawasan kebangsaan, pemberantasan penyakit masyarakat dan pembinaan kepada anggota linmas. Partisipasi personil Linmas juga sangat diperlukan dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat guna membentuk personil Linmas yang handal dan berkualitas.

Tabel 2.28  
Rasio Jumlah Linmas Tahun 2012 – 2016  
Kabupaten Demak

No	U r a i a n	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Linmas	7437	7437	7391	7391	7391
2.	Jumlah Penduduk	1.092.622	1.098.132	1.99.436	1.100.061	1.113.014
3.	Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk	68,07	65,50	63,67	67,76	66,96

*Sumber: Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Demak Tahun 2018*

Perkembangan rasio jumlah linmas menunjukkan kepedulian masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan sebagaimana tertera pada tabel di atas. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk sebesar 66,96 per 10.000 penduduk pada tahun 2016. Jumlah linmas pada tahun 2016 sebesar 7.391 jiwa.

Tabel 2.29  
Jumlah LSM Tahun 2012 – 2016  
Kabupaten Demak

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah LSM lokal					
2.	Jumlah LSM nasional	56	68	84	99	111
3.	Jumlah LSM asing/internasional	0	0	0	0	0
4.	Jumlah LSM	56	68	84	99	111

Sumber: Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Demak Tahun 2017

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam upaya pengabdian dan kontrol kegiatan di bidang tertentu. Semakin besar jumlah LSM menunjukkan kontrol masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meningkat. Berdasarkan tabel di atas, jumlah LSM tahun 2016 tercatat sejumlah 111. Peran serta LSM diharapkan mampu sebagai sarana penyalur aspirasi anggota dan atau masyarakat dan sarana komunikasi sosial timbal balik antara anggota dan atau antara organisasi kemasyarakatan dengan organisasi kekuatan sosial politik tetap berjalan sebagaimana mestinya dan dapat membantu Pemerintah Daerah ikut menciptakan suasana yang kondusif untuk mensukseskan pembangunan.

Tabel 2.30  
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Tahun 2013 – 2017  
Kabupaten Demak

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Polisi Pamong Praja	49	59	59	58	135
2.	Jumlah Penduduk	1.063.768	1.160.896	1.063.768	1.080.700	1.116.343
3.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	0,48	0,42	0,48	0,41	1,2

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak Tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas, jumlah Polisi Pamong Praja di Kabupaten Demak hanya mengalami sedikit kenaikan dari tahun 2013. Sebagai upaya membantu menjaga keamanan dan

ketertiban pada tahun 2017 terdapat penambahan jumlah polisi pamong praja sebanyak 77 personil dari 58 menjadi 135.

Salah satu kegiatan dalam pelaksanaan penataan lingkungan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Demak adalah penertiban terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah. Pelaksanaan penertiban ini dilaksanakan secara terpadu antara Instansi Pemerintah, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja serta instansi vertikal lainnya. Dalam rangka peningkatan ketertiban di Kabupaten Demak, beberapa upaya yang telah dilakukan yaitu penertiban PKL, pengamanan demo dan penanganan konflik di daerah bekerjasama dengan instansi terkait, razia pelajar dan operasi PEKAT. Selain itu, dilakukan mitigasi bencana melalui pembentukan desa tangguh bencana, penanganan bencana daerah, dan perbaikan fasilitas publik akibat bencana.

Tabel 2.31  
Jumlah Penegakan PERDA dan Penyelesaian Penegakan PERDA  
Kabupaten Demak Tahun 2013 – 2017

NO	U r a i a n	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Penegakan PERDA	1.348	795	750	650	316
2.	Penyelesaian penegakan PERDA	744	790	396	523	316

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak Tahun 2018

Dari tabel di atas, diketahui bahwa penegakan perda pada tahun 2017 mencapai 650 kasus dengan penyelesaian penegakan perda mencapai 523 kasus.

## 6. Sosial

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Demak dalam perlindungan sosial dilaksanakan antara lain melalui Program Peningkatan Jaminan Sosial, Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma, Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PKS, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya), Program Pembinaan Panti Asuhan/Pati Jompo, Program Penanganan Korban Bencana dan Program Pengembangan Nilai-Nilai Kepahlawanan.

Pelaksanaan Urusan Sosial Demak diberikan melalui pemberian fasilitasi bantuan sosial dan hibah berupa uang kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang bergerak dibidang sosial, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Pemberian bantuan

sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat bersifat tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Tabel 2.32  
Kinerja Pelayanan Sosial Tahun 2012 – 2016  
Kabupaten Demak

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah sarana sosial	223	228	238	238	238
2	Jumlah PMKS	151312	161672	145094	157500	157500
3	Jumlah PMKS terlayani	22 517	33 219	24 171	29 190	38 795
4	Jumlah PSKS	557	557	557	557	557

Sumber: DINSOSP2PA Kabupaten Demak Tahun 2017

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan melalui penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang didukung dengan penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Adapun jenis PMKS terdiri dari psikotik, lansia terlantar, Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT), disabilitas; sedangkan PSKS yang merupakan potensi pendukung yang bersama-sama dengan pemerintah/pemerintah daerah untuk penanganan PMKS antara lain yaitu Karang Taruna, Taruna Siaga Bencana, Pekerja Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Penyuluh Sosial, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Dunia Usaha yang aktif melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial.

Tabel 2.33  
Jumlah PMKS yang Ditangani Pemerintah Kabupaten Demak  
Tahun 2016-2017

NO	SUB BAGIAN	Tahun	
		2016	2017
1	Anak Balita Terlantar	424	<b>126</b>
2	Anak Terlantar	161	<b>278</b>
3	Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Abh)	5	<b>11</b>
4	Anak Jalanan	24	<b>172</b>
5	Anak Dengan Kedisabilitasan	231	<b>1368</b>
	# Disabilitas Fisik :		
	- Rungu/Wicara ( Tuna Laras )		
	- Mata ( Tuna Netra)		
	- Tubuh ( Tuna Daksa )		
	# Disabilitas Fisik Dan Mental ( Disabilitas Ganda)		
	# Disabilitas Mental :		
	- Mentak Eks Psikotik (Tuna Laras )		
	- Mental Reterdasi ( Tuna Grahita )		

NO	SUB BAGIAN	Tahun	
		2016	2017
6	Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Atau Diperlakukan Salah	3	12
7	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	62	1
8	Lanjut Usia Terlantar	6364	8388
9	Penyandang Disabilitas :	902	3468
	# Disabilitas Fisik Dan Mental ( Disabilitas Ganda)		
	# Penyandang Disabilitas Fisik :		
	- Mata ( Tuna Netra)		
	- Rungu/Wicara ( Bisu Tuli )		
	- Tubuh ( Tuna Daksa )		
	# Penyandang Disabilitas Mental		
	- Mental Eks Psikotik (Tuna Laras )		
	- Mental Reterdasi ( Tuna Grahita )		
10	Tuna Susila	5	2
11	Gelandangan	10	28
12	Pengemis	24	170
13	Pemulung	158	182
14	Kelompok Minoritas	2	1
15	Eks Warga Binaan Lp	164	107
16	Orang Dengan Hiv/Aids (Odha)	3	25
17	Korban Penyalahgunaan Napza	1	70
18	Korban Trafficking	2	11
19	Korban Tindak Kekerasan	6	211
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (Pmbs)	6	72
21	Korban Bencana Alam	3	351
22	Korban Bencana Sosial	0	0
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (Wrse)	674	992
24	Fakir Miskin	143176	156239
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	122	122
26	Komunitas Adat Terpencil	1414	1417

Sumber: DINSOSP2PA Kabupaten Demak Tahun 2017

Pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial berpedoman pada empat pilar yakni perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial. Pilar perlindungan sosial dan pilar jaminan sosial diarahkan melalui pemberian bantuan dan jaminan hidup bagi masyarakat miskin non produktif (lansia, difabel, penyakit kronis, dan psikotik), sedangkan pilar rehabilitasi sosial dan pilar pemberdayaan sosial diarahkan melalui pembinaan mental, pemberian pelatihan ketrampilan serta akses permodalan dan bantuan alat kewirausahaan yang dilaksanakan pada panti/sasana/rumah pelayanan sosial baik milik pemerintah/pemerintah daerah dan swasta/masyarakat. Muara

dari penanganan PMKS adalah mendorong dan menciptakan kemandirian sehingga mampu melaksanakan fungsi sosial secara optimal. Salah satu media/alat untuk mendukung proses rehabilitasi sosial adalah pemberian stimulan/bantuan sosial berupa barang bagi PMKS potensial sesuai kemampuan dan minat. Pada Tahun 2017 Pemerintah Provinsi telah menyalurkan bantuan sosial kepada PMKS sebanyak 19.954 jiwa (0,40 persen) meningkat jika dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya. Jumlah PMKS yang ditangani Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak sebagai berikut.

#### 2.1.3.2. Fokus Layanan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

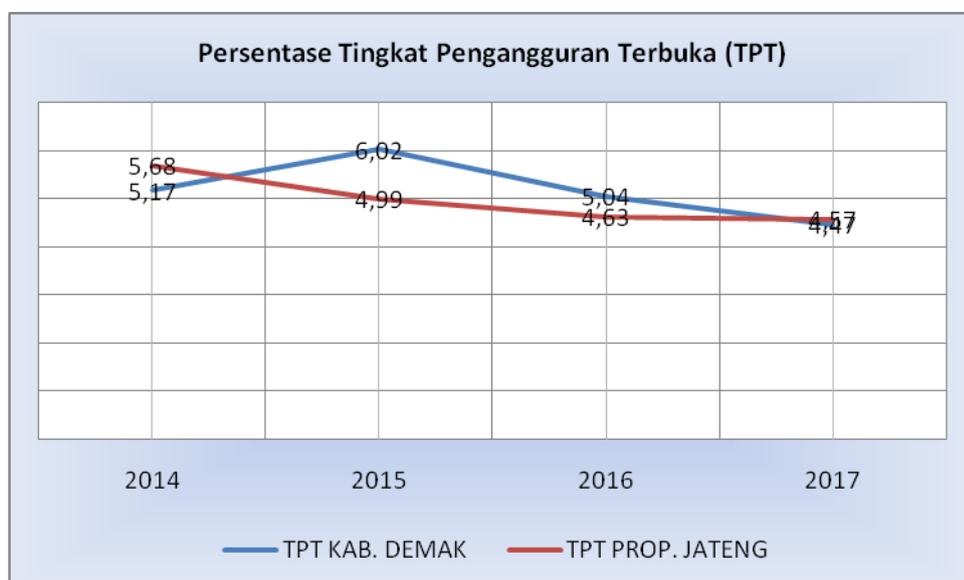
##### 1. Tenaga Kerja

Upaya pembangunan daerah melalui urusan ini, diarahkan bagi perluasan kesempatan kerja/berusaha khususnya bagi penganggur dan mengurus rumah tangga sehingga diharapkan dapat meningkatkan potensi dan daya saing dalam mencari ataupun menciptakan lapangan kerja mandiri. Namun demikian kendala yang dihadapi pemerintah yaitu peningkatan penyerapan tenaga kerja tidak sebanding dengan pertumbuhan calon tenaga kerja.

Tingkat perekonomian rumah tangga biasanya dipengaruhi oleh keberadaan anggota rumah tangga yang bekerja. Semakin banyak anggota rumah tangga yang bekerja biasanya perekonomian akan lebih baik. Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Kemampuan penyerapan tenaga kerja secara langsung akan sangat berkaitan dengan tingkat pengangguran. Semakin besar kemampuan penyerapan tenaga kerja maka semakin rendah pula tingkat pengangguran yang tercipta.

Sebagian besar masyarakat di Kabupaten Demak bekerja pada sektor pertanian, dan perikanan dengan jumlah 141.674 atau sebesar 26,51% pada tahun 2016. Selain itu masyarakat juga bekerja di sektor industri pengolahan sebanyak 101.623 (19,01%), sektor perdagangan 123.086 (23,03%), dan jasa kemasyarakatan 167.918 (31,42%).

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Demak Tahun 2016 sebesar 4,47% mengalami penurunan dari tahun 2015 sebesar 6,02% dan tahun 2014 sebesar 5,17%. Hal ini menunjukkan perkembangan yang positif. Selengkapnya dapat dilihat dalam grafik berikut.



Sumber : BPS dan Dinnakerind Tahun 2017

Grafik 2.5

#### Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Jumlah penduduk usia produktif (15-64 th) di Kabupaten Demak sebanyak 781.573 dan penduduk yang bekerja pada tahun 2016 sebanyak 534.301 orang yang terdiri dari 316.456 laki-laki dan 217.845 perempuan. Jumlah pengangguran yang ada di Kabupaten Demak yaitu sebesar 247.272 (31,63%), merupakan jumlah yang cukup tinggi. Banyaknya pengangguran terjadi karena masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Demak dan sedikitnya jumlah lapangan pekerjaan yang ada.

Menurut Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, banyaknya pencari kerja yang mendaftar selama tahun 2016 sebanyak 7.013 orang. Sebagian besar dari pencari kerja tersebut berpendidikan setingkat SLTA (3.752 orang) dan selebihnya 770 orang berpendidikan setingkat SLTP, 1596 orang berpendidikan Diploma/Perguruan Tinggi dan 292 orang berpendidikan SD.

Tabel 2.34

Perkembangan UMR Kabupaten Demak dari Tahun 2013-2017

No	Tahun	Upah Minimum Regional (UMR)
1	2013	Rp. 995.000,00/bln
2	2014	Rp. 1.280.000,00/bln
3	2015	Rp. 1.535.000,00/bln
4	2016	Rp. 1.745.000,00/bln
5	2017	Rp. 1.900.000,00/bln

Sumber: Dinpmptsp Kab. Demak Tahun 2017

Dari tahun ke tahun Kabupaten Demak terus melakukan perbaikan terkait kesejahteraan masyarakat. Hal ini

dapat dilihat dari jumlah UMR yang mengalami kenaikan dari semula Rp. 995.000,00 pada tahun 2013 naik hingga Rp. 1.900.000,00 pada tahun 2017. Pemerintah Kabupaten Demak berupaya mengurangi jumlah pengangguran dengan melakukan perbaikan di sector ketenaga kerjaan.

## 2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dapat dilihat dari partisipasi peran aktif perempuan di semua bidang kehidupan yang dapat diukur diantaranya dari jumlah keanggotaan perempuan di DPRD, sebagaimana tabel berikut. Jumlah anggota DPRD yang berjenis kelamin perempuan pada tahun 2016 sebanyak 7 orang dari jumlah anggota DPRD (semua jenis kelamin) sebanyak 50 orang, sehingga rasio keterlibatan perempuan dalam DPRD adalah 14 %.

Tabel 2.35  
Jumlah Keanggotaan Perempuan di DPRD Tahun 2012 – 2016  
Kabupaten Demak

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah DPRD Perempuan	9	9	7	7	7
2.	Jumlah Anggota DPRD	49	49	50	50	50
3.	Rasio	18 %	18 %	14%	14 %	14 %

Sumber: DINSOSP2PA Kabupaten Demak Tahun 2017

Jumlah keanggotaan perempuan dalam DPRD di Kabupaten Demak dari tahun 2012 ke tahun 2016 tidak mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam parlemen masih kurang dan perlu lebih ditingkatkan.

Tabel 2.36  
Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak  
dari Tindakan Kekerasan Tahun 2012 – 2016  
Kabupaten Demak

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah KDRT	27	19	30	18	30
2.	Jumlah penyelesaian KDRT	27	19	30	18	30
3.	persentase penyelesaian KDRT	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4.	Jumlah kekerasan terhadap anak	48	50	55	59	58
5.	Jumlah penyelesaian kekerasan terhadap anak	48	50	55	59	58
6.	persentase penyelesaian kekerasan terhadap anak	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber: DINSOSP2PA Kabupaten Demak Tahun 2017

Salah satu upaya yang dilaksanakan dalam upaya perlindungan perempuan dan anak diantaranya melalui penyelesaian pengaduan terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dari Tahun 2012 sampai Tahun 2016 semua pengaduan dapat diselesaikan seluruhnya. Untuk jumlah kasus KDRT mengalami fluktuatif dari tahun 2012 sebanyak 27 kasus dan turun menjadi 19 kasus pada tahun 2013 dan naik kembali pada tahun 2013 sejumlah 30 kasus. Begitu juga dengan kasus Namun pada kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan mengalami kenaikan dari sebelumnya pada Tahun 2012 sebanyak 48 kasus meningkat menjadi 58 kasus di tahun 2018. Peningkatan ini karena keberhasilan sosialisasi tentang kesadaran hukum yang diterima baik oleh masyarakat, sehingga mereka melaporkan tindakan kekerasan yang dialaminya ke DINSOSP2PA untuk mendapat perlindungan dan penyelesaian lebih lanjut.

### 3. Pangan

Kabupaten Demak merupakan salah satu lumbung padi di Jawa Tengah. Luasnya lahan pertanian dan perkebunan di Kabupaten Demak menjadi salah satu faktor cukup besarnya komoditi/hasil pertanian di Kabupaten Demak. Untuk hasil perkebunan yang terdapat di Kabupaten Demak adalah kelapa, kapok randu, tembakau dan tebu. Sedangkan, untuk komoditi bahan makanan pokok terdapat padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar, dan shorgum dengan jumlah panen sebagai berikut.

Tabel 2.37  
Luas Panen, Produktivitas, Produksi Padi dan Palawija  
Di Kabupaten Demak Tahun 2016-2017

No	Komoditas	Luas Panen (Ha)		Produktivitas (Kw/Ha)		Total Produksi (Ton)	
		2016	2017	2016	2017	2016	2017
1	Padi	98.539	98.884	61,76	64,47	608.532	643.942
2	Jagung	22.211	26.288	75,13	77,74	166.876	204.372
3	Kedelai	70	99	25,29	24,57	177	243
4	Kacang Tanah	103	85	11,84	11,95	122	102
5	Kacang Hijau	19.118	25.977	13,36	14,12	25.540	36.683
6	Ubi Kayu	151	150	212,45	202,10	3.208	3.031
7	Ubi Jalar	98	55	169,18	149,35	1.658	821
8	Sorghum	74	72	50,34	67,08	372	483

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Demak Tahun 2017

Ketersediaan pangan di Kabupaten Demak mengalami surplus di beberapa komoditas yaitu padi sebesar 270.944 ton, jagung sebesar 180,944 ton, kacang hijau 33.890 ton, daging 8.204 ton, cabai merah 244 ton serta bawang merah 48.596 ton. Sedangkan untuk komoditas yang ketersediannya minus yaitu: kedelai, kacang tanah, ubi jalar, ubi kayu, telur, susu dan cabai rawit untuk memenuhi kebutuhan dalam daerah dikirim dari luar daerah. Data ketersediaan pangan di Kabupaten Demak Tahun 2016 dan 2017 sebagai berikut.

Tabel 2.38  
Data Ketersediaan Pangan di Kabupaten Demak  
Tahun 2016-2017

No	Komoditi	Penyediaan (ton)		Surplus/Minus (Ton)	
		2016	2017	2016	2017
1	Padi	287.948,00	379.253,50	180.742,00	270.944,00
2	Jagung	148.520,00	181.891,10	130.063,00	180.997,00
3	Kedelai	168,00	230,00	(21.922,00)	(11.060,00)
4	Kacang Tanah	106,00	88,20	(3.651,00)	(24,30)
5	Kacang Hijau	23.752,00	34.115,20	22.523,00	33.890,00
6	Ubi Kayu	3.076,00	2.905,80	(3.967,00)	(4.434,00)
7	Ubi Jalar	1.459,00	722,50	229,00	(407,00)
8	Daging	11.381,86	15.387,00	4.563,00	8.204,00
9	Telur	84,33	3.503,40	(7.182,00)	(4.222,00)
10	Susu	1,60	1,30	(7.488,00)	(2.438,00)
11	Cabai Merah	6.317,00	3.537,20	(11.122,00)	244,00
12	Cabai Rawit	635,70	572,70	(3.243,00)	(3.550,00)
13	Bawang Merah	59.905,30	51.753,30	55.926,00	48.596,00

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Demak Tahun 2017

Pada tahun 2017 Standar Nasional Angka Kecukupan Energy (AKE) yaitu 2.150,0 Kkal/kapita/hari. Jika dibandingkan dari AKE masyarakat Kabupaten Demak tahun 2017 adalah 1.713 Kkal/kapita/hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa Angka Kecukupan Gizi (AKG) dari sisi energi, konsumsi energi masyarakat di Kabupaten Demak masih dibawah standar nasional. Namun jika dilihat dari kualitas konsumsi, yaitu dari skor Pola Pangan Harapan (PPH), maka skor PPH Kabupaten Demak dari tahun 2013 s/d tahun 2017 mencapai 89%, namun jumlah ini tidak mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. yang mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan skor PPH pada tahun sebelumnya. Penurunan skor PPH tahun 2017 disebabkan karena adanya perubahan perhitungan standar angka kecukupan kalori/energy dari 2000 Kkal/Kapita/Hari menjadi 2.150 Kkal/Kapita/Hari, sehingga hasil perhitungan skor PPHnya turun.

Tabel 2.39  
Pola Konsumsi dan Tingkat Kecukupan Gizi Penduduk  
Tahun 2012 – 2017 Kabupaten Demak

No	Kelompok Pangan	Angka Kecukupan Energi/Standar Nasional (Kkal/kap/hr) 2016	Angka Kecukupan Energi Kab. Demak (Kkal/Kpt/hr)						Skor PPH maks (%)	Skor PPH Kabupaten Demak (%)					
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Padi-padian	1.075,0	1011,2	1.001,8	990,1	889,4	880,5	759,5	25,0	23,5	23,3	24,7	22,2	22,0	19,0
2	Umbi-umbian	129,0	69,0	65,0	51,0	105,0	104,5	86,3	2,50	1,6	1,5	1,3	2,5	2,5	2,2
3	Pangan Hewani	258,0	245,4	255,7	213,0	250,2	247,6	305,4	24,0	22,8	23,8	21,3	24,0	24,0	24,0
4	Minyak & Lemak	215,0	189,6	200,0	212,0	57,7	57,8	37,1	5,0	4,4	4,7	5,0	1,4	1,4	0,9
5	Buah/Biji berminyak	64,5	26,2	24,1	19,0	22,1	22,3	16,9	1,0	0,6	0,6	0,5	0,6	0,6	0,4
6	Kacang-kacangan	107,5	163,2	158,3	133,0	205,9	201,5	212,1	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
7	Gula	107,5	63,3	69,4	62,0	86,3	85,6	109,4	2,50	1,5	1,6	1,5	2,2	2,1	2,5
8	Sayur dan buah	129,0	108,2	106,3	106,0	114,0	111,5	161,8	30,0	25,2	24,7	26,4	28,5	27,9	30,0
9	Lain-lain	64,5	9,4	10,3	14,0	18,5	18,2	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	TOTAL	2.150,0	1.885,4	1.890,8	1.800,1	1.749,1	1.729,6	1.713,1	100,0	89,6	90,1	90,7	91,4	90,5	89,0

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Demak Tahun 2018

Angka Kecukupan Energi 2.150 Kkal/kapita/hari merupakan angka standar kebutuhan energi nasional bagi setiap individu agar mampu menjalankan aktifitas sehari – harinya. Adapun Angka Kecukupan Energi di Kabupaten Demak sebesar 1.713,1 Kkal/kapita/hari. Pola konsumsi masyarakat belum menerapkan diversifikasi makanan dalam mengkonsumsi bahan pangan. Kontribusi konsumsi terbesar masih didominasi oleh kelompok padi – padian terutama beras, dibandingkan kelompok pangan yang lain.

Kebijakan penanganan keamanan pangan diarahkan untuk menjamin tersedianya pangan segar yang aman untuk dikonsumsi agar masyarakat terhindar dari bahaya, baik karena cemaran kimia maupun mikroba yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi dan mendukung terjaminnya pertumbuhan/perkembangan kesehatan dan kecerdasan manusia.

#### 4. Pertanahan

Urusan Pertanahan dilaksanakan dalam Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan pemanfaatan tanah serta Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan. Capaian yang dihasilkan dari kegiatan tersebut yaitu: Persetifikatan tanah Pemkab telah terbit 51 Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemkab Demak dan 17 peta bidang tanah milik Pemkab Demak dan Pembakuan nama Rupabumi Unsur Alami di Wilayah Kab. Demak telah terlaksananya rakor pemutakhiran Rupabumi dan Sejarah Pengertian Nama Rupabumi Unsur Alami. Untuk Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan dilaksanakan dengan terlaksananya papanisasi tanah milik Pemkab dan tercapainya tertib administrasi tukar menukar tanah desa. Dengan hasil terpasangnya 7 papan (penanda tanah milik Pemkab Demak), dan terpasangnya 50 patok beton (penanda tanah milik Pemkab Demak). Untuk kegiatan tukar menukar tanah kas desa hasilnya yaitu dengan dikeluarkannya 1 ijin penataan tanah kas desa (Desa Gebang Kec. Bonang, serta 3 proses kajian tim pertimbangan terhadap permohonan tukar menukar tanah kas desa (Desa Tugu Kecamatan Sayung , Desa Mlaten Kec. Gajah dan Desa Kedungwaru Kidul)

#### 5. Lingkungan Hidup

Urusan Lingkungan Hidup diupayakan dengan melaksanakan Program Pengendalian Pencemaran dan Persakan Lingkungan, Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, Program pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan, dan Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH. Data upaya pelayanan sarana dan prasarana urusan lingkungan hidup dari tahun 2012 - 2016 tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.40  
Kinerja Indikator Lingkungan Hidup Tahun 2012-2016  
Kabupaten Demak

No	Jenis Informasi	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Sarana dan Prasarana Persampahan						
	- Dumptruck	Unit	3	3	3	3	3
	- Truck arm roll	Unit	5	5	10	10	10
	- Container	Unit	21	21	21	29	29
	- Excavator	Unit			1	2	2
	- Becak sampah	Unit					
	- Becak motor sampah	Unit	4	4	9	9	9
	- TPA	Lokasi	2	2	2	2	2
2	Jumlah tenaga outsourcing kebersihan	Orang					

Sumber: Dinas Lingkungagn Hidup Kab. Demak Tahun 2017

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pelayanan dari aspek lingkungan hidup dapat dilihat dari pelayanan persampahan perkotaan dan sarana prasarana persampahan yang dimiliki oleh Kabupaten Demak.

Kinerja urusan lingkungan hidup dapat dilihat dari indikator presentase penanganan sampah, Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk dan Penegakan Hukum Lingkungan sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 2.41  
Persentase Penanganan Sampah Tahun 2012 - 2016  
Kabupaten Demak

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Volume sampah yang ditangani (m3/hari)	19.277,55	18.182,25	19.811,25	20.494,35	27.586,80
2.	Volume produksi sampah (m3/hari)	42.839	40.405	44.025	45.543	61.304

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Demak Tahun 2017

Penanganan sampah dalam kurun waktu 5 tahun (2012-2016) mengalami kecenderungan naik. Hanya terjadi sedikit penurunan pada tahun 2012. Untuk tahun 2016 penanganan sampah yang terangkut ke TPA naik menjadi 27.586,8 m3.

#### 6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Berdasarkan Peraturan presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional, maka dalam rangka mendukung terwujudnya database kependudukan yang akurat secara nasional, pemerintah Kabupaten Demak berkewajiban memberikan pelayanan administrasi kependudukan. Pada tahun 2014 melalui program nasional tentang pelaksanaan KTP elektronik, masa berlaku KTP non elektronik dan pencetakan berakhir pada 31 Desember 2014. Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya. Berdasarkan UU no 24 tahun 2013. Perubahan atas UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Perkembangan pelayanan KTP Elektronik mengalami fluktuasi dikarenakan sangat bergantung pada ketersediaan Blangko KTP Elektronik yang disediakan oleh Pemerintah Pusat. Menghadapi hal tersebut, sambil menunggu ketersediaan blanko oleh Pemerintah Pusat, sebagaimana arahan Pemerintah Pusat dilaksanakan kebijakan untuk mengeluarkan surat keterangan sebagai pengganti sementara KTP. Data pelayanan urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 2.42  
Jumlah Penduduk yang Memiliki KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Akta Nikah dan Akta Perceraian di Kabupaten Demak Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Penduduk menurut jenis kelamin	1.098.132	1.099.436	1.100.461	1.113.014	1.118.014
	a. Laki-laki	551.968	555.990	555.725	563.656	566.155
	b. Perempuan	543.858	545.446	544.736	549.358	552.491
2	Penduduk berdasarkan status perkawinan					
	a. Belum kawin	472.197	460.462	462.917	473.911	472.523
	b. kawin	571.029	575.925	294.628	583.276	590.142
	c. cerai hidup	10.981	14.228	14.084	13.483	14.161
	d. cerai mati	43.925	44.524	44.134	42.344	41.780
3	Jumlah Penduduk wajib KTP	823.599	830.715	822.858	825.048	833.333
4	Jumlah penduduk telah memiliki akta kelahiran (usia 0 -18 tahun)	272.470	282.016	291.273	300.429	301.787
5	Jumlah penduduk belum memiliki akta kelahiran (usia 0 -18 tahun)	77.475	67.098	58.174	50.651	41.587
6	Jumlah penduduk memiliki Kartu Keluarga	340.421	351.202	360.316	345.490	346.527
7	Jumlah Penduduk memiliki Akta Nikah (non muslim)	29	34	41	35	28
8	Jumlah Penduduk memiliki Akta Perceraian (non muslim)	3	2	8	5	9

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Demak Tahun 2018*

Kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus dalam rangka pelaksanaan e-KTP adalah menjamin ketersediaan sarana pendukung di setiap tempat pelayanan KTP elektronik, mempersiapkan tenaga teknis, serta menjaga akurasi database kependudukan melalui pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Jumlah penduduk wajib KTP di Kabupaten Demak pada tahun 2017 sebesar 833.333 dan jumlah penduduk belum memiliki akta kelahiran sebesar 41.587 jiwa.

#### 7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat dan desa adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan yang meliputi aspek ekonomi, sosial dan budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintah desa dan kelurahan, lembaga pemberdayaan masyarakat dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dan desa dilakukan dengan melibatkan kader pemberdayaan masyarakat dan lembaga pemberdayaan masyarakat desa. Perkembangan jumlah lembaga

dan kader pemberdayaan masyarakat sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.43  
Perkembangan Upaya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Tahun 2013–2017 Kabupaten Demak

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Unit Pengelola Kegiatan (PNPM Perdesaan)	14	14	14	14	14
2	Jumlah Posyandu Aktif	1.228	1.234	1.236	1.239	1.313
3	Jumlah PKK Aktif	249	249	249	249	249
4	Jumlah Pasar Desa	0	10	10	15	19
5	Jumlah BKM (PNPM Perkotaan)	25	25	25	25	25

Sumber: Dinpermasdes P2KB Kabupaten Demak Tahun 2018

Dari tabel diatas, perkembangan jumlah lembaga dan Kader Pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Demak yang terdiri dari UPK (PNPM Mandiri Perdesaan), BKM (PNPM Mandiri Perkotaan), Posyandu Aktif, PKK dan Pasar Desa serta cenderung stagnan/tidak mengalami kenaikan maupun penurunan.

#### 8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai peran penting untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk, melalui kegiatan antara lain: penyiapan dukungan kelembagaan yang efektif, optimalisasi pendayagunaan tenaga program Keluarga Berencana, penyediaan sarana prasarana, serta manajemen dan pembiayaan. Rasio akseptor Keluarga Berencana dari Tahun 2013 sampai Tahun 2017 relatif dinamis. Setelah sempat mengalami penurunan pada tahun 2016 kemarin dan naik kembali pada tahun 2017.

Tabel 2.44  
Rasio Akseptor KB Tahun 2012 – 2016  
Kabupaten Demak

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah akseptor KB	210.797	215.435	221.263	214.596	153.975
2.	Jumlah Pasangan Usia Subur	277.424	278.786	269.518	266.328	209.843
3.	Rasio akseptor KB	75,98%	77,28	82,10	80,58	73,37
4.	Jumlah PUS yang istrinya di bawah usia 20 tahun	17.901	19.623	18.165	11.919	12.150
5.	Cakupan PUS yang istrinya di bawah usia 20 tahun	6,45%	7,03%	6,73	4,47	5,79

Sumber: Dinpermasdes P2KB Kabupaten Demak Tahun 2018

Dari data tabel di atas diketahui bahwa rasio akseptor Keluarga Berencana (KB) Tahun 2013-2017 mengalami penurunan, dari 80,58% pada tahun 2016 menjadi 73,37% pada tahun 2017. Hal ini terjadi karena Pasangan Usia Subur (PUS) belum terlayani KB atau *unmeet need*, dimana perempuan yang telah menikah dalam usia subur tidak menginginkan kehadiran anak atau menunda kehadiran anak namun tidak menggunakan alat kontrasepsi.

Tabel 2.45  
Metode Kontrasepsi KB Tahun 2013 – 2017  
Kabupaten Demak

No	Metode KB	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Suntik	147.111	149.851	153.558	148.463	118.843
2.	Pil	22.029	21.235	21.867	18.838	11.123
3.	Kondom	3.786	4.191	4.729	4.144	1.014
4.	AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim)	9.362	9.886	9.934	10.312	5.446
5.	Implan/Susuk	19.836	21.235	21.870	23.236	11.899
6.	MOW (Medis Operasi Wanita)	7.586	8.144	8.320	8.823	5.190
7.	MOP (Medis Operasi Pria)	1.087	1.045	985	780	360

Sumber: Dinpermasdes P2KB Kabupaten Demak Tahun 2018

terlihat metode kontrasepsi yang banyak digunakan oleh peserta KB Baru adalah Non Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (Non MKJP), yaitu metode suntik dan pil, sedangkan untuk metode MKJP yang banyak dipakai adalah Alat Implan/Susuk dan AKDR/Spiral.

Adapun perkembangan keluarga pra sejahtera ke keluarga sejahtera I dari Tahun 2012 – 2016 cenderung dinamis, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.46  
Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I  
Tahun 2013 – 2017 Kabupaten Demak

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah keluarga prasejahtera	128.604	127.691	127.691	135.046	83.590
2.	Jumlah keluarga sejahtera I	81.847	82.897	82.897	82.897	138.257
3.	Jumlah KK	351.000	355.791	344.959	349.968	319.682
4.	persentasekeluarga prasejahtera	36,64%	35,88%	37,01%	38,58%	26,15%
5.	persentasekeluarga sejahtera I	23,31%	23,29%	23,29%	23,29%	43,25%

Sumber: Dinpermasdes P2KB Kabupaten Demak Tahun 2018

Jumlah keluarga pra sejahtera pada Tahun 2013 sebesar 128.604 KK dan dari tahun ke tahun mengalami penurunan menjadi 127.691 KK pada tahun 2015 dan naik kembali menjadi 135.046 KK pada tahun 2016. Namun, turun kembali pada tahun 2017 sebesar 83.590 KK. Adapun jumlah Keluarga Sejahtera I cenderung mengalami kenaikan dari 82.897 KK pada tahun 2016 dan menjadi 138.257 KK pada tahun 2017.

Lonjakan drastis persentase keluarga sejahtera I ini dipicu oleh perbedaan definisi output tahapan keluarga sejahtera hasil Pendataan Keluarga (PK) 2015 yang diselenggarakan secara terpusat oleh BKKBN. Dalam PK 2015 output tahapan keluarga sejahtera hanya terbagi menjadi tiga (3) tahapan yaitu Keluarga Prasejahtera, Keluarga Sejahtera I, dan Keluarga Sejahtera II. Berbeda dengan PK tahun-tahun sebelumnya dimana tahapan keluarga sejahtera terbagi menjadi lima (5) tahapan.

Pada PK 2015 secara definisi Keluarga Prasejahtera mewakili gambaran keluarga secara ekonomi menengah ke bawah, Keluarga Sejahtera I mewakili keluarga menengah dan Keluarga Sejahtera II mewakili keluarga dengan ekonomi menengah ke atas.

## 9. Perhubungan

Pelayanan urusan perhubungan dapat dilihat dari keberadaan terminal dan jumlah kendaraan yang transit sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.47  
Sarana dan Prasarana Perhubungan Tahun 2012-2016  
Kabupaten Demak

No	Sarana Prasarana	Satuan	Jumlah (buah)					
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Alat Uji Kendaraan	Unit	1	1	1	1	1	1
2	Traffic Light	Simpang	1			1	1	
3	Warning Light	Unit	4	5	4	4	1	4
4	Rambu-rambu lalu lintas	Buah	196	389	552	349	234	131
5	Marka	M2	1923.5	2500	3955	2186	3366	1595
6	Guardrail	M'					40	144

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Demak Tahun 2018

Dalam upaya mendukung pelayanan prima kepada pengguna jasa perhubungan serta kebijakan preventif dan represif guna mewujudkan ketertiban, kelancaran, keamanan dan keselamatan lalu lintas, maka penyediaan sarana dan prasarana menjadi prioritas untuk mewujudkan sistem transportasi yang efektif, efisien, ramah lingkungan, dan dapat

menjangkau ke seluruh wilayah serta menghubungkan antar dan inter moda angkutan.

Terkait dengan hal tersebut, perlu diadakan pengendalian lalu lintas dalam bentuk penyediaan perlengkapan lalu lintas guna ketertiban, kelancaran dan keamanan lalu lintas di jalan raya. Hal tersebut dapat terlihat dari masih sedikitnya sarana prasarana lalu lintas seperti traffic light, alat uji kendaraan dan guardrail.

#### 10. Komunikasi dan Informatika

Kinerja urusan komunikasi dan informatika dapat dilihat dalam indikator rasio wartel/warnet terhadap penduduk, jumlah penyiaran radio/TV lokal, website milik pemerintah daerah dan pameran/expo. Rasio wartel/warnet sebanyak 0,11777. Selengkapnya dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.48  
Rasio Wartel/Warnet per 1000 Penduduk Tahun 2012 – 2016  
Kabupaten Demak

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah wartel/warnet	136	154	149	142	133
2	Jumlah penduduk	1,082,472	1,094,472	1,106,328	1,117,901	1,129,298
3	Rasio wartel/warnet	0.12564	0.14071	0.13468	0.12702	0.11777

Sumber: Dinkominfo Kabupaten Demak Tahun 2017

Jumlah warnet/ wartel di Kabupaten Demak pada tahun 2016 sebanyak 133 unit yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Penurunan jumlah wartel/warnet merupakan dampak dari berkembangnya teknologi informasi yang sangat cepat, maraknya peningkatan pengguna *gadget* di masyarakat yang didukung dengan kemudahan akses baik secara online maupun mendapatkan paket data yang semakin terjangkau.

Tabel 2.49  
Persentase Satuan Kerja dan Perangkat Daerah yang Memiliki Website Tahun 2012-2016 Kabupaten Demak

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah OPD	46	46	46	46	46
2	Jumlah OPD Memiliki Website	-	-	2	9	13
3	%tase			0,43	19,5	28,26

Sumber: Dinkominfo Kabupaten Demak Tahun 2017

Adapun *website* milik pemerintah daerah telah ada sejak tahun 2014. Sedangkan persentase Satuan Kerja dan Perangkat Daerah di Kabupaten Kudus yang memiliki *website* Tahun 2016

sebesar 28,26%. Di era teknologi canggih seperti ini, jumlah SKPD yang memiliki website ada sebanyak 13 OPD dari total 46 OPD.

Ketersediaan sarana komunikasi dan informasi dengan biaya yang makin terjangkau akhirnya menciptakan makin terjangkaunya biaya komunikasi dan informasi memudahkan masyarakat untuk cepat dalam menerima segala informasi yang dibutuhkan.

Tabel 2.50  
Perkembangan Jumlah Menara Telekomunikasi Bersama  
Tahun 2012 – 2016 Kabupaten Kudus

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Menara Telekomunikasi Bersama	118	130	162	171	176

Sumber: Dinkominfo Kabupaten Demak Tahun 2017

Jumlah menara telekomunikasi bersama pada tahun 2016 mencapai 176 unit, dimana mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya 171 unit. Pada tahun 2012 menara telekomunikasi bersama di Kabupaten Demak mencapai 118 unit.

Dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi daerah dan memperkuat basis produksi masyarakat, perlu ditopang dengan sarana produksi, teknologi dan inovasi yang handal. Untuk hal tersebut, diperlukan upaya pengembangan dan penerapan Iptek dan Inovasi Daerah, serta peningkatan kreativitas dan inovasi masyarakat berupa teknologi dan inovasi yang bermanfaat dan mudah diterapkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu implementasi penerapan iptek dan inovasi daerah di Kabupaten Demak adalah:

- Demak Smart City merupakan bentuk pelayanan public yang mempermudah masyarakat dalam mengakses data apapun berkaitan dengan pelayanan public dan mengetahui program pemerintah Kabupaten Demak secara mudah dan cepat;
- Penerapan e-Planning e-Budgeting dimana perencanaan dan penganggaran terintegrasi dalam satu system;
- Aplikasi perijinan online untuk mewujudkan pelayanan public di bidang perijinan dan penanaman modal yang semakin berkualitas, murah, cepat, tepat dan pasti dengan menempatkan kepuasan masyarakat.

#### 11. Kepemudaan dan Olahraga

Dalam penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga diprioritaskan pada peningkatan pengembangan prestasi

pemuda dan olahraga serta peningkatan pemerataan pelayanan pendidikan non formal.

Prestasi yang diraih baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional cukup menggembirakan. Namun demikian pembibitan dan pembinaan perlu terus dilakukan guna mendukung capaian prestasi olahraga di Kabupaten Demak.

Tabel 2.51  
Capaian Urusan Bidang Pemuda dan Organisasi Olahraga  
Tahun 2015– 2017 Kabupaten Demak

No	U r a i a n	2015	2016	2017
1.	Jumlah organisasi pemuda	25	28	28
2.	Jumlah kegiatan kepemudaan	20	21	6
3.	Jumlah pemuda yang mampu berwirausaha	10	15	17
4.	Jumlah organisasi olahraga	93	95	95
5.	Jumlah gedung olahraga	1	1	1
6.	Rasio lapangan olah raga	1	1	4

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Demak Tahun 2018

Dari tabel diatas, terlihat bahwa organisasi pemuda pada tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi 28 organisasi dibanding pada tahun 2015. Sedangkan pada tahun 2017 mengalami stagnan atau tetap menjadi 28. Untuk jumlah organisasi olahraga mengalami kenaikan pada tahun 2016, yang tadinya berjumlah 93 pada tahun 2015 menjadi 95, sedangkan pada tahun 2017 tetap yaitu sejumlah 27. Untuk gedung olahraga pada tahun 2016 masih sama jumlahnya dari tahun 2015 yaitu 1 gedung. Sedangkan pada tahun 2017 tetap.

## 12. Statistik

Urusan Statistik dilaksanakan guna menyediakan publikasi data dan informasi statistik yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah sebagai wujud peningkatan pelayanan statistik daerah. Kebutuhan akan data statistik senantiasa di-*update* setiap tahunnya, guna memenuhi informasi statistik yang lebih transparan dan murah, data-data ini telah dipublikasikan melalui web Kabupaten Demak ([www.demakkab.go.id](http://www.demakkab.go.id)). Adapun penyusunan data statistik Kabupaten Demak meliputi Data dan Statistik, Sekilas Statistik Kabupaten Demak, PDRB serta buku Analisis Situasi Pembangunan Manusia.

## 13. Persandian

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

maka urusan persandian memegang peranan yang penting dalam upaya pengamanan informasi. Meskipun era keterbukaan informasi berjalan, ada unsur-unsur pemerintahan terkait jenis informasi rahasia, pengembangan kapasitas SDM persandian yang telah berjalan, namun belum bisa dijabarkan. Selama ini pelaksanaan baru pada kirim terima berita rahasia.

#### 14. Kebudayaan

Pelaksanaan urusan kebudayaan ditujukan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang religius dan berbudaya serta memiliki kompetensi dan daya saing global. Untuk mencapai hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Demak melaksanakan kegiatan berdasar pada indikator dari kinerja pelayanan kebudayaan yang meliputi:

1. Penyelenggaraan festival seni dan budaya;
2. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya;
3. persentasebenda, situs dan kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan;
4. Jumlah benda, situs dan kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan;
5. Total benda, situs dan kawasan Cagar Budaya yang dimiliki.

Pada tahun 2016, telah dicapai penyelenggaraan seni dan budaya sebanyak 8 kali, jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya sebanyak 6 buah, persentase benda, situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan sebesar 154% dengan jumlah benda, situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan dan dimiliki sebanyak 85 buah, melalui pelaksanaan Program Pengembangan Nilai Budaya, Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, Program Pengelolaan Keragaman Budaya dan Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya. Sedangkan kinerja pelayanan Kebudayaan dari Tahun 2012 – 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.51  
Kinerja Pelayanan Kebudayaan Tahun 2015 – 2017  
Kabupaten Demak

No	Indikator	2015	2016	2017
1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	8 kali	8 kali	8 kali
2.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	5 bh	6 bh	6 kali
3.	persentasebenda, situs dan kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	154	154	154

No	Indikator	2015	2016	2017
4.	Jumlah benda, situs dan kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	154 bh	154 bh	154 bh
5.	Total benda, situs dan kawasan Cagar Budaya yang dimiliki	85 bh	85 bh	85 bh

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun 2017

Dari tabel di atas, terlihat bahwa penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Demak pada tahun 2017 terjadi 8 kali dengan sarana penyelenggaraan seni dan budaya sebanyak 6 buah. Jumlah benda, situs dan kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan ada sebanyak 154 buah pada tahun 2017.

### 15. Perpustakaan

Dalam upaya meningkatkan mutu kehidupan masyarakat dan sebagai penunjang kelangsungan pendidikan serta untuk meningkatkan budaya baca masyarakat, peran perpustakaan umum sangat diperlukan dalam memberikan pelayanan dan penyediaan bahan bacaan bagi masyarakat. Perpustakaan merupakan media untuk mendukung pendidikan masyarakat yang merupakan bagian *integral* dari kegiatan pembangunan nasional. Fungsi utama dari perpustakaan adalah sebagai lembaga layanan bahan pustaka dan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pendidikan, informasi dan rekreasi. Perkembangan kinerja urusan perpustakaan dapat dilihat pada Tabel 2.65 sampai dengan 2.67 berikut ini.

Tabel 2.52

Capaian Indikator Bidang Perpustakaan Tahun 2015 – 2017  
Kabupaten Demak

No	Uraian	2015	2016	2017
1.	Persentase kunjungan perpustakaan	5,31	5,31	9,13
2.	Persentase Peningkatan perpustakaan desa dan masyarakat	7,14	7,91	13,64
3.	Persentase Peningkatan koleksi buku	11,46	12,1	8,84

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Demak Tahun 2017

Berdasarkan Tabel diatas terlihat bahwa pada tahun 2017 persentase kunjungan mengalami kenaikan yang pada tahun 2015 sebesar 5,31 menjadi 9,31 pada tahun 2017. Untuk persentase Peningkatan perpustakaan desa dan masyarakat mengalami kenaikan yang pada tahun 2015 sebesar 7,14 menjadi 13,64 pada tahun 2017. Untuk persentase Peningkatan koleksi buku relatif mengalami penurunan yang pada tahun 2015 sebesar 11,46 menjadi 8,84 pada tahun 2017.

## 16. Kearsipan

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, tertib pengarsipan menjadi suatu keharusan, bermanfaat sebagai bukti kegiatan dan merupakan wujud dilaksanakannya akuntabilitas instansi/lembaga, arsip sebagai salah satu sumber data yang sangat penting. Arsip sebagai data terekam dalam bentuk apapun media perekamnya, adalah sumber data yang diakui legalitasnya karena orisinalitas dan otentitas arsip dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai tulang punggung manajemen pemerintahan dalam pembangunan.

Tabel 2.53  
Indikator Kearsipan Tahun 2015 – 2017  
Kabupaten Demak

No	Indikator	2015	2016	2017
1.	Persentase perangkat daerah yang menerapkan arsip secara baku (%)		8,75	9,09
2.	Persentase SDM perangkat daerah yang memiliki pengetahuan bidang kearsipan		26,32	27,74
3.	Persentase arsip yang terduplikasi		10	62,4

Sumber : Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kab. Demak Tahun 2017

### 2.1.3.3 Fokus Layanan Pilihan

#### 1. Kelautan dan Perikanan

Layanan Urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Demak dilaksanakan dengan pembinaan dan pengembangan perikanan, melalui peningkatan kualitas SDM dan sarana prasarana perikanan, baik budidaya, tangkap maupun Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP). Pengembangan budidaya perikanan darat (air tawar) diarahkan pada pengembangan komoditas lele, nila, gurami, karper, bandeng polikultur dan udang vaname. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk meningkatkan produksi ikan, antara lain dengan optimalisasi lahan yang kurang produktif, memberdayakan Balai Benih Ikan (BBI) dan Unit Perbenihan Rakyat (UPR) melalui pembangunan kolam/bak UPR, peralatan dan induk unggul yang bersertifikat untuk mencukupi kebutuhan benih ikan di Kabupaten Demak. Selain itu juga dikembangkan budidaya ikan (pembesaran) melalui kolam terpal, kolam permanen, tambak, dan mina padi. Secara keseluruhan, dalam periode 2012-2016 produksi usaha perikanan di Kabupaten Demak mengalami perkembangan yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 2.53  
Produksi Perikanan Tahun 2012 – 2016  
Kabupaten Demak

No.	Jenis Usaha	Produksi (ton)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Budidaya air tawar	25.726,519	28.080,940	30.372,348	30.372,348	33.246,950
2.	Perairan Umum	1.399,500	1.556,989	5.808,575	1.293,360	1.799,500
3.	Pengolahan Ikan	13.647,90	11.607,50	11.948,30	12.150,00	12.150,03

*Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Demak Tahun 2017*

Berdasarkan Tabel diatas di atas, produksi perikanan budidaya mencapai 33.246.950 ton pada tahun 2016, meningkat sebesar 2.874.602 ton dibandingkan produksi budidaya pada tahun 2015 sebanyak 30.372,348 ton. Jenis ikan budidaya air tawar meliputi ikan lele dan jenis ikan bersisik (nila, gurami, karper dan bandeng) yang banyak diusahakan oleh Kelompok Pembudidaya Ikan, baik di kolam tanah, kolam terpal, kolam permanen, maupun tambak. Produksi perikanan perairan umum relatif besar, sebesar 1.799,500 ton pada tahun 2016.

Selain usaha budidaya, juga ada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, dengan produk olahan seperti pengasapan ikan di Desa Wonosari Kecamatan Bonang. Usaha pengolahan ikan yang ada saat ini sebagian besar masih bersifat tradisional dengan skala produksi yang masih kecil. Berbagai upaya sudah dilakukan guna persiapan MEA 2016. Dimana produk olahan ikan harus memenuhi Sertifikasi Kelayakan Produk (SKP) untuk dapat bersaing di pasar bebas. SKP menitikberatkan pada cara pengolahan yang baik (*Good Manufacturing Procces/GMP*), sehingga dihasilkan produk yang aman, layak dikonsumsi, higienis, tanpa meninggalkan limbah (*zero waste*).

## 2. Pariwisata

Pariwisata mempunyai peran penting dalam Pembangunan Daerah, karena sektor Pariwisata berperan penting dalam mengatasi kemiskinan dan pengangguran sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, bahwa Pariwisata bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan program Pemerintah Kabupaten Kudus yang memiliki visi "*Terwujudnya Masyarakat Demak Yang Agamis, lebih Sejahtera, Mandiri, Maju, Kompetitif, Kondusif, Berkepribadian dan Demokrastis*". Untuk itu pariwisata melaksanakan pemberdayaan masyarakat/rakyat untuk

menggerakkan potensi desa dengan program pengembangan destinasi pariwisata.

Kegiatan pariwisata yang dapat dinikmati oleh masyarakat di obyek daerah tujuan wisata, yang dikunjungi wisatawan antara lain: jasa transportasi, jasa atraksi wisata, jasa penginapan, kuliner, dan souvenir. hal ini menunjukkan bahwa manfaat pariwisata menimbulkan efek pemberdayaan masyarakat melalui transaksi ekonomi. Kabupaten Demak memiliki potensi obyek wisata cukup besar yang mempunyai daya tarik wisata untuk dikunjungi oleh wisatawan. Di Kabupaten Demak terdapat wisata alam, wisata buatan dan wisata religi. Wisata religi dengan tujuan makam Sunan Kalijaga dan masjid Agung Demak. Wisata Pantai Morosari di Sayung, Pantai Morodemak, Pantai Istanbul di Tambakbulusan, Wisata Mangrov di Kedungmutih dan Taman Ria beberapa wisata budaya di daerah tertentu dan pada waktu tertentu. Tabel berikut ini menginformasikan perkembangan jumlah wisatawan pada berbagai obyek wisata.

Pelaksanaan urusan Pariwisata ditujukan untuk mencapai kinerja pelayanan pariwisata, yang dapat ditunjukkan melalui indikator jumlah wisatawan mancanegara, jumlah wisatawan nusantara, lama tinggal dan potensi wisata. Sedangkan kinerja pelayanan Pariwisata dari Tahun 2012 – 2016 dapat dilihat pada tabel 2.70.

Tabel 2.54  
Kinerja Pelayanan Pariwisata Tahun 2013 – 2017  
Kabupaten Demak

NO	INDIKATOR	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah wisatawan mancanegara	768	674	467	571	805
2.	Jumlah wisatawan Nusantara	1,232,799	1,521,822	1,425,520	1,522,874	1,675,765
3.	Lama tinggal	½ jam	1 jam	1 jam	1-1/2 jam	1-1/2 jam
4.	Potensi wisata	5	5	5	5	6

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Demak Tahun 2017

Pada tahun 2017, jumlah wisatawan mancanegara mencapai 805 orang, jumlah wisatawan Nusantara mencapai 1.675.765 orang dengan lama tinggalnya 1 – ½ jam serta jumlah potensi wisatanya menjadi 6 lokasi, meliputi wisata alam dan buatan. Pencapaian pelayanan tersebut dilaksanakan melalui Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Program Pengembangan Kemitraan.

Potensi wisata yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Demak sebanyak 6 lokasi, dengan perkembangan kunjungan wisata pada tahun 2013 – 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.55  
Perkembangan Kunjungan Wisata Tahun 2013 – 2017  
Kabupaten Demak

NO	OBYEK WISATA	Pengunjung (orang)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Masjid Agung Demak	612.930	600.751	534.092	591.740	662.570
2.	Makam Sunan Kalijaga	845.005	859.885	815.423	868.930	949.135
3.	Pantai Morosari	50.539	31.161	47.070	30.999	23.761
4.	Taman Ria	50.539	31.161	47.070	28.511	37.053
5.	Pantai Morodemak	2.700	3.060	3.621	3.265	4.061

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Demak Tahun 2017

Dari Tabel 2.71 dapat dilihat, bahwa obyek wisata Makam Sunan Kalijaga menempati posisi teratas berdasarkan jumlah pengunjung dari tahun 2013 sampai dengan 2017 yaitu sejumlah 949.135 orang, Makam Sunan Kalijaga dan Masjid Agung Demak merupakan salah satu unggulan obyek wisata Kabupaten Demak dan menempati urutan kedua di Jawa Tengah dalam jumlah kunjungan wisata.

### 3. Pertanian

Layanan pilihan urusan Pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan dan peternakan. Layanan urusan pertanian dilaksanakan melalui pengelolaan lahan dan air yang diarahkan untuk mendukung peningkatan dan pengembangan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

Tabel 2.56  
Luas Tanam, Luas Panen, Produksi Padi Tahun 2013 – 2017  
Kabupaten Demak

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Luas tanam padi (Ha)	100.836	96.664	99.006	100.645	100.203
2.	Luas panen padi (Ha)	100.610	96.675	98.618	98.538	99.884
3.	Produksi padi (Ton GKG)	586.079	567.745	653.547	608.532	643.942

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Demak Tahun 2017

Dari tabel di atas, diketahui bahwa luas tanam padi di Kabupaten Demak pada tahun 2017 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 2015 seluas 100.645 Ha menjadi 100.203 Ha. Untuk luas panen padi juga mengalami kenaikan pada tahun 2017 seluas 99.884 Ha. Produksi padi pada tahun 2017

mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar 608.532 ton menjadi 643.942 ton pada tahun 2017.

Tabel 2.57  
Luas Tanam, Luas Panen, Produksi Jagung Tahun 2013 – 2016  
Kabupaten Demak

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Luas tanam jagung (Ha)	22.603	27.467	21.065	24.091	26.003
2.	Luas panen jagung (Ha)	21.615	26.082	21.065	22.211	26.226
3.	Produksi jagung (Ton)	164.932	192.153	167.700	166.876	198.268

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak Tahun 2017

Luas tanam jagung di Kabupaten Demak pada tahun 2017 sebesar 26.003 Ha dengan luas panen sebanyak 26.226 Ha dan tingkat produksi jagung pada tahun 2016 sebesar 27.661 ton. Jumlah produksi jagung di Kabupaten Demak mengalami peningkatan dari tahun 2016 yang hanya produksi jagung sebanyak 166.8760 ton menjadi 198.268 di tahun 2017.

Tabel 2.58  
Luas Tanam, Luas Panen, Produksi Kedelai Tahun 2013 – 2017  
Kabupaten Demak

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Luas tanam kedelai (Ha)	959	243	127	46	297
2.	Luas panen kedelai (Ha)	2.921	411	122	70	99
3.	Produksi kedelai (Ton)	6.613	1.027	314	177	243

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak Tahun 2017

Untuk komoditas kedelai tahun 2017 angka capaian luas tanam, panen dan produksi mengalami kenaikan jika dibandingkan angka capaian di Tahun 2016. Perkembangan luas tanam dan produksi tebu tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.59  
Luas Tanam dan Produksi Tebu Tahun 2013 – 2017  
Kabupaten Demak

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Luas tanam gula putih (Ha)	42,10	39,78	11,62	4,27	4,27
2.	Luas tanam gula merah (Ha)	-	-	27,38	32,73	32,73
3.	Produksi gula putih (Ton)	193,20	159,38	25,82	13,52	13,52
4.	Produksi gula merah (Ton)	-	-	188,92	206,20	206,20

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak Tahun 2017

Pada tahun 2017 luas tanam gula putih sebesar 4,27 Ha dan luas tanam gula merah sebesar 32,73 Ha. Produksi gula putih tahun 2017 sebesar 13,52 ton dan untuk produksi gula merah sebesar 206,20 ton. Luas tanam maupun produksi gula

putih dan gula merah, pada tahun 2017 mengalami stagnan/tetap. Hal ini antara lain disebabkan karena diganti dengan tanaman lain, yaitu ketela pohon dan kencur, sehingga mempengaruhi produktivitas.

Peternakan yang berkembang di Kabupaten Demak adalah ternak besar (sapi dan kerbau) dan ternak kecil (kambing) dan unggas. Produksi ternak mengalami peningkatan terutama ternak unggas sebagaimana tercantum pada Tabel 2.76.

Tabel 2.60  
Jumlah Ternak Tahun 2013 – 2017  
Kabupaten Demak

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Sapi (ekor)	3.680	4.070	4.841	4.982	2.017
2.	Kerbau (ekor)	2.787	3.004	3.065	3.122	5.632
3.	Kambing (ekor)	44.907	45.938	46.022	48.026	3.002
4.	Ayam buras (ekor)	563.384	570.040	562.015	586.712	583.998

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak Tahun 2017

Dari tabel 2.76 diatas dapat dilihat bahwa terdapat penurunan populasi ternak sapi pada tahun 2016 sebanyak 4.982 ekor menjadi 2.017 ekor pada tahun 2017. Untuk ternak kerbau pada tahun 2017 sebanyak 5.632 ekor, ternak kambing sebanyak 3.002 ekor dan ternak ayam buras paling banyak yaitu 583.998 ekor.

#### 4. Perdagangan

Urusan Perdagangan diprioritaskan pada peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri melalui pengembangan pasar dan distribusi barang/produk serta meningkatkan promosi dan kerja sama pemasaran. Secara ringkas capaian urusan perdagangan Kabupaten Demak pada tahun 2015 – 2017 terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.61  
Capaian Indikator bidang Perdagangan Tahun 2015 – 2017

No	Uraian	2015	2016	2017
1	Prosentase UTTP yang di tera	9,000	10,000	400
2	Jumlah temuan barang yang tidak memenuhi standar yang berlaku	0	1	3
3	Prosentase produk unggulan yang di terima di pasar internasional	17	17	17
4	Jumlah nilai bersih ekspor perdagangan	15,175,038	15,933,790	26,450,750.85

No	Uraian	2015	2016	2017
5	Kontribusi perdagangan dalam PDRB	15.17	15.20	15.65
6	Prosentase Peningkatan Retribusi Pasar	88.8	100	98.79
7	Prosentase pertumbuhan pusat perbelanjaan dan toko swalayan	0	0	27.18
8	Prosentase sarana distribusi barang (gudang ) yang mempunyai ijin	17	17	16.33
9	Prosentase pasar yang memenuhi persyaratan kesehatan, keamanan, ketertiban dan kenyamanan	5	5	5
10	Prosentase Lokasi Pedagang Kaki Lima yang ditata	20	20	30
11	Prosentase Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	20	20	5.35

Sumber : Dindagkop UKM Kab. Demak Tahun 2017

Dari tabel diatas secara garis besar pada tahun 2015–2017 dapat dilihat nilai bersih ekspor perdagangan mengalami fluktuatif, kontribusi perdagangan dalam PDRB juga mengalami turun naik, prosentase pertumbuhan pusat perbelanjaan dan toko swalayan justru meningkat. Situasi ini disebabkan kondisi perekonomian kita belum stabil dan nilai tukar dolar terhadap rupiah naik.

## 5. Perindustrian

Banyak perusahaan yang telah didirikan di Kabupaten Demak, salah satunya adalah perusahaan garmen. Perusahaan Industri di Kabupaten Demak seperti industri anyaman, industri sepatu dan sandal, industri bandeng presto, dan sebagainya. Perusahaan industri tersebut tersebar di beberapa Kecamatan yang berada di Kabupaten Demak. Perusahaan Industri tersebut yang menjadi *leading sector* (penggerak ekonomi) di Kabupaten Demak.

Tabel 2.62  
Jumlah Perusahaan Industri dan Jumlah Tenaga Kerja  
Tahun 2012 – 2016 Kabupaten Demak

No	Kecamatan	2012		2013		2014		2015		2016	
		Perus./ Unit Usaha	Tenaga Kerja								
1	Sayung	394	1388	395	1390	395	1392	396	1448	459	1457
2	Bonang	936	2910	936	2910	937	2910	937	2937	958	2952
3	Demak	742	3311	742	3317	744	3318	744	3348	751	3364
4	Dempet	307	680	307	680	308	680	308	700	360	719
5	Guntur	491	1722	491	1722	491	1722	491	1735	517	1740
6	Karanganyar	390	1098	390	1100	390	1103	390	1108	442	1116
7	Karangtengah	537	1020	537	1021	537	1022	537	1032	570	1042
8	Kebonagung	201	822	203	825	203	827	203	847	201	851
9	Karangawen	262	943	262	943	262	943	263	980	286	983
10	Wedung	1042	3021	1042	3021	1042	3021	1042	3051	1086	3066
11	Wonosalam	422	1425	422	1425	422	1425	423	1455	422	1464
12	Mranggen	1134	3611	1135	3612	1136	3614	1136	3676	1134	3688
13	Mijen	491	1409	491	1409	491	1409	492	1440	503	1446
14	Gajah	217	729	218	730	218	733	218	769	336	771
<b>Jumlah</b>		<b>7566</b>	<b>24089</b>	<b>7571</b>	<b>24105</b>	<b>7576</b>	<b>24119</b>	<b>7580</b>	<b>24526</b>	<b>8025</b>	<b>24659</b>

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak Tahun 2016

Tabel di atas menunjukkan seluruh perusahaan industri di Kabupaten Demak Tahun 2012–2016 yang dalam perkembangannya selalu mengalami perubahan ke arah yang lebih maju dan meningkat jumlahnya.

Tabel 2.63  
Jumlah IKM Tahun 2012 - 2016 Kabupaten Demak

No	Kecamatan	2012		2013		2014		2015		2016	
		Perus./ Unit Usaha	Nilai Prod.(Ju ta Rp.)	Perus./ Unit Usaha	Nilai Prod.( Juta Rp.)	Perus./ Unit Usaha	Nilai Produk si (Juta Rp.)	Perus./ Unit Usaha	Nilai Produksi (Juta Rp.)	Perus./ Unit Usaha	Nilai Produksi (Juta Rp.)
1	Sayung	394	-	395	-	395	-	396	-	459	-
2	Bonang	936	-	936	-	937	-	937	-	958	-
3	Demak	742	-	742	-	744	-	744	-	751	-
4	Dempet	307	-	307	-	308	-	308	-	360	-
5	Guntur	491	-	491	-	491	-	491	-	517	-
6	Karanganyar	390	-	390	-	390	-	390	-	442	-
7	Karangtengah	537	-	537	-	537	-	537	-	570	-
8	Kebonagung	201	-	203	-	203	-	203	-	201	-
9	Karangawen	262	-	262	-	262	-	263	-	286	-
10	Wedung	1042	-	1042	-	1042	-	1042	-	1086	-
11	Wonosalam	422	-	422	-	422	-	423	-	422	-
12	Mranggen	1134	-	1135	-	1136	-	1136	-	1134	-
13	Mijen	491	-	491	-	491	-	492	-	503	-
14	Gajah	217	-	218	-	218	-	218	-	336	-
<b>Jumlah</b>		<b>7566</b>		<b>7571</b>		<b>7576</b>		<b>7580</b>		<b>8025</b>	

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak Tahun 2016

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah perusahaan/unit usaha dari tahun 2012 – 2016 mengalami kenaikan. Dengan meningkatnya jumlah unit usaha diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

## 6. Transmigrasi

Persentase Pengiriman calon transmigran sejak tahun 2015–2017 mencapai 100% KK. Kendala pelaksanaan urusan ini adalah jumlah kuota yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi sangat terbatas dan tidak sebanding dengan animo masyarakat yang mendaftar sebagai calon transmigran, serta belum adanya kepastian lokasi daerah calon penerima transmigran karena penentuan lokasi dilaksanakan oleh Pemerintah dalam hal ini oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Tabel 2.64  
Capaian Pengiriman Transmigran Tahun 2015-2017  
Kabupaten Demak

No	Uraian	2015	2016	2017
1	Persentase Transmigrasi yg diberangkatkan	50	50	100

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak Tahun 2018

## 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Evaluasi ini mencakup uraian evaluasi pencapaian kinerja pembangunan daerah meliputi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2017 dengan realisasi RPJMD sampai dengan tahun 2016. Evaluasi pelaksanaan program RKPD tahun 2017 meliputi seluruh program yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan dan SKPD, menyangkut realisasi capaian target kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD baik urusan wajib maupun pilihan.

Selanjutnya evaluasi pelaksanaan urusan dan program RKPD tahun 2016 dan realisasi RPJMD sampai dengan tahun 2016 dijabarkan sebagai berikut.

### 2.2.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

#### 1. Pendidikan

Kinerja penyelenggaran urusan Pendidikan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 58 target indikator kinerja dalam RKPD Demak 2017 dan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2016-2021, seperti tertuang pada tabel berikut.

Tabel 2.65  
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Terhadap Target RKPD Tahun 2017 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target 2017	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Tahun 2017	Status Terhadap Target RKPD tahun 2017	OPD
			2015	2016					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI								
1	APK (Angka Partisipasi Kasar) PAUD usia 0-6 tahun	%	66.27	56%	60%	77.00	32.99		Dindikbud
2	APK (Angka Partisipasi Kasar) PAUD usia 0-3 tahun	%	47.63%	56%	60%	77.00	35.85		Dindikbud
3	APK (Angka Partisipasi Kasar) PAUD usia 4-6 tahun	%	55.99%	77%	78%	84.00	57.69		Dindikbud
4	% lembaga PAUD yang terakreditasi	%	53%	56%	60%	80.00	3.45		Dindikbud
5	Rasio Guru Terhadap Murid PAUD	%	40.00%	50.00	51.00	61.00	80.31		Dindikbud
6	Rasio Guru PAUD Terhadap	%	NA	50.00	50.00	61.00			Dindikbud

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Tahun 2017	Status Terhadap Target RKPD tahun 2017	OPD
			2015	2016	2017				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penduduk Usia 0 - 6								
7	Rasio Lembaga PAUD Terhadap Penduduk Usia 0 - 6	%	NA	55.00	60.00	71.00			Dindikbud
II	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL								
8	AL (Angka lulus) pendidikan kesetaraan paket A	%	NA	90%	92%		91.76		Dindikbud
9	AL (Angka lulus) pendidikan kesetaraan paket B	%	NA	90.00	92	100	82.61		Dindikbud
10	Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) berkinerja A dan B	%	NA	40.00	42	50	60		Dindikbud
11	Penduduk usia >15 tahun melek huruf	%	95	95.00	96	100	98.41		Dindikbud
12	Persentase PKBM sesuai standar	%	NA	50.00	52	60	70		Dindikbud
13	Jumlah TBM (Taman Bacaan Masyarakat)	unit	NA	50.00	55	75	55		Dindikbud
14	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN								
15	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar	%	97.00	98.00	98.75		89.54		Dindikbud
16	% APK SD/ MI /Paket A	%	106.36	100.17	105		109.65		Dindikbud
17	% APM SD/ SD/ MI /Paket A	%	85.42	84.20	80		95.23		Dindikbud
18	% APK SMP / MTs/ Paket B	%	98.76	90.00	92		102.38		Dindikbud
19	% APM SMP /MTs/ Paket B	%	77.84	67.24	80		78.26		Dindikbud
20	Angka Putus Sekolah SD /MI	%	0.079	0.07	0.07		0.03		Dindikbud
21	Angka Putus Sekolah SMP/ MTs	%	0.05	.0,06	0.06		0.21		Dindikbud

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Tahun 2017	Status Terhadap Target RKPD tahun 2017	OPD
			2015	2016	2017				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	Angka Kelulusan SD/MI	%	100.00	99.55	100		100		Dindikbud
23	Angka Kelulusan SMP/MTs	%	99.98	99.86	99		100		Dindikbud
24	Nilai Rata-Rata UN /US SD /MI	Nilai	7.09	7.13	7		7.47		Dindikbud
25	Nilai Rata-Rata UN SMP//MTS	Nilai	6.86	6.88	6.5		4.47		Dindikbud
26	AM (Angka Melanjutkan) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	99.99	95.00	95		96.8		Dindikbud
27	AM (Angka Melanjutkan) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	85.51	80.00	80		96.71		Dindikbud
28	Rasio ketersediaan sekolah / penduduk usia sekolah	%	100	100.00	100		100		Dindikbud
29	% Ruang kelas SD/MI sesuai standar nasional	%	65.52	75.25	75		79.28		Dindikbud
30	% Ruang kelas SMP/MTs sesuai standar	%	65.52	75.25	75		71.06		Dindikbud
31	Persentase SD/MI yang memiliki Ruang UKS sesuai Standar	%	NA	20.00	20		26.4		Dindikbud
32	Persentase SMP/MTs yang memiliki Ruang UKS sesuai Standar	%	NA	25.00	30		52.23		Dindikbud
33	Rasio WC di SD/MI sesuai standar terhadap Jumlah Murid	%	NA	50.00	60		70.9		Dindikbud
34	Persentase SD/MI memiliki ruang guru sesuai standar	%	NA	40.00	40		50		Dindikbud
35	% SD/MI yang memiliki perpustakaan sesuai Standar	%	NA	45.00	50		82.41		Dindikbud
36	% SMP/MTs yang memiliki perpustakaan sesuai Standar	%	NA	55.00	60		67.14		Dindikbud

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Tahun 2017	Status Terhadap Target RKPD tahun 2017	OPD
			2015	2016	2017				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	Rasio Jumlah WC perempuan terhadap jumlah murid perempuan	%	NA	45.00	50		52.5		Dindikbud
38	Persentase SD/MI memiliki Lab TIK sesuai standar	%	NA	20.00	20		9.11		Dindikbud
39	Persentase SD/MI memiliki lapangan untuk olahraga, upacara dan bermain sesuai standar	%	NA	50.00	50		50		Dindikbud
40	% SD/MI yang memiliki sanitasi layak	%	NA	55.00	60		70.9		Dindikbud
41	% SMP/MTs yang memiliki sanitasi layak	%	NA	55.00	60		79.59		Dindikbud
42	% Rasio Guru Siswa	%	NA	15.00	16		17.75		Dindikbud
43	% Rasio Guru Per Kelas Rata-rata	%	NA	1.20	1.3		1.55		Dindikbud
44	% sekolah/madrasah yang menerapkan Pendidikan Karakter	%	NA	30.00	40		40		Dindikbud
45	Rata-rata nilai sikap siswa SD/MI, SMP/MTs minimal baik (pendidikan karakter)	%	NA	30.00	40		40		Dindikbud
46	% sekolah berakreditasi minimal B	%	NA	45.00	70	90	90.02		Dindikbud
47	% satuan pendidikan yang meningkat indeks efektifitasnya berdasarkan SNP	%			80	84	90.02		Dindikbud
48	% SD/MI melaksanakan MBS dengan baik	%	NA	85.00	90		91.85		Dindikbud
49	% SMP/MTs melaksanakan MBS dengan baik.	%	NA	85.00	90		84.72		Dindikbud
50	% SD/MI yang Menggunakan TIK	%	NA	85.00	90		90		Dindikbud
51	% SMP/MTs yang Menggunakan TIK	%	NA	85.00	90		90		Dindikbud

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Tahun 2017	Status Terhadap Target RKPD tahun 2017	OPD
			2015	2016	2017				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN								
52	Persentase Pendidik PAUD berkualifikasi S1/D4	%	NA	75.00	80		77.65		Dindikbud
53	Persentase Pendidik SD berkualifikasi S1/D4	%	NA	90.00	92		93.42		Dindikbud
54	Persentase Pendidik SMP berkualifikasi S1/D4	%	NA	88.00	90		95.42		Dindikbud
55	Persentase Pendidik PAUD bersertifikat Pendidik	%	NA	25.00	30		37.27		Dindikbud
56	Persentase Pendidik SD bersertifikat Pendidik	%	NA	45.00	50		48.5		Dindikbud
57	Persentase Pendidik SMP bersertifikat Pendidik	%	NA	50.00	54		50.63		Dindikbud
IV	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN								
58	Meningkatnya mutu, kualitas dan kuantitas Pelayanan Pendidikan.								Dindikbud
V	PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI								

**Keterangan:**

• Status thdp Target RKPD 2017:		Target 2017 tercapai
		Target 2017 tidak tercapai

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Pendidikan, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2017 dengan target RKPD Demak 2017, dari sejumlah 58 target indikator,

sebanyak 40 target berstatus telah tercapai dan 18 target tidak tercapai.

## 2. Kesehatan

Kinerja penyelenggaraan urusan Kesehatan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 52 target indikator kinerja dalam RKPD Demak 2016 dan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2016-2021, seperti tertuang pada tabel berikut.

Tabel 2.66  
Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Terhadap Target RKPD 2017  
dan Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

No	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Tahun 2017	Status Terhadap Target RKPD tahun 2017	OPD
			2015	2016	2017				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN								
1	Persentase ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan	%	90	100	100	100	100		Dinkes
II	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
2	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	100	100	100	100	100		Dinkes
3	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	73.63	100	100	100	100		Dinkes
III	PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN								
4	Jumlah kasus keracunan makanan	kasus	0	0	0	-	0		Dinkes
IV	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT								
5	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).	%	68	69	69	72	100		Dinkes
6	Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	%	100	100	100	100	100		Dinkes
7	Cakupan Desa/Kelurahan	%	100	100	100	100	100		Dinkes

No	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Tahun 2017	Status Terhadap Target RKPD tahun 2017	OPD
			2015	2016	2017				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Siaga Aktif								
V	PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN								
8	Persentase penduduk yang memiliki Jaminan pemeliharaan Kesehatan	%	53	50	60	100	76,82		Dinkes
VI	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT								
9	Prevalensi balita gizi kurang	%	7.59	8	8	8	6,17		Dinkes
10	Prevalensi balita dengan berat badan rendah / kekurangan gizi	%	8.97	9.4	9.4	9			Dinkes
11	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100		Dinkes
12	Persentase Balita ditimbang berat badannya (D/S)	%	83.37	86	86	90	85,82		Dinkes
13	Persentase Bayi 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif	%	5,77	57.00	57.00	60.00	59,85		Dinkes
14	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga Miskin	%	100	100	100	100	100		Dinkes
15	Cakupan RT mengkonsumsi garam beryodium	%	79.12	83.00	83.00	90.00	84,62		Dinkes
16	Persentase Balita usia 6-59 bulan mendapat kapsul vitamin A	%	100	100	100	100	99,72		Dinkes
17	Persentase Ibu hamil mendapat 90 tablet besi	%	96.88	97.5	97.5	100	98,24		Dinkes
18	Persentase ibu hamil mengalami KEK	%	8.59	8.4	8.4	8	7		Dinkes
19	Persentase Ibu hamil yang anemia	%	8.73	8.6	8.6	8.2	11,52		Dinkes
20	Persentase kecamatan bebas rawan gizi	%	92.85	92.85	92.85	100	92,86		Dinkes
VII	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN								

No	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Tahun 2017	Status Terhadap Target RKPD tahun 2017	OPD
			2015	2016	2017				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	SEHAT								
21	Cakupan Rumah Sehat	%	70.15	82	82	90	82		Dinkes
22	Angka Bebas jentik aedes	%	95	95	95	95	95		Dinkes
23	Cakupan Kualitas Air minum yang memenuhi syarat kesehatan	%	71	70	70	90	73,44		Dinkes
24	Persentase tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan (Hotel, Taman, rekreasi dan tempat hiburan, dll)	%	63.3	82	82	90	80		Dinkes
25	Cakupan kecamatan yang melaksanakan tatanan kabupaten sehat	%	2	0	0	-	0		Dinkes
VIII	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR								
26	Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Desa	100	100	100	100	100		Dinkes
27	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	Desa	100	100	100	100	0		Dinkes
28	Angka kejadian tuberkulosis (insiden semua kasus/ 100.000 penduduk/ tahun)	%	67.00	68.00	68.00	71.00	36,55		Dinkes
29	Tingkat kematian karena tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	%	0.2	0.2	0.2	0.2	0,7		Dinkes
30	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (CDR)	%	70.00	70.00	70	70	100		Dinkes
31	Proporsi kasus Tuberkulosis yang berhasil diobati dalam program DOTS ( Sucses rate)	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100		Dinkes

No	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Tahun 2017	Status Terhadap Target RKPD tahun 2017	OPD
			2015	2016	2017				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi usia 15 - 49 tahun	%	0.007	0.010	0.010	0.01	0,01		Dinkes
33	Proporsi penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS	%	70	75	75.00	90.00	NA		Dinkes
34	Proporsi penduduk yg terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pd obat antiretroviral	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100		Dinkes
35	Angka kejadian malaria per 1.000 penduduk	%	0.0063	0.01	0.01	0.01	0,03		Dinkes
36	Angka kesakitan ( IR ) Demam Berdarah Dengue (DBD)	%	< 20	< 49	< 49	< 49	12,01		Dinkes
37	Persentase Kematian DBD ( CFR )	%	< 1 %	< 1 %	< 1 %		2,92		Dinkes
38	Angka kejadian diare per 1.000 penduduk	%	21.4	21.4	21.4	21.4	26,30		Dinkes
39	jumlah kasus filariasis yang di tangani	%	100	100	100	100	100		Dinkes
40	penemuan Acute Flaccid Paralysis (AFP)	kasus	23	27	27	27	27		Dinkes
41	persentase Jumlah kasus leptospirosis ditangani	%		100	100	100	100		Dinkes
42	Persentase penemuan kasus kusta baru	kasus	50	50	50	40	41		Dinkes
IX	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA								
43	Cakupan puskesmas persatuan penduduk (per 100.000 penduduk)	%	2,42	2,2	2,42	2,2	2,37		Dinkes
44	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana								

No	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Tahun 2017	Status Terhadap Target RKPD tahun 2017	OPD
			2015	2016	2017				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata								
45	Rasio tempat tidur RS persatuan penduduk (per 1.000 penduduk)	%	44.37	44.72	44.72	48	44,53		Dinkes
X	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA								
46	Cakupan pelayanan kesehatan anak balita	%	80	85	85	449	98		Dinkes
XI	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA								
47	proporsi Cakupan Pemeriksaan Pra Usila dan Usila	%	100	100	100	100	100		Dinkes
XII	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN								
48	Cakupan pelayanan kesehatan dasar penduduk miskin	%	100	100	100		100		Dinkes
XIII	PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK								
49	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan / (FKTP)	%	100	100	100	100	100		Dinkes
50	Cakupan kunjungan bayi	%	96	97	97	99	97,75		Dinkes
51	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	95	96	96	98	98,24		Dinkes
52	Cakupan pelayanan nifas	%	100	100	100	100	99,96		Dinkes
53	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	100	100	100	100	100		Dinkes
54	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	100	100	100	100	100		Dinkes

No	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Tahun 2017	Status Terhadap Target RKPD tahun 2017	OPD
			2015	2016	2017				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	Persentase BBLR yang ditangani sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan	%	100	100	100	100	100		Dinkes
XIV	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD (OPERASIONAL BLUD)								
56	Bed Occupancy Rate (BOR)(%)	%	80.2	77.6	80,41		63,69		RSUD
57	Average Length of Stay (AvLOS (Hari))	hari	5.09	5	5		4,91		RSUD
58	Turn Over Interval (TOI) (Hari)	hari	1.01	1.8	1,85		2,18		RSUD
59	Bed Turn Over (BTO) (Kali)	kali	71.86	76.09	77,45		60,91		RSUD
60	Net Death Rate (NDR) (0/00)	%	21.68	22.65	22,99		18,68		RSUD
61	Gross Death Rate (GDR)	%	19.61	46.31	42		38,55		RSUD
62	Maternal Death Rate (0/00)	%	0.29	-	0,19		0		RSUD
63	Neonatal Death Rate (0/00)	%	1.92	-	1,8		2,09		RSUD
64	Kepuasan pelanggan (%)	%	87.72	≥89,0	≥88,0		87,12		RSUD
XV	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT								RSUD
65	Prosentase pasien berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	%	90	90	90		90		RSUD
XV	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RS/RS JIWA/RS PARU-PARU/ RS MATA								RSUD
66	Jumlah Sarpras sesuai dengan ketentuan	Jml	25	25	27	130	27		RSUD
XVI	PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN								
67	persentase puskesmas yang terakreditasi	%	-	20	30	100	70,37		Dinkes

No	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Tahun 2017	Status Terhadap Target RKPD tahun 2017	OPD
			2015	2016	2017				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
68	Rasio dokter per satuan penduduk (per 100.000 penduduk)	%	14	1	1	1.44	19,90		Dinkes

**Keterangan:**

• Status thdp Target RKPD 2017:		Target 2017 tercapai
		Target 2017 tidak tercapai

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Kesehatan, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2017 dengan target RKPD Demak 2017, dari sejumlah 68 target indikator, sebanyak 42 indikator berstatus telah tercapai, 26 indikator berstatus tidak tercapai.

### 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja penyelenggaran urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 10 target indikator kinerja dalam RKPD Demak 2017 dan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2016-2021, seperti tertuang pada tabel berikut.

Table 2.67  
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Terhadap Target RKPD 2017 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusa n/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target	Capaian Tahun 2017	Status Terhadap Target RKPD tahun 2017	OPD
			2015	2016	2017			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN							
1	Kondisi jalan dan jembatan dalam kondisi baik	%	92.54	92.54	92.54	95,28		Dinputaru
2	Kondisi Jalan Poros desa dalam keadaan baik	%	25.00	25.00	25.00	26		Dinputaru
II	PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHA RAAN JALAN DAN JEMBATAN							
3	Kondisi jalan dan jembatan dalam kondisi baik	%	92.54	92.54	92.54	95,28		Dinputaru
III	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN							
4	Kondisi jalan dan jembatan	%	92.54	92.54	92.54	95,28		Dinputaru

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target	Capaian Tahun 2017	Status Terhadap Target RKPD tahun 2017	OPD
			2015	2016	2017			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	dalam kondisi baik							
VI	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA							
5	Kondisi Jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	90.21	90.21	90.21	90,5		Dinputaru
VII	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE ATAU GORONG-GORONG							
6	Kondisi Drainase dalam kondisi baik	%	54.26	54.26	54.26	54,3		Dinputaru
VIII	PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP / TALUD / BRONJONG							
IX	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)							Dinputaru
7	Ketersediaan dok pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	dok	1 dok	1 dok	1 dok			Bappeda Litbang
X	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG							
XI	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN							
8		%	6.60	6.60	6.60			DinLH
XII	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG							
9	Jumlah dok/laporan tentang perencanaan tata ruang	dok	5 dok	5 dok	5 dok			Bappeda Litbang
XIII	PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONVERSI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA							
XIV	PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN							
10	Persentase areal pemakaman yang dikelola	%	100	100	100			Dinperkim

**Keterangan:**

<ul style="list-style-type: none"> <li>Status thdp Target RKPD 2017:</li> </ul>		Target 2017 tercapai
		Target 2017 tidak tercapai

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2017 dengan target RKPD Demak 2017, dari sejumlah 15 target indikator, 4 indikator berstatus tidak tercapai dan 6 indikator berstatus tercapai.

#### 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kinerja penyelenggaraan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 5 target indikator kinerja dalam RKPD Demak 2017 dan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2016-2021, seperti tertuang pada tabel berikut.

Tabel 2.68

Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Terhadap Target RKPD 2017 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Tahun 2017	Status Terhadap target RPJMD Tahun 2017	OPD
			2015	2016	2017				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN								
1	Jml laporan koordinasi P2KKP Kabupaten	laporan	-	-	1	1 laporan	1 Laporan		Dinperkim
II	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			66.68	76.68				
2	Jumlah rumah yang di rehab	unit			2.457	7.285	853		Dinperkim
III	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGOLAHAN AIR BAKU								
3	persentase rumah tangga bersanitasi	%			76,68		88,21		Dinperkim
IV	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH								
4	Persentase penduduk yang mengakses air minum layak	%		52.23	68.23		75,24		Dinperkim
V	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN								

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Tahun 2017	Status Terhadap target RPJMD Tahun 2017	OPD
			2015	2016	2017				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Persentase infrastruktur pedesaan dalam kondisi baik	%		100	100		100		Dinperkim

**Keterangan:**

<ul style="list-style-type: none"> <li>Status thdp Target RKPD 2017:</li> </ul>		Target 2017 tercapai
		Target 2017 tidak tercapai

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Perumahan, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2017 dengan target RKPD Demak 2017, dari sejumlah 5 target indikator, sebanyak 4 indikator berstatus telah tercapai, 1 indikator berstatus tidak tercapai.

**5. Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Kinerja penyelenggaraan urusan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 23 target indikator kinerja dalam RKPD Demak 2017 dan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2016-2021, seperti tertuang pada tabel berikut.

Tabel 2.69

Capaian Kinerja Urusan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Terhadap Target RKPD 2017 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target	Capaian Tahun 2017	Status Terhadap Target RKPD tahun 2017	OPD
			2015	2016	2017			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA.							
1	Tingkat Respon time bencana alam, Non Alam dan Sosial	menit	NA	NA	30	60		BPBD
2	Tingkat Terdeteksinya Bencana Alam, Non Alam dan Sosial	%	NA	NA	100	100		BPBD
3	Dok Penanggulangan Bencana	dok	0	0	3	3		BPBD
4	Persentase Penduduk yang memiliki Pengetahuan tentang Kesiapsiagaan Bencana	%	NA	NA	0.3	0.3		BPBD
5	Pembentukan Desa Tangguh Bencana	Desa	3	3	3	3		BPBD

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target	Capaian Tahun 2017	Status Terhadap Target RKPD tahun 2017	OPD
			2015	2016	2017			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Pembentukan Sekolah Aman Bencana	Sekolah	0	28	70	14		BPBD
7	Persentase Sarana dan Prasarana terdampak yang ditangani	%	NA	NA	100	100		BPBD
8	Persentase Masyarakat terdampak yang mendapat penanganan	%	NA	NA	100	100		BPBD
II	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN							
9	Persentase Ormas yang mendapatkan peningkatan Wasbang	%	19	22	33	33		Kesbang
10	Persentase Ormas aktif	%	18.75	22.22	28	24.45		Kesbang
11	Kasus konflik antar umat beragama	Kasus	0	0	0	0		Kesbang
12	Keberadaan aliran yang menyimpang dari nilai-nilai agama	Jumlah	0	0	0	0		Kesbang
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN							
13	Persentase kecamatan yang memenuhi SPM rasio Linmas	%	71.43	71.43	78.57	78.57		Satpolpp
14	Persentase jumlah anggota Satlinmas terlatih	%	18.6	19,6	21,1	21.1		Satpolpp
15	Persentase pos siskamling aktif tingkat desa	%	62.56	62.56	67.1			Satpolpp
16	Persentase penanganan konflik sosial yang terjadi dimasyarakat	%	100	100	100	100		Kesbang
IV	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)							
17	Persentase penurunan jumlah kasus hukum penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh pelajar	%	100	100	100	100		Kesbang
18	Persentase peningkatan jumlah kegiatan pembinaan politik daerah	%	5	20	20	20		Kesbang
19	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu	%	67.7	Tdk ada Pemilu	Tdk ada Pemilu	Tdk ada Pemilu		Kesbang
V	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN							
20	Cakupan patroli petugas Satpol PP	kali	120	120	120	108		Satpol PP
VI	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK							

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/In dikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target	Capaian Tahun 2017	Status Terhadap Target RKPD tahun 2017	OPD
			2015	2016	2017			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	KRIMINAL							
21	Persentase pelanggaran Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah yang terselesaikan	%	100	100	100	100		Satpol PP
VII	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)							
22	Persentase pelanggaran Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah yang terselesaikan	%	100.00	100.00	100.00	58.33		Satpol PP
VIII	PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN							
23	Prosentase Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	100	100	100	100		Satpol PP

**Keterangan:**

<ul style="list-style-type: none"> <li>Status thdp Target RKPD 2017:</li> </ul>		Target 2017 tercapai
		Target 2017 tidak tercapai

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2017 dengan target RKPD Demak 2017, dari sejumlah 23 target indikator, sebanyak 5 indikator berstatus tidak tercapai dan 18 indikator berstatus telah tercapai.

## 6. Sosial

Kinerja penyelenggaran urusan Sosial ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 16 target indikator kinerja dalam RKPD Demak 2017 dan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2016-2021, seperti tertuang pada tabel berikut.

Tabel 2.70  
Capaian Kinerja Urusan Sosial Terhadap Target RKPD 2017  
dan Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

No	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target	Target akhir periode RPJMD	Capaian Tahun 2017	Status Terhadap Target RKPD tahun 2017	OPD
			2015	2016	2017				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	PROGRAM PENINGKATAN JAMINAN SOSIAL								
1	Persentase (%) fakir miskin yang mendapatkan perlindungan sosial	%	14.7	22.2	30.2	29.5	26,14		Dinsos
2	Persentase (%) anak telantar yang mendapatkan perlindungan sosial	%	1.1	1.2	1.3	1.8	2,24		Dinsos
3	Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	6.8	6.7	9.6	26.5	7,57		Dinsos
II	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL								
4	Persentase (%) anak yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga dan masyarakat	%	12.44	12.79	13.13	14.51	9,21		Dinsos
5	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial berbasis keluarga dan masyarakat	%	0.66	1.24	1.65	4.13	2.08		Dinsos
6	Persentase (%) tuna sosial selain orang dengan HIV/AIDS yang mendapatkan rehabilitasi sosial berbasis keluarga dan masyarakat	%	-	10.04	15.06	25.4	13,97		Dinsos
III	PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA								
7	Persentase (%) penyandang disabilitas yang mendapatkan	%	1.27	3.06	3.31	4.33	3,94		Dinsos

No	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target	Target akhir periode RPJMD	Capaian Tahun 2017	Status Terhadap Target RKPD tahun 2017	OPD
			2015	2016	2017				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga dan masyarakat								
IV	PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA, PSK, NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA)								
8	Persentase Eks penyandang penyakit sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba Dan penyakit Sosial Lainnya) yang telah terbina	%	19.27	17.82	26.72	45.08	27,65		Dinsos
V	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA								
9	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	0.94	1.18	1.23	1.47	1,12		Dinsos
10	Persentase lembaga pengumpul sumbangan sosial yang mendapat ijin	%	-	-	1.85	10.37	0,93		Dinsos
11	Persentase (%) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	13.33	13.33	13.72	14.9	10,9		Dinsos
VI	PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/PANTI								

No	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target	Target akhir periode RPJMD	Capaian Tahun 2017	Status Terhadap Target RKPD tahun 2017	OPD
			2015	2016	2017				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JOMPO								
12	Persentase (%) panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	81.40	83.72	88.37	100	72,5		Dinsos
VII	PROGRAM PENANGANAN KORBAN BENCANA								
13	Persentase (%) korban bencana kab/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana	%	9.85	7.56	7.56	7.56	6,50		Dinsos
14	Persentase (%) korban bencana (alam dan sosial) Kabupaten/kota yang mendapatkan layanan dukungan psikososial pada saat pasca bencana	%	-	-	100	100	100		Dinsos
15	Jumlah TMP yang terawat	unit	1	1	1	1	1		Dinsos
VIII	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN								
16	Persentase Veteran, keluarga pahlawan yang mendapat bantuan	%	-	15.38	30.77		15,38		Dinsos

**Keterangan:**

<ul style="list-style-type: none"> <li>Status thdp Target RKPD 2017:</li> </ul>		Target 2017 tercapai
		Target 2017 tidak tercapai

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Sosial, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2017 dengan target RKPD Demak 2017, dari sejumlah 16 target indikator, hanya 6 indikator berstatus telah tercapai, dan 10 indikator berstatus tidak tercapai.

## 2.2.2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

### 1. Tenaga Kerja

Kinerja penyelenggaraan urusan Tenaga Kerja ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 18 target indikator kinerja dalam RKPD Demak 2017 dan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2016-2021, seperti tertuang pada tabel berikut.

Tabel 2.71  
Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Terhadap Target RKPD 2017  
dan Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target	Target akhir periode RPJMD	Capaian Tahun 2017	Status Terhadap Target RKPD tahun 2017	OPD
			2015	2016	2017				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA								
1	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	78.87	88.73	80.00	87.91	47,64		Dinakerind
2	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Kewirausahaan	%	72.73	-	75.00	72.73	72		Dinakerind
3	Persentase perijinan lembaga pelatihan kerja swasta	%	82.86	82.86	85.71	97.50	97,56		Dinakerind
4	Persentase akreditasi lembaga pelatihan kerja swasta	%	-	-	6.67	28.57	7,32		Dinakerind
5	Persentase produktivitas lembaga pelatihan swasta	%	-	-	10.00	30.77	7,32		Dinakerind
6	Persentase produktivitas perusahaan kecil	%	-	-	1.36	6.78	1,0		Dinakerind
II	PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA								
7	Pencari kerja yang ditempatkan	%	32.53	40.57	40.77	44.00	40,46		Dinakerind
8	Persentase pengisian lowongan kerja	%	40.43	42.39	43.48	54.35	61,78		Dinakerind
9	TKI yang terlindungi Pra dan Pasca Penempatan	%	100.00	100.00	100	100	100		Dinakerind
10	Persentase IMTA yang melaksanakan perpanjangan	%	100.00	100.00	100	100	100		Dinakerind

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target	Target akhir periode RPJMD	Capaian Tahun 2017	Status Terhadap Target RKPD tahun 2017	OPD
			2015	2016	2017				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN								
11	Persentase Perusahaan yang memiliki PKB	%	3.51	2.18	4.37	13.10	3,49		Dinakerind
12	Persentase Perusahaan yang memiliki PP	%	11.62	12.01	12.45	14.19	13,76		Dinakerind
13	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	%	25.00	70.00	70.00	50.00	28		Dinakerind
14	Angka sengketa pengusaha-pekerja yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100		Dinakerind
15	Persentase lembaga ketenagakerjaan yang aktif	%	53.33	71.67	71.67	100.00	118,33		Dinakerind
16	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	%	64.23	56.31	83.68	85.00	98,25		Dinakerind
17	Persentase Perusahaan yang menerapkan Struktur Skala Upah	%	-	2.18	4.37	13.10	6,55		Dinakerind
18	Rasio Pencapaian KHL dengan UMK	%	104,90	103,89	110,97	111	108,88		Dinakerind

**Keterangan:**

• Status thdp Target RKPD 2017:		Target 2017 tercapai
		Target 2017 tidak tercapai

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Ketenagakerjaan, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2017 dengan target RKPD Demak 2017, dari sejumlah 18 target indikator, sebanyak 15 indikator berstatus telah tercapai, dan 3 indikator berstatus tidak tercapai.

**2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Kinerja penyelenggaran urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 10 target indikator kinerja dalam RKPD Demak 2017 dan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2016-2021, seperti tertuang pada tabel berikut.

Tabel 2.72

Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Terhadap Target RKPD 2017 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target	Capaian Tahun 2017	Status Terhadap Target RKPD tahun 2017	OPD
			2015	2016	2017			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN							
1	Kasus KDRT	kasus	30	30	29	16		KP2PA
2	Kasus kekerasan terhadap anak	kasus	50	53	51	48		KP2PA
3	Kasus kekerasan terhadap perempuan	kasus	25	25	23	16		KP2PA
4	Kasus Trafiking	kasus	2	2	2	0		KP2PA
II	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK							
5	Persentase Kelembagaan PUG dan PUHA aktif	%	37.33	37.33	38.5	37,04		KP2PA
III	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN							
6	Persentase kontribusi pendapatan perempuan dalam keluarga	%	35.9	35.9	36	36		KP2PA
7	Angka perceraian	kasus	2284	2284	2235	1967		KP2PA
8	Anak yang berhadapan dengan hukum	kasus	25	25	23	27		KP2PA
9	Angka pernikahan dini	kasus	442	442	390	205		KP2PA
IV	PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN							
10	Rasio perempuan dalam Jabatan publik	rasio	10.28	10.28	11	14		KP2PA

**Keterangan:**

• Status thdp Target RKPD 2017:		Target 2017 tercapai
		Target 2017 tidak tercapai

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2017 dengan target RKPD Demak 2017, dari sejumlah 10 target indikator, sebanyak 6 indikator tersebut berstatus telah tercapai dan 4 indikator berstatus tidak tercapai.

**3. Pangan**

Kinerja penyelenggaran urusan Pangan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 18 target indikator kinerja dalam RKPD Demak 2017 dan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2016-2021, seperti tertuang pada tabel berikut.

**Tabel 2.73**  
**Capaian Kinerja Urusan Pangan**  
**Terhadap Target RKPD 2017 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021**

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target	Capaian Tahun 2017	Status Terhadap Target RKPD tahun 2017	OPD
			2015	2016	2017			
I	PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN / PERKEBUNAN							
1	Penanganan Daerah Rawan Pangan	%			62	41,70		Dinpertan
2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Angka score			94.8	87,40		Dinpertan
3	Ketersediaan Pangan Utama	%			31.75	379,254		Dinpertan
4	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan didaerah	%			100	100		Dinpertan
5	Stabilitas Harga dan pasokan pangan	%			80	92,86		Dinpertan
6	Penguatan cadangan pangan	ton			673	6,89		Dinpertan
7	Jumlah desa berstatus mandiri pangan	desa			12	10		Dinpertan
8	Persentase desa yang memiliki lumbung pangan masyarakat	%			9.24	9,63		Dinpertan
9	Persentase wilayah kecamatan yang memiliki lembaga distribusi pangan	%			30	71		Dinpertan
10	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%			89.09	88,23		Dinpertan
II	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI							
11	Persentase kelompok tani dan gapoktan yang dibina dan	%			100	100		Dinpertan

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/l disuluh	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target	Capaian	Status	OPD
III	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN / PERKEBUNAN						
12	Jumlah kemitraan kerja sama yang dijalin	bh		3	2		Dinpertan
13	Jumlah pameran/promosi yang diikuti	kali		6	6		Dinpertan
IV	PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN						
14	Laporan hasil litbang teknologi tepat guna	ada/tdk		ada	ada		Dinpertan
15	Pelatihan penerapan teknologi tepat guna	kali		6	6		Dinpertan
V	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN / PERKEBUNAN						
16	Jumlah kursus dan demonstrasi penyuluhan pertanian/perkebunan	%		100	100		Dinpertan
VII	PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN / PERKEBUNAN LAPANGAN						
17	SDM Penyuluh yang mempunyai kompetensi sesuai standart	%		60	51,58		Dinpertan
VIII	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN						
18	Persentase penguatan cadangan pangan						Dinpertan

**Keterangan:**

<ul style="list-style-type: none"> <li>Status thdp Target RKPD 2017:</li> </ul>		Target 2017 tercapai
		Target 2017 tidak tercapai

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Pangan, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2017 dengan target RKPD Demak 2017, dari sejumlah 18 target indikator, sebanyak 12 indikator berstatus telah tercapai, 6 indikator berstatus tidak tercapai.

**4. Pertanahan**

Kinerja penyelenggaraan urusan Pertanahan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 4 target indikator kinerja dalam RKPD Demak 2017 dan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2016-2021, seperti tertuang pada tabel berikut.

Tabel 2.74  
Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Terhadap Target RKPD 2017  
dan Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Tahun 2017	Status Terhadap Target RPJMD Tahun 2017	OPD
			2015	2016	2017				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH								
1	jumlah bidang tanah milik pemkab eks bondo deso yang desa berubah status menjadi kelurahan yang telah tersertifikasi	bidang			20	78.03	20		Setda
2	Persentase Tanah Pemkab yang bersertifikat	%					50		Setda
3	,persentase rupabumi unsur buatan yg teridentifikasi	%			40	100	40		Setda
II	PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN								
4	Persentase tanah milik pemerintah yang telah terpapisasi dan persentase tukar-menukar tanah kas yang difasilitasi	%			100	100	100		Setda

**Keterangan:**

• Status thdp Target RKPD 2017:		Target 2017 tercapai
		Target 2017 tidak tercapai

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Pertanahan, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2017 dengan target RKPD Demak 2017, dari sejumlah 4 target indikator, sebanyak 4 indikator berstatus telah tercapai.

**5. Lingkungan Hidup**

Kinerja penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 8 target indikator kinerja dalam RKPD Demak 2017 dan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2016-2021, seperti tertuang pada table berikut.

Tabel 2.75  
Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Terhadap Target RKPD 2017  
dan Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target	Capaian Tahun 2017	Status Terhadap Target RKPD tahun 2017	OPD
			2015	2016	2017			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LH							
1	Prosentase pemantauan status mutu air, rasio cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	%	20	20	20	20		DinLH

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target	Capaian Tahun 2017	Status Terhadap Target RKPD tahun 2017	OPD
			2015	2016	2017			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM (SDA)							
2	Rasio cakupan penghijauan wilayah penghijauan wilayah konservasi dan rawan abrasi	Ha	5	5	5.011	5.011		DinLH
III	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN							
3	Prosentase kelompok masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah standar 3 R	kelompok	5	10	3	3		DinLH
IV	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SDA DAN LH							
4	Informasi mengenai luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan status kerusakannya	dok	5	5	8	8		DinLH
5	Program Peningkatan Pengendalian Polusi							
6	Standart IKLH	indeks	37	37	65	47.91		DinLH
7	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)							
8	Persentase RTH Publik di wilayah perkotaan	%	0	0	0	0		DinLH

**Keterangan:**

• Status thdp Target RKPD 2017:		Target 2017 tercapai
		Target 2017 tidak tercapai

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Lingkungan Hidup, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2017 dengan target RKPD Demak 2017, dari sejumlah 8 target indikator, sebanyak 6 indikator berstatus telah tercapai, 2 indikator berstatus tidak tercapai.

**6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Kinerja penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 6 target indikator kinerja dalam RKPD Demak 2017 dan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2016-2021, seperti tertuang pada tabel berikut.

Tabel 2.76

Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Terhadap Target RKPD 2017 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target	Capaian Tahun 2017	Status Terhadap Target RKPD tahun 2017	OPD
			2015	2016	2017			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN							
1	Rasio penduduk ber-KTP	%	89	89	90	97.11		Dindikcapil
2	Rasio bayi ber-akte kelahiran	%	89	89	90	91.48		Dindikcapil
3	Kepemilikan akta kelahiran	%	87	87	88	87.89		Dindikcapil
4	Rasio pasangan berakte nikah	%	100	100	100	100		Dindikcapil
5	Ketersediaan database kependudukan		Ada	Ada	Ada	Ada		Dindikcapil
6	Cakupan Akte Kematian	%	1	1	1	7.49		Dindikcapil

## Keterangan:

• Status thdp Target RKPD 2017:		Target 2017 tercapai
		Target 2017 tidak tercapai

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Kependudukan dan Catatan Sipil, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2017 dengan target RKPD Demak 2017, dari sejumlah 6 target indikator, sebanyak 5 indikator berstatus telah tercapai, 1 indikator berstatus tidak tercapai.

## 7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 11 target indikator kinerja dalam RKPD Demak 2017 dan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2016-2021, seperti tertuang pada tabel berikut.

Tabel 2.77

Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Terhadap  
Target RKPD 2017 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target	Capaian Tahun 2017	Status Terhadap Target RKPD tahun 2017	OPD
			2015	2016	2017			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA							
1	% Desa memiliki RPJM desa dan APBdes, RKPDes sesuai dengan peraturan yang ada	%	100	100	100	100		Dinpermasdes P2KB
2	persentase aparatur desa yang memiliki kompetensi menyusun dok perencanaan dan penganggaran	%	100	100	100	100		Dinpermasdes P2KB
II	PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN							
3	Persentase terbentuknya Bumdes, 5 desa tiap tahun	%	8.23	8.23	8.23	32,5		Dinpermasdes P2KB
4	Persentase perkembangan Posyantek yang ada di masyarakat (2 posyantek tiap kecamatan sampai tahun 2021)	%	21.42	21.42	21.42	21,14		Dinpermasdes P2KB
III	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN							
5	Rata-rata jumlah kelompok binaan	%	16.9	16.9	16.9	16,9		Dinpermasdes P2KB
6	% LPM Aktif	%	100	100	100	100		Dinpermasdes P2KB
7	Persentase posyandu aktif	%	100	100	100	100		Dinpermasdes P2KB
8	persentase PKK aktif	%	100	100	100	100		Dinpermasdes P2KB
9	% kelompok adat istiadat yang dibina	%	35.7	35.7	35.7	35,7		Dinpermasdes P2KB
IV	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI							

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target	Capaian Tahun 2017	Status Terhadap Target RKPD tahun 2017	OPD
			2015	2016	2017			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA							
10	Persentase partisipasi masyarakat dalam membangun desa	%	0	0	17	17		Dinpermasdes P2KB
V	PROGRAM PENINGKATAN PRAN PEREMPUAN DI PEDESAAN							
11	Persentase kelompok perempuan yang dibina	%	0	0	36.6	36,6		Dinpermasdes P2KB

**Keterangan:**

• Status thdp Target RKPD 2017:		Target 2017 tercapai
		Target 2017 tidak tercapai

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2017 dengan target RKPD Demak 2017, dari sejumlah 11 target indikator, sebanyak 10 indikator berstatus telah tercapai, dan 1 indikator berstatus tidak tercapai.

**8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Kinerja penyelenggaran urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 15 target indikator kinerja dalam RKPD Demak 2017 dan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2016-2021, seperti tertuang pada tabel berikut.

Tabel 2.78

Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Terhadap Target RKPD 2017 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target	Capaian Tahun 2017	Status Terhadap Target RKPD tahun 2017	OPD
			2015	2016	2017			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PROGRAM KELUARGA BERENCANA							
1	Persentase KB aktif	%	75.64	76	76.5	73,34		Dinpermasdes

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target	Capaian Tahun 2017	Status Terhadap Target RKPD tahun 2017	OPD
			2015	2016	2017			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								P2KB
II	PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI							
2	Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun	%	46	44	58.6	58,6		Dinpermasdes P2KB
3	Drop out KB	%	0	15.41	1.7	16,2		Dinpermasdes P2KB
4	Cakupan PUS yang istrinya dibawah 20 tahun	%	0	58.6	30	58		Dinpermasdes P2KB
5	Cakupan KB Pria	%	1.5	1.67	100	0,89		Dinpermasdes P2KB
III	PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MADIRI							
6	Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan	%	0	25	100	100		Dinpermasdes P2KB
7	PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING KRR							
8	Prosentase kecamatan memiliki fasilitas pelayanan konseling remaja	%	100	100	100	100		Dinpermasdes P2KB
9	Rasio PPKBD	%	100	100	100	100		Dinpermasdes P2KB
IV	PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA							
10	Prosentase desa / kelurahan yang mempunyai tribina aktif	%	0	100	100	100		Dinpermasdes P2KB
V	PROGRAM PENGEMBANGAN MODEL OPERASIONAL BKB POSYANDU							

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target	Capaian Tahun 2017	Status Terhadap Target RKPD tahun 2017	OPD
			2015	2016	2017			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PADU							
11	Prosentase BKB Aktif	%	0	100	100	100		Dinpermasdes P2KB
VI	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK							
12	Prosentase terpenuhinya informasi tumbuh kembang anak	%	0	100	100	100		Dinpermasdes P2KB
VIII	PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN NARKOBA, PMS TERMASUK HIV/AIDS							
13	% PIK KRR yg mendapatkan pengetahuan yg kompeehensif ttg HIV AIDS	%	100	100	100	100		Dinpermasdes P2KB
IX	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN IBU BAYI DAN ANAK BALITA MELALUI KELOMPOK KEGIATAN DIMASYARAKAT (PPKS )							
14	Menurunya resiko kelahiran bayi dg BBLR	%	100	100	100	100		Dinpermasdes P2KB
X	PENINGKATAN KAPSITAS SDM PENYULUH KB							
15	Rasio Petugas Lapangan Penyuluh KB	%	0	0	40	100		Dinpermasdes P2KB

**Keterangan:**

<ul style="list-style-type: none"> <li>Status thdp Target RKPD 2017:</li> </ul>		Target 2017 tercapai
		Target 2017 tidak tercapai

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, apabila dibandingkan antara

realisasi kinerja tahun 2017 dengan target RKPD Demak 2017, dari sejumlah 15 target indikator, sebanyak 13 indikator berstatus telah tercapai, 2 indikator berstatus tidak tercapai.

## 9. Perhubungan

Kinerja penyelenggaran urusan Perhubungan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 11 target indikator kinerja dalam RKPD Demak 2017 dan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2016-2021, seperti tertuang pada tabel berikut.

Tabel 2.79  
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Terhadap Target RKPD 2017 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan /Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Tahun 2017	Status Terhadap Target RKPD tahun 2017	OPD
			2015	2016	2017				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ								
1	Jumlah terminal terpelihara	Lokasi	3	3	3	5	66.70%		Dinhub
2	Alat uji dalam kondisi baik	unit	9	9	9	15	100%		Dinhub
II	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN								
3	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten	unit	598	598	598	608	72%		Dinhub
4	Rekom ijin trayek yang dikeluarkan	unit	100	100	100	115	100%		Dinhub
5	Penurunan angka kecelakaan	rasio	517.5	517.5	517.5	339.53	0%		Dinhub
III	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN								DINHUB
6	Jumlah terminal tersedia	lokasi	3	3	4	7	50%		Dinhub
7	Jumlah halte tersedia	lokasi	7	7	8	12	50%		Dinhub
IV	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS								DINHUB
8	Persentase sarana perlengkapan jalan dalam kondisi baik (rambu, marka, APILL, warninglight, guardrail, cermin tikungan, paku jalan dll)	%	30	30	45	100	215%		Dinhub
VI	PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR								DINHUB

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Tahun 2017	Status Terhadap Target RKPD tahun 2017	OPD
			2015	2016	2017				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Persentase uji kir angkutan umum	%	30	30	45	100	40.20%	↓	Dinhub
VII	PROGRAM PELAYANAN PERKAPALAN								
10	Ijin pas kecil kapal dan pemasangan tanda kebangsaan kapal dibawah 7 Gt diterbitkan	unit	1140	1140	1140	1200	106%	↓	Dinhub
VIII	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN								
11	Jumlah dok pengelolaan jaringan transportasi dan LLAJ	dok	1	1	2	12	0%	↓	Dinhub

**Keterangan:**

• Status thdp Target RKPD 2017:		Target 2017 tercapai
		Target 2017 tidak tercapai

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Perhubungan, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2017 dengan target RKPD Demak 2017, dari sejumlah 11 target indikator, sebanyak 4 indikator berstatus tercapai, 7 indikator berstatus tidak tercapai.

## 10. Komunikasi dan Informatika

Kinerja penyelenggaran urusan Komunikasi dan Informatika ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 6 target indikator kinerja dalam RKPD Demak 2017 dan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2016-2021, seperti tertuang pada tabel berikut.

Tabel 2.80  
Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Terhadap Target RKPD 2017 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Tahun 2017	Status Terhadap Target RKPD tahun 2017	OPD
			2015	2016	2017				
I	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA								

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Tahun 2017	Status Terhada p Target RKPD tahun 2017	OPD
			2015	2016	2017				
1	PersentaseSKPD yang memiliki portal web site	%	50	50	50	100	100		Dinkominfo
2	Persentase instansi pemerintah daerah yang menggunakan e-Gov	%	50	50	50	100	100		Dinkominfo
3	persentase menara telekomunikasi/bts yang memiliki ijin dan diperpanjang	unit	176	176	176	196	183		Dinkominfo
4	Sistem infirmasi Pelayanan Publik yang berbasis IT	%	n/a	n/a	2	6	3		Dinkominfo
II	PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI								
5	Persentase SDM SKPD yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang TIK	%	30	30	32	40	40		Dinkominfo
III	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA								
6	Badan publik yang telah menyampaikan DIP	%	40	40	40	60	36		Dinkominfo

**Keterangan:**

• Status thdp Target RKPD 2017:		Target 2017 tercapai
		Target 2017 tidak tercapai
• Status thdp Target Akhir RPJMD:		Capaian Target RPJMD s/d 2016 telah tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2016 akan tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2016 perlu upaya keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Komunikasi dan Informatika, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2017 dengan target RKPD Demak 2017, dari sejumlah 6 target indikator, sebanyak 5 indikator berstatus telah tercapai, dan 1 indikator berstatus tidak tercapai.

### 11. Koperasi dan UKM

Kinerja penyelenggaran urusan Koperasi dan UKM ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 6 target indikator kinerja dalam RKPD Demak 2017 dan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2016-2021, seperti tertuang pada tabel berikut.

**Tabel 2.81**  
**Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM Terhadap Target RKPD 2017**  
**dan Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021**

No	Aspek/Fokus/Bidang /Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Tahun 2017	Status Terhadap Target RKPD tahun 2017	OPD
			2015	2016	2017				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif								
1	Jumlah usaha mikro kecil yang dibina	unit	675	675	675	1200	765		Dindagkop UKM
III	Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM								
2	Prosentase usaha mikro menjadi usaha kecil	%	0.60	0.60	0.60	2.5	0,45		Dindagkop UKM
3	Prosentase Peningkatan UMKM	%	2.30	2.30	2.30	4.40	2,30		Dindagkop UKM
III	Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM								
4	Prosentase UMKM yang telah mengikuti pameran promosi produk	%	37.48	37.48	37.48	62.69	37,48		Dindagkop UKM
5	Persentase UMKM yang menjalin kemitraan dengan pelaku usaha besar	%	0.7	0.7	0.7	1.5	0,7		Dindagkop UKM
IV	Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi								
6	Prosentase koperasi aktif	%	80	80	80	84	82,90		Dindagkop UKM

**Keterangan:**

<ul style="list-style-type: none"> <li>Status thdp Target RKPD 2017:</li> </ul>		Target 2017 tercapai
		Target 2017 tidak tercapai

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Koperasi dan UMKM, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2017 dengan target RKPD Demak 2017, dari sejumlah 6 target indikator, sebanyak 5 indikator berstatus telah tercapai, indikator 1 berstatus tidak tercapai.

## 12. Penanaman Modal

Kinerja penyelenggaraan urusan Penanaman Modal ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 12 target indikator kinerja dalam RKPD Demak 2017 dan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2016-2021, seperti tertuang pada tabel berikut.

Tabel 2.82  
Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Terhadap Target RKPD 2017 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

No	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Tahun 2017	Status Terhadap Target RKPD tahun 2017	OPD
			2015	2016	2017				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI								
1	Presentase nilai dan jumlah Investasi yang berhasil ditanamkan	%	15	15	15	30	62.3		Dinpmptsp
2	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	kali	1	1	1	1	1		Dinpmptsp
3	Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan	kali	1	1	1		1		Dinpmptsp
4	4.Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal	kali	3	3	3	3	3		Dinpmptsp
5	5. Tersedianya informasi potensi peluang investasi melalui panggung reklame dan baliho	jenis	15	15	15	15	16		Dinpmptsp
6	6. Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	kali	1	1	1	2	1		Dinpmptsp
II	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI								
7	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah	4	4	4	20	339		Dinpmptsp
8	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Nilai	US\$ 45.284.500. 000 (PMA) 2.141.667.0 00.000 (PMDN)	US\$ 45.284.500.0 00 (PMA) 2.141.667.00 0.000 (PMDN)	US\$ 45.284.50 0.000 (PMA) 2.141.667. 000.000	US\$ 271.718.200. 000 (PMA) 12.981.252.0 00.000 (PMDN)	US\$ 8.426.700 (PMA) 1.250.422. 600 (PMDN)		Dinpmptsp

No	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Tahun 2017	Status Terhadap Target RKPD tahun 2017	OPD
			2015	2016	2017				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					(PMDN)				
9	Jumlah Izin dan nonperizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	dok /ketetapan	6.9	6.9	6.9	42000	4689		Dinpmptsp
10	Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha	kali	2	2	2	10	2		Dinpmptsp
11	Terimplementasikan nya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah		Dinpmptsp
III	PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBERDAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH								
12	Tersedianya data dan informasi lahan industri dan tercapainya pemetaan pemohon perizinan , kualitas pelayanan publik dan kelancaran perizinan yang ditetapkan	%	90	90	90	90	90		Dinpmptsp

**Keterangan:**

<ul style="list-style-type: none"> <li>Status thdp Target RKPD 2017:</li> </ul>		Target 2017 tercapai
		Target 2017 tidak tercapai

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Penanaman Modal, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2017 dengan target RKPD Demak 2017, dari sejumlah 12 target indikator, sebanyak 11 indikator berstatus telah tercapai, 1 indikator berstatus tidak tercapai.

### 13. Kepemudaan dan Olahraga

Kinerja penyelenggaraan urusan Kepemudaan dan Olahraga ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 12 target indikator kinerja dalam RKPD Demak 2017 dan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2016-2021, seperti tertuang pada tabel berikut.

Tabel 2.83

Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Terhadap Target RKPD Tahun 2017 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

No	Aspek/Fokus/Bidang /Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Tahun 2017	Status Terhadap Target RKPD tahun 2017	OPD
			2015	2016	2017				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA								
1	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	unit	20	21	21	84	6		Dinpora
II	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN								
2	Jumlah organisasi pemuda	kelompok	25	28	28	112	28		Dinpora
III	PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA								
3	Jumlah pemuda yang mampu berwirausaha	orang	10	15	20	100	17		Dinpora
IV	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN								
4	Jumlah Organisasi Olaraga	kelompok	93	95	95	100	95		Dinpora
5	Prosentase Organisasi Olahraga Aktif	%	90	90	90	95	92		Dinpora
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAMHRAGA								
6	Jumlah Kegiatan Olahraga	kegiatan	20	21	21	21	21		Dinpora
7	Jumlah Tenaga Pembina Mahir	orang	NA	75	150	350	200		Dinpora
VI	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN								

No	Aspek/Fokus/Bidang /Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Tahun 2017	Status Terhadap Target RKPD tahun 2017	OPD
			2015	2016	2017				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	MANAJEMEN OLAHRAGA								
8	Jumlah Klub Olahraga	unit	10	11	11	11	11		Dinpora
9	Jumlah Organisasi Olahraga	kelompok	93	95	95	95	95		Dinpora
VII	PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA OLAHRAGA								
10	Gelanggang /Balai Remaja (Selain Milik Swasta)	unit	1	1	1	2	0		Dinpora
11	Jumlah gedung olahraga	unit	1	1	1	2	4		Dinpora
12	Rasio Lapangan olahraga		285	285	285	285	70		Dinpora

**Keterangan:**

• Status thdp Target RKPD 2017:		Target 2017 tercapai
		Target 2017 tidak tercapai

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Kepemudaan dan Olahraga, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2017 dengan target RKPD Demak 2017, dari sejumlah 12 target indikator, sebanyak 8 indikator berstatus telah tercapai, 4 indikator berstatus tidak tercapai.

#### 14. Statistik

Kinerja penyelenggaraan urusan Statistik ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 2 target indikator kinerja dalam RKPD Demak 2017 dan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2016-2021, seperti tertuang pada tabel berikut.

Tabel 2.84  
Capaian Kinerja Urusan Statistik Terhadap Target RKPD 2017  
dan Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Tahun 2017	Status Terhadap Target RKPD tahun 2017	OPD
			2015	2016	2017				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH								
1	Tersedianya data dan informasi statistik daerah	%			100		100		Dinkominfo
2	Persentase kreativitas dan inovasi yang masuk SIDA				11.11%				Bappeda Litbang

**Keterangan:**

<ul style="list-style-type: none"> <li>Status thdp Target RKPD 2017:</li> </ul>		Target 2017 tercapai
		Target 2017 tidak tercapai

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Statistik, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2017 dengan target RKPD Demak 2017, dari sejumlah 2 target indikator, sebanyak 1 indikator berstatus telah tercapai dan 1 indikator tidak tercapai.

### 15. Persandian

Kinerja penyelenggaraan urusan Persandian ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 target indikator kinerja dalam RKPD Demak 2017 dan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2016-2021, seperti tertuang pada tabel berikut.

Tabel 2.85  
Capaian Kinerja Urusan Persandian Terhadap Target RKPD 2017  
dan Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Tahun 2017	Status Terhadap Target RKPD tahun 2017	OPD
			2015	2016	2017				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN KINERJA APARATUR PEMERINTAH								

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Tahun 2017	Status Terhadap Target RKPD tahun 2017	OPD
			2015	2016	2017				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase pemanfaatan persandian dalam komunikasi antar pemerintah Kabupaten Demak dengan Pusat dan Provinsi (%)	%	100	100	100	100	100		Dinkominfo

**Keterangan:**

• Status thdp Target RKPD 2017:		Target 2017 tercapai
		Target 2017 tidak tercapai

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Persandian, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2017 dengan target RKPD Demak 2017, dari sejumlah 1 target indikator dan telah tercapai.

### 2.2.3. Urusan Pilihan

#### 1. Pertanian

Kinerja penyelenggaran urusan Pertanian ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 37 target indikator kinerja dalam RKPD Demak 2017 dan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2016-2021, seperti tertuang pada tabel berikut.

Tabel 2.86  
Capaian Kinerja Urusan Pertanian Terhadap Target RKPD 2017 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

No	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Tahun 2017	Status Terhadap Target RKPD tahun 2017	OPD
			2015	2016	2017				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA								
1	Produktivitas padi	kw/ha	66,27	61,9	63.22	68.81	64,47		Dinpertan
	Produksi pertanian tanaman pangan utama :								
2	Padi	ton	625.604,76	610.414	623.477	678.585	643.942		Dinpertan
3	Jagung	ton	167.700	169.436	169.436	169.436	204.372		Dinpertan

No	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Tahun 2017	Status Terhadap Target RKPD tahun 2017	OPD
			2015	2016	2017				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Kedelai	ton	314	317	317	317	243		Dinpertan
5	Kacang Hijau	ton	35.330	34.722	35.590	678.585	36.683		Dinpertan
	Produksi komoditas hortikultura :								
6	Bawang merah	ton	48.905	37.953	40.230	50.790	53.354		Dinpertan
7	Cabe	ton	5.293	4.405	4.625	5.622	4.225		Dinpertan
8	Jambu air	ton	9.980	8.904	9.349	11.364	9.980		Dinpertan
9	Belimbing	ton	3.468	3.575	3.647	3.947	2.710		Dinpertan
10	Mangga	ton	11.833	12.129	12.432	13.723	13.709		Dinpertan
11	Pisang	ton	26.747	27.416	28.101	31.019	31.820		Dinpertan
12	Semangka	ton	15.870	16.267	16.673	18.404	9.927		Dinpertan
13	Melon	ton	6.921	7.094	7.271	8.026	625		Dinpertan
14	Tanaman obat	ton	568	582	597	659	393		Dinpertan
II	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERKEBUNAN								
	Produksi komoditas perkebunan:								Dinpertan
15	Tembakau	ton	1,200	1.215	2.859	3.034	2.091		Dinpertan
16	Kelapa	ton	610,00	622	630	682	637		Dinpertan
17	Tebu	ton	2490	2502	164	171	117		Dinpertan
III	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN								
	Produksi daging :								Dinpertan
18	Ternak besar	ton	653,21	660,09	666,69	693,76	530,40		Dinpertan
19	Ternak kecil	ton	423,41	398,59	408,56	450,97	452,06		Dinpertan
20	Unggas	ton	9.270,77	7.576,81	8.258,72	11.657,86	15.194,37		Dinpertan
	Produksi telur:								Dinpertan
21	Ayam	ton	2.348,57	1.896,77	1.991,605	2.420,81	1.378,15		Dinpertan
22	Itik	ton	2.044,82	2.031,13	2.041,29	2.082,42	1.731,16		Dinpertan
23	Burung Puyuh	ton	407,66	402,92	404,92	413,08	467,46		Dinpertan
	Populasi komoditas peternakan:								Dinpertan
24	Sapi	ekor	4.841	4.325	4.498	5.262	5.632		Dinpertan
25	Kerbau	ekor	3.065	3.092	3.108	3.170	3.002		Dinpertan
26	Kambing	ekor	46.022	45.547	46.486	50.436	49.263		Dinpertan
27	Domba	ekor	72.637	71.590	72.607	76.820	77.741		Dinpertan

No	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Tahun 2017	Status Terhadap Target RKPD tahun 2017	OPD
			2015	2016	2017				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	Ayam pedaging	ekor	8.467.600	6.653.910	7.319.301	10.716.188	14.020.300		Dinpertan
29	Ayam Kampung	ekor	562.015	590.773	596.681	620.909	583.998		Dinpertan
30	Itik	ekor	225.686	250.83	251.457	253.981	239.741		Dinpertan
IV	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN								
31	Nilai hasil penjualan produk unggulan pertanian, perkebunan dan peternakan yang dipromosikan	rupiah		176.000.000 .000	230.000.0 00	486.000.00 0	375.000.00 0		Dinpertan
VII	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK								
	Angka morbiditas hewan ternak								Dinpertan
32	Sapi	%	10	10	10.00	9.20	6,90		Dinpertan
33	Kerbau	%	8	8	8.00	7.20	2,00		Dinpertan
34	Kambing	%	15	15	15.00	14.20	3,20		Dinpertan
35	Domba	%	15	15	15.00	14.20	0,30		Dinpertan
36	Unggas	%	7	7	7.00	6.20	0		Dinpertan
VIII	PROGRAM PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN KE NON PERTANIAN PANGAN								
37	Jmlh lahan pertanian pangan yang beralih fungsi menjadi non pertanian pangan	ha	400	375	38	30	37		Dinpertan

**Keterangan:**

• Status thdp Target RKPD 2017:		Target 2017 tercapai
		Target 2017 tidak tercapai

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Pertanian, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2017 dengan target RKPD Demak 2017, dari sejumlah 37 target indikator, sebanyak 17 indikator berstatus telah tercapai, 20 indikator berstatus tidak tercapai.

## 2. Pariwisata

Kinerja penyelenggaraan urusan Pariwisata ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 8 target indikator kinerja dalam RKPD Demak 2017 dan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2016-2021, seperti tertuang pada tabel berikut.

Tabel 2.87  
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Terhadap Target RKPD 2017  
dan Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Tahun 2017	Status Terhadap Target RKPD tahun 2017	OPD
			2015	2016	2017				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA								
1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Rp	1,430,000,000	1,480,000,000	1,490,000,000	2,200,000,000	1,728,755,000		Dinparta
2	Kunjungan wisata	Orang	1,969,000	1,969,000	1,969,000	2,900,968	1,728,755		Dinparta
II	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA								
3	Jumlah Objek Wisata	objek	5	5	5	7	6		Dinparta
4	Jumlah Gedung Pertunjukan	Unit	-	-	-	1	0		Dinparta
III	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN								
5	Jumlah restoran	unit	10	10	10	10			Dinparta
6	Jumlah penginapan/hotel	unit	5	5	5	5	5		Dinparta
7	Presentase pelaku jasa dan usaha pariwisata yang bersertifikasi	%	0	0	0	1	0		Dinparta
8	Jumlah event bersama sewilayah Kedungsepur dan Pakudjembra	Tampilan	2	3	4	10	5		Dinparta

### Keterangan:

• Status thdp Target RKPD 2017:		Target 2017 tercapai
		Target 2017 tidak tercapai

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Pertanian, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2017 dengan target RKPD Demak 2017, dari sejumlah 8 target indikator, sebanyak 5 indikator berstatus telah tercapai, 3 indikator berstatus tidak tercapai.

### 3. Perdagangan

Kinerja penyelenggaran urusan Perdagangan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 10 target indikator kinerja dalam RKPD Demak 2017 dan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2016-2021, seperti tertuang pada tabel berikut.

Tabel 2.88  
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Terhadap Target RKPD 2017  
dan Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

No	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Tahun 2017	Status Terhadap Target RKPD tahun 2017	OPD
			2015	2016	2017				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN								
1	prosentase UTTP yang di tera	%	9,000	10,000	500	7000	400		Dindagkop UKM
2	Jumlah temuan barang yang tidak memenuhi standar yang berlaku	Temuan	0	1	1	3	3		Dindagkop UKM
II	PENINGKATAN KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL								
3	Prosentase produk unggulan yang di terima di pasar internasional	%	17	17	17	18	17		Dindagkop UKM
III	PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR								
4	Jumlah nilai bersih ekspor perdagangan	USD (\$)	15,175,03 8	15,933,790	16,730,47 9	20,336,002	26,450,750 .85		Dindagkop UKM
5	Kontribusi perdagangan dalam PDRB	%	15.17	15:20	15.25	15.45	15.65		Dindagkop UKM
IV	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGRI								

No	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Tahun 2017	Status Terhadap Target RKPD tahun 2017	OPD
			2015	2016	2017				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Prosentase Peningkatan Retribusi Pasar	%	88.8	100	100	100	98.79		Dindagkop UKM
7	Prosentase pertumbuhan pusat perbelanjaan dan toko swalayan	%	0	0	25	50	27.18		Dindagkop UKM
8	Prosentase sarana distribusi barang (gudang ) yang mempunyai ijin	%	17	17	20	50	16.33		Dindagkop UKM
9	Prosentase pasar yang memenuhi persyaratan kesehatan, keamanan, ketertiban dan kenyamanan	%	5	5	5	25	5		Dindagkop UKM
V	PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN								
10	Prosentase Lokasi Pedagang Kaki Lima yang ditata	%	20	20	30	50	30		Dindagkop UKM
	Prosentase Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	%	20	20	20	30	5.35		Dindagkop UKM

**Keterangan:**

<ul style="list-style-type: none"> <li>Status thdp Target RKPD 2017:</li> </ul>		Target 2017 tercapai
		Target 2017 tidak tercapai

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Perdagangan, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2017 dengan target RKPD Demak 2017, dari sejumlah 10 target indikator, sebanyak 6 indikator berstatus telah tercapai dan 4 indikator tidak tercapai.

#### 4. Perindustrian

Kinerja penyelenggaraan urusan Perindustrian ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 8 target indikator kinerja dalam RKPD Demak 2017 dan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2016-2021, seperti tertuang pada tabel berikut.

Tabel 2.89  
Capaian Kinerja Urusan Kehutanan Terhadap Target RKPD 2017  
dan Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

No	Aspek/Fokus/Bidang /Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Tahun 2017	Status Terhadap Target RKPD tahun 2017	OPD
			2015	2016	2017				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH								
1	Persentase Industri kecil dan menengah	%	65	65	65	80	98,43		Dinakerin
2	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	28.75	28.75	28.75	29.3	29,85		Dinakerin
3	Prosentase pertumbuhan IKM	%	0.66	0.66	0.66	0.75	1,93		Dinakerin
II	PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI								
4	Prosentase IKM yang terfasilitasi dalam peningkatan desain dan pengendalian mutu	%	17.5	17.5	17.5	19.5	12,41		Dinakerin
III	PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI								
5	Jumlah kawasan klaster industri	kawasan	1	1	1	1	1		Dinakerin
IV	PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL								
6	Jumlah sistem informasi industri nasional	web	2	2	2	3	0		Dinakerin
VI	PENINGKATAN KAPASITAN DAN PENGGUNAAN IPTEK SISTEM PRODUKSI								
7	persentase SDM industri kecil yang mengikuti kapasitas ketrampilan	%	0	10.55	12	20	10,11		Dinakerin
8	cakupan bina unit usaha IKM	%	0	17	20	25	25,71		Dinakerin

**Keterangan:**

<ul style="list-style-type: none"> <li>Status thdp Target RKPD 2017:</li> </ul>		Target 2017 tercapai
		Target 2017 tidak tercapai

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Kehutanan, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2017 dengan target RKPD Demak 2017, dari sejumlah 8 target indikator, sebanyak 5 indikator berstatus telah tercapai dan terdapat 3 indikator yang tidak dapat tercapai.

## 5. Perikanan dan Kelautan

Kinerja penyelenggaraan urusan Perikanan dan Kelautan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 14 target indikator kinerja dalam RKPD Demak 2017 dan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2016-2021, seperti tertuang pada table berikut.

Tabel 2.90  
Capaian Kinerja Urusan Perikanan dan Kelautan Terhadap Target RKPD Tahun 2017 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

No	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Tahun 2017	Status Terhadap Target RKPD tahun 2017	OPD
			2015	2016	2017				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN								
1	Produksi perikanan budidaya	Ton	33.071	33.071	35.8	190.871	35.471		Dinlutkan
2	Cakupan bina kelompok pembudidaya	Kelompok	199	199	163	260	163		Dinlutkan
3	Tingkat cakupan bina kelompok pembudidaya	%	60	60	61	91	47		Dinlutkan
II	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP								
4	Produksi perikanan tangkap	Ton	5.511		5.7	29.5	4,818.84		Dinlutkan
5	Persentase kondisi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) kategori baik	%	50	50	60	100	70		Dinlutkan
6	Cakupan bina kelompok nelayan	Kelompok	104	150	170	250	168		Dinlutkan
III	PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN								
7	Tingkat konsumsi makan ikan	%	34.87	34.87	35	39	36.09		Dinlutkan

No	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Tahun 2017	Status Terhadap Target RKPD tahun 2017	OPD
			2015	2016	2017				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Produksi hasil olahan ikan	ton	12.150	12.150	12.500	71.884	7.819.21		Dinlutkan
9	Jumlah usaha pengolahan ikan	unit	1064	1.064	1.125	1.500	1.045		Dinlutkan
10	Cakupan bina kelompok pengolah dan pemasar	kelompok	65	65	88	115	24		Dinlutkan
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR								
11	Produksi garam	ton	105.587	105.587	139.000	755.000	48.364,09		Dinlutkan
12	Cakupan bina kelompok petani garam	Kelompok	41	41	41	127	41		Dinlutkan
V	PROGRAM PENINGKATAN MITIGASI BENCANA ALAM LAUT DAN PRAKIRAAN IKLIM LAUT								
13	Jumlah masyarakat pesisir yang terlindungi dari abrasi dan rob	orang	138,142	138,142	138,142	142,606	138,205		Dinlutkan
14	Luas lahan yang terlindungi dari abrasi dan rob	ha	2,470	2,470	2,470	2,485	2,470		Dinlutkan

**Keterangan:**

• Status thdp Target RKPD 2017:		Target 2017 tercapai
		Target 2017 tidak tercapai

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Perikanan dan Kelautan, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2017 dengan target RKPD Demak 2017, dari sejumlah 14 target indikator, 6 indikator berstatus telah tercapai dan 8 indikator tidak tercapai.

## 6. Transmigrasi

Kinerja penyelenggaraan urusan Transmigrasi ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 target indikator kinerja dalam RKPD Demak 2017 dan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2016-2021, seperti tertuang pada tabel berikut.

Tabel 2.91  
Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Terhadap Target RKPD 2017  
dan Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

No	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Tahun 2017	Status Terhadap Target RKPD tahun 2017	OPD
			2015	2016	2017				
I	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI								
1	Persentase Transmigrasi yg diberang katkan	%	50	50	50	100	100		Dinsos

Keterangan:

• Status thdp Target RKPD 2017:		Target 2017 tercapai
		Target 2017 tidak tercapai

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Transmigrasi, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2017 dengan target RKPD Demak 2017, dari sejumlah 1 target indikator dan berstatus telah tercapai.

#### 2.2.4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

##### 1. Perencanaan Daerah

Kinerja penyelenggaran Fungsi Penunjang Perencanaan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 14 target indikator kinerja dalam RKPD Demak 2017 dan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2016-2021, seperti tertuang pada tabel berikut.

Tabel 2.92  
Capaian Kinerja Fungsi Penunjang Perencanaan Terhadap Target RKPD  
2017 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

No	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Tahun 2017	Status Terhadap Target RKPD tahun 2017	OPD
			2015	2016	2017				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI								
1	Persentase ketersediaan data perencanaan	%	-	-	100%	100%	100%		Bappeda Litbang
2	Tingkat penggunaan teknologi informasi dalam pengolahan data daerah	%	-	-	50%	100%	50%		Bappeda Litbang
II	PROGRAM PERENCANAAN								

No	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Tahun 2017	Status Terhadap Target RKPD tahun 2017	OPD
			2015	2016	2017				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PEMBANGUNAN DAERAH								
3	Tingkat kelengkapan dok utama perencanaan (RPJPD, RPJMD, Renstra, RKPD, Renja, KUA & PPAS)	%	100%	100%	100%	100%	100%		Bappeda Litbang
4	Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan daerah	%	-	-	80%	97%	80%		Bappeda Litbang
III	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH								
5	Persentase ketersediaan dok KUA dan PPAS	%	100%	100%	100%	100%	100%		Bappeda Litbang
IV	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI								
6	Jumlah laporan RAD PPK	laporan	1	0	1	1	1		Bappeda Litbang
VII	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI								
7	Persentase ketersediaan dok perencanaan ekonomi	%	-	-	100	100%	100%		Bappeda Litbang
VIII	PROGRAM SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA)								
8	Persentase kreativitas dan inovasi yang masuk SIDa	%	-	-	11,112	100%	21%		Bappeda Litbang
IX	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA								
9	Persentase ketersediaan dok perencanaan pemerintahan sosial dan budaya	%	-	-	13,58%	100%	13,58%		Bappeda Litbang
X	PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN								

No	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Tahun 2017	Status Terhadap Target RKPD tahun 2017	OPD
			2015	2016	2017				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Persentase Ketersediaan dok kerjasama pembangunan daerah	%	-	-	20%	100%	20%		Bappeda Litbang
XI	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN								
11	Persentase Ketersediaan dok / laporan pengembangan wilayah perbatasan	%	10%	20%	30%	100%	30%		Bappeda Litbang
XII	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH								
12	Persentase Ketersediaan dok rencana pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	%	10	15	23.81%	100%	25%		Bappeda Litbang
XIII	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR								
13	Persentase Ketersediaan dok/laporan rencana pengembangan kota- kota menengah dan besar	%	-	-	3.12%	100%	23%		Bappeda Litbang
XIV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								
14	Persentase Bintek/sosialisasi tentang perencanaan yang diselenggarakan	%	-	-	20%	100%	20%		Bappeda Litbang

Keterangan:

• Status thdp Target RKPD 2017:		Target 2017 tercapai
		Target 2017 tidak tercapai

Berdasarkan tabel capaian kinerja Fungsi Penunjang Perencanaan, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2017 dengan target RKPD Demak 2017, dari sejumlah 14 target indikator, sebanyak 14 indikator berstatus telah tercapai.

## 2. Kepegawaian

Kinerja penyelenggaran Fungsi Penunjang Keuangan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 8 target indikator kinerja dalam RKPD Demak 2017 dan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2016-2021, seperti tertuang pada tabel berikut.

Tabel 2.93  
Capaian Kinerja Fungsi Penunjang Keuangan Terhadap Target RKPD 2017 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

No	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Tahun 2017	Status Terhadap Target RKPD tahun 2017	OPD
			2015	2016	2017				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN (PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR)								
1	Indeks kepuasan ASN terhadap pelayanan administrasi kepegawaian	nilai	NA	NA	C		C		BKPP
II	PROGRAM PENINGKATAN FORMASI JABATAN SESUAI DENGAN KOMPETENSI (PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR)								
2	Persentase jabatan yang terisi	%	93	93	93		89,75		BKPP
3	Persentase pejabat yang memiliki kompetensi manajerial	%	71.43	71.43	71.43		70,45		BKPP

No	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Tahun 2017	Status Terhadap Target RKPD tahun 2017	OPD
			2015	2016	2017				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(diklatpim)								
4	Persentase aparatur sipil yang memiliki kompetensi teknis dan fungsional (diklat teknis dan fungsional)	%	33	33	33		30,55		BKPP
5	Persentase pegawai ASN yang mengikuti tugas belajar sesuai dengan kebutuhan formasi	%	100	100	100		100		BKPP
III	PROGRAM PENYEDIAAN SDM APARATUR SESUAI KEBUTUHAN FORMASI DAN STANDAR KOMPETENSI (PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR)								
6	Persentase pemahaman pegawai terhadap aturan kepegawaian	%	NA	NA	7	35	7		BKPP
IV	PROGRAM IMPLEMENTASI PERATURAN KEPEGAWAIAN (PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR)								
7	Persentase ASN yang memperoleh sosialisasi aturan kepegawaian	%	7	7	7	35	7		BKPP
VII	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR								
8	Persentase ASN dengan tingkat kehadiran pegawai sangat tinggi	%	78	78	78	92	78		BKPP

**Keterangan:**

• Status thdp Target RKPD 2017:		Target 2017 tercapai
		Target 2017 tidak tercapai

Berdasarkan tabel capaian kinerja Fungsi Penunjang Keuangan, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2017 dengan target RKPD Demak 2017, dari sejumlah 8 target indikator, sebanyak 5 indikator berstatus telah tercapai, 3 indikator berstatus tidak tercapai.

### 3. Inspektorat

Kinerja penyelenggaraan Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 6 target indikator kinerja dalam RKPD Demak 2017 dan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2016-2021, seperti tertuang pada table berikut.

Tabel 2.94  
Capaian Kinerja Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Target RKPD 2017 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

No	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Tahun 2017	Status Terhadap Target RKPD tahun 2017	OPD
			2015	2016	2017				
I	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan								
1	Prosentase tenaga pemeriksa yang menguasai teknik/teori bidang pengawasan.	%	0	0	93	100	161,76		Inspektorat
2	Level Kapabilitas APIP	level	NA	1	2	3	2		Inspektorat
3	Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan Aparat Pengawas eksternal	%	NA	NA	85	97	90,33		Inspektorat
II	Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan pelaksanaan kebijakan KDH								
4	Prosentase Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan APIP	%	0	0	91,96	476.51	100		Inspektorat
5	Level Maturitas SPIP	level	NA	1	2	3	1,614		Inspektorat

No	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Tahun 2017	Status Terhadap Target RKPD tahun 2017	OPD
			2015	2016	2017				
III	Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan								
6	Cakupan kebijakan tentang sistem dan prosedur pengawasan	%	0	0	100	100	100		Inspektorat

**Keterangan:**

• Status thdp Target RKPD 2017:		Target 2017 tercapai
		Target 2017 tidak tercapai

Berdasarkan tabel capaian kinerja Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2017 dengan target RKPD Demak 2017, dari sejumlah 6 target indikator, sebanyak 5 indikator berstatus telah tercapai, 1 indikator berstatus tidak tercapai.

**4. Sekretariat Daerah**

Kinerja penyelenggaraan Fungsi Penunjang Sekretariat Daerah ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 55 target indikator kinerja dalam RKPD Demak 2017 dan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2016-2021, seperti tertuang pada tabel berikut.

**Tabel 2.95**  
Capaian Kinerja Fungsi Penunjang Sekretariat Daerah  
Terhadap Target RKPD 2017 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

No	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Tahun 2017	Status Terhadap Target RKPD tahun 2017	OPD
			2015	2016	2017				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								
1	meningkatnya kualitas dok LPPD.	Nilai LPPD	Tinggi	Tinggi	Tinggi	sangat tinggi	sangat tinggi		Setda
2	Persentase progres kinerja fisik/keuangan APBD dan APBN	%	100	100	100	100	100		Setda
3	Nilai LKJIP Kabupaten Demak	Indeks	C	CC	B	B	CC		Setda

No	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Tahun 2017	Status Terhadap Target RKPD tahun 2017	OPD
			2015	2016	2017				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	PENATAAN PENGUASAAN, KEPEMILIKAN, PENGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH								
4	Persentase rupa bumi unsur buatan yang teridentifikasi, dan tanah kas desa yang teriden tifikasi	%	38.38	57.83	62.88	78.03	62.88		Setda
III	PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN								
	Persentase tanah milik pemerintah yg telah ter papanisasi dan persentase tukar menukar tanah kas yang difasilitasi	%	100	100	100	100	50%		Setda
IV	PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU								
5	tersedianya kajian tentang pemekaran wilayah	dok	0	0	1	2	0		Setda
V	PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT								
6	persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	%	67.7	0	0	70	0		Setda
VI	PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KDH DAN WAKIL KDH								
7	Persentase kegiatan kedinasan KDH dan Wakil KDH yang terlayani dengan baik	%	78.6	100	100	100	100		Setda
8	terpenuhinya fasilitasi kegiatan keprotokolan	bulan	12	12	0	48	0		Setda
9	Terpenuhinya kebutuhan dinas KDH dan WKDH	bulan	12	12	12	60	12		Setda
VII	PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH								
10	Jumlah kelurahan yang tanahnya di lelang	kelurahan	5	5	5	5	0		Setda
11	Jumlah BUMD yang memperoleh hasil opini laporan keuangan WTP	unit	4	4	4	6	4		Setda

No	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Tahun 2017	Status Terhadap Target RKPD tahun 2017	OPD
			2015	2016	2017				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Laporan keuangan yang tersusun tepat waktu dan tepat mutu	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat		Setda
VIII	REFORMASI BIROKRASI								
13	Persentase aparatur yang meningkat kapasitasnya dalam pelayanan PATEN	%	16	32	48	388	48		Setda
14	Nilai LKJIP Kabupaten Demak	Indeks	C	CC	B	A	CC		Setda
IX	PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH								
15	Persentase kecamatan yang telah memiliki buku profil unggulan dan buku administrasi kec	%	0	0	0	100	0		Setda
X	PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA								
16	Persentase lembaga desa yang mendapatkan pelatihan	%	407	459	9.79	26.05	7.3		setda
XI	PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH								
17	persentase perjanjian kerjasama yang dilaksanakan	%	4	4	100	100	100		Setda
XII	PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN								
18	Jumlah pilar perapatan baru dan pilar yang dipelihara	5 dan 12	5 dan 12	5 dan 12	5 dan 12	25 dan 60	6 dan 12		Setda
XIII	PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN								
19	Persentase jumlah pra raperbup yang tersusun	pra raperbup	175	100	100	100	100		Setda
20	terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	%	90	90	100	100	100		Setda
21	Jumlah perbup yang disusun	dok	0	0	1	5	4		Setda

No	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Tahun 2017	Status Terhadap Target RKPD tahun 2017	OPD
			2015	2016	2017				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	tersedianya pedoman dan petunjuk teknis yang disusun/ ditetapkan	dok	0	0	1	5	0		Setda
XIV	PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI								
23	Persentase SDM Humas yang memiliki kompetensi kehumasan	%	0	0	20	100	20		Setda
XV	KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA								
24	Persentase kegiatan Pemkab yg dipublikasikan	%	100	100	100	100	100		Setda
XVI	PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA								
25	tersedianya saran dan prasarana alat studio yang di tingkatkan, yang tersertifikasi dari kementerian	unit/paket	2	2	2	10	2		Setda
XVII	PENGAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI								
26	tersedianya dok evaluasi kehumasan	dok	0	0	1	5	1		Setda
XVIII	OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI								
27	tersedianya sistem jaringan doktasi informasi hukum	sistem	1	1	1	1	1		Setda
XIX	PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN								
28	jumlah pemeliharaan sistem jaringan doktasi hukum	unit	1	1	1	1	1		Setda
XX	PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOK/ARSIP DAERAH								
29	Persentase perda dan perbup daerah yang telah di doktasikan dalam JDIH	%	100	100	100	100	100		Setda

No	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Tahun 2017	Status Terhadap Target RKPD tahun 2017	OPD
			2015	2016	2017				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XXI	PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT								
30	Persentase penyelesaian sengketa hukum Pemda	%	1 paket	3 paket	100	100	100		Setda
XXII	SISTEM PENDUKUNG BAGI UKM								
31	Jumlah kelompok usaha mikro menjadi usaha kecil	Unit	126	134	7	190	7		Setda
XXIII	PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI								
32	Persentase serapan dana DBHCHT	%	92.7	97	95	95.9	98.4		Setda
XXIV	PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN								
33	Tersedianya dok kajian akademik	dok	0	0	1	2	0		Setda
XXV	PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI								
34	Jumlah LKM yang difasilitasi	Unit	0	0	2	3	2		Setda
XXVI	PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL								
35	Persentase RTS yang menerima raskin/rastra	%	100	100	100	100	100		Setda
XXVI I	PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KDH								
36	Persentase pekerjaan fisik sampel yang sesuai standar mutu	%	6	7	61	105	100		Setda
XXVI II	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								
37	Persentase pekerjaan yang dilelangkan melalui ULP	%	100	100	100	100	100		Setda
XXIX	PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA								
38	Konflik intern umat seagama	Ada/tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	0	tidak ada	Tidak ada		Setda

No	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Tahun 2017	Status Terhadap Target RKPD tahun 2017	OPD
			2015	2016	2017				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XXX	KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN								
39	Konflik intern umat seagama	Ada/tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	tidak ada	Tidak ada		Setda
XXXI	PENINGKATAN PENGHAYATAN PENGAMALAN DAN PENGEMBANGAN NILAI NILAI KEAGAMAAN								
40	Konflik ulama umaro	Ada/tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	tidak ada	Tidak ada		Setda
XXXI I	MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN								
41	persentase sekolah yang memiliki UKS	%	5	5.5	2	10	0.4		Setda
XXXI II	PENDIDIKAN NON FORMAL								
42	Persentase guru non formal yang dibina (guru madin dan guru TPQ)	%	9	4	10	50	10		Setda
XXXI V	WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN								
43	Persentase pemenang lomba tingkat provinsi dan nasional	%	10	20	20	20	20		Setda
XXX V	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI								
44	Persentase jumlah peserta rakor guru paud	%	100	100	100	100	100		Setda
XXX VI	PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN								
45	Persentase aparatur yang mengikuti rakor	%	0	0	100	100	100		Setda
XXX VII	PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MANAGEMEN OLAHRAGA								
46	Persentase pelaksanaan peringatan HAORNAS	%	100	100	100	100	100		Setda
XXX VIII	PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN								

No	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Tahun 2017	Status Terhadap Target RKPD tahun 2017	OPD
			2015	2016	2017				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	Persentase pemenang lomba pemuda pelopor	%	0	0	50	50	5		Setda
XXX X	PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA								
48	Persentase aparatur yang mengikuti senam	%	60	60	65	75	65		Setda
XXX X	PENINGKATAN KAPASITAS PEMUDA								
49	Persentase organisasi pemuda yang mengikuti rakor kepemudaan	%	50	50	20	80	20		Setda
XXX XI	PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP								
50	Persentase lansia yang mengikuti rakor	%	17	17	90	95	90		Setda
XXX XII	PEMBINAAN PANTI ASUHAN DAN PANTI JOMPO								
51	Persentase anak panti yang mengikuti lomba dan silaturahmi	%	25	25	25	100	25		Setda
XXX XIII	PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM								
52	Persentase kejadian bencana yang dipantau	%	30	30	30	30	5		Setda
XXX XIV	PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN								
53	Persentase organisasi wanita yang mengikuti rakor	%	80	80	20	100	20		Setda
XXX XV	PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL								

No	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Tahun 2017	Status Terhadap Target RKPD tahun 2017	OPD
			2015	2016	2017				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	Persentase fakir miskin yang diberi zakat fitrah	%	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5		Setda
XXX XVI	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR								
55	Persentase OPD yang telah di analisis jabatan dan evaluasi jabatan	%	70	90	25	100	25		Setda

**Keterangan:**

• Status thdp Target RKPD 2017:		Target 2017 tercapai
		Target 2017 tidak tercapai

Berdasarkan tabel capaian kinerja Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2017 dengan target RKPD Demak 2017, dari sejumlah 55 target indikator sebanyak 45 indikator berstatus telah tercapai dan 10 indikator berstatus tidak tercapai.

**5. Sekretariat Dewan**

Kinerja penyelenggaraan Fungsi Penunjang Sekretariat Dewan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 3 target indikator kinerja dalam RKPD Demak 2017 dan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2016-2021, seperti tertuang pada tabel berikut.

Tabel 2.96  
Capaian Kinerja Fungsi Penunjang Sekretariat Dewan  
Terhadap Target RKPD 2017 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

No	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Tahun 2017	Status Terhadap Target RKPD tahun 2017	OPD
			2015	2016	2017				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH								
1	Jumlah ranperda yang ditetapkan menjadi perda dalam prolegda	unit	12	7	21	115	6		SETDPRD

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Tahun 2017	Status Terhadap Target RKPDP tahun 2017	OPD
			2015	2016	2017				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Jumlah perda inisiatif yang disahkan menjadi perda	unit	0	1	6	40	3		SETDPRD
3	Tersedianya dok hasil reses DPRD	Dok	270	270	270	1.35	50		SETDPRD

**Keterangan:**

• Status thdp Target RKPDP 2017:		Target 2017 tercapai
		Target 2017 tidak tercapai

Berdasarkan tabel capaian kinerja Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2017 dengan target RKPDP Demak 2017, dari sejumlah 3 target indikator sebanyak 3 indikator tersebut berstatus tidak tercapai.

### **2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah**

#### **2.3.1 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah**

##### **2.3.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar**

###### **a. Pendidikan**

1. Rendahnya rata-rata lama sekolah di Kabupaten Demak;
2. Masih tingginya angka putus sekolah di Kabupaten Demak;
3. Rendahnya Kesadaran masyarakat untuk pendidikan PAUD;
4. Kurangnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan dalam kondisi baik.

###### **b. Kesehatan**

1. Masih ditemukannya kasus kematian ibu, bayi dan balita;
2. Masih ditemukannya gizi buruk;
3. Tingginya usia harapan hidup belum diimbangi dengan penanganan kualitas lansia dengan baik;
4. Masih ditemukannya penyakit menular (DBD, HIV AIDS, Filariasis, TB, Kusta) dan Penyakit tidak menular cenderung mengalami peningkatan.
5. Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam mewujudkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

###### **c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

1. Masih belum seluruh jaringan irigasi dan drainase dalam kondisi baik;
2. Rasio lahan terbuka hijau untuk publik belum sesuai dengan

- ketentuan;
3. Belum semua rumah tangga mampu mengakses air bersih;
  4. Belum seluruh rumah tangga memiliki sanitasi sehat (pengelolaan air limbah);
  5. Pengelolaan sampah belum optimal.
- d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1. Penanganan pemukiman kumuh belum optimal (*Universal Accses*);
  2. Belum seluruh rumah tidak layak huni mendapat penanganan menjadi rumah layak huni.
- e. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
1. Masih kurangnya kualitas SDM dalam perwujudan ketenteraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat dari persentase anggota linmas yang terlatih;
  2. Rawan gangguan keamanan ketertiban hal ini dikarenakan Kabupaten Demak merupakan wilayah perlintasan dari Jakarta menuju Surabaya;
  3. Rawan bencana banjir, rob, abrasi dan kekeringan;
  4. Kabupaten Demak merupakan daerah industri yang rawan kebakaran;
  5. Kurangnya SDM dan sarpras dalam penanganan bencana dan kebakaran.
- f. Sosial
1. Belum optimalnya penanganan PMKS terutama pada fakir miskin dan keluarga rentan;
  2. Belum Seluruh Panti Sosial menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan social;
  3. Terbatasnya kualitas PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) dalam penanganan PMKS;
  4. Belum optimalnya rehabsos pada disabilitas (penyandang cacat), anak kebutuhan khusus, dan lanjut usia;
  5. Masih kurangnya kualitas sarana dan prasarana dalam melakukan Rehabsos di Kabupaten Demak.

#### 2.3.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

##### a. Tenaga Kerja

1. Tingginya angka pengangguran, hal ini dapat dilihat jumlah penganggur terbuka (TPT).
2. Belum optimalnya pelatihan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja.
3. Belum optimalnya penempatan tenaga kerja.
4. Belum optimalnya penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
5. Belum seluruh perusahaan melakukan perlindungan terhadap tenaga Kerja dengan BPJS Ketenagakerjaan.

6. Belum optimalnya penanganan permasalahan tenaga kerja migran.
- b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
    1. Belum optimalnya peran kelembagaan PUG.
    2. Masih kurangnya peran lembaga layanan korban kekerasan anak dan perempuan sampai ke tingkat desa/kelurahan.
    3. Tingginya kasus kekerasan pada anak dan perempuan.
    4. Belum tersedianya data terkait dengan PUG dan PUHA (Pengarustamaan Hak Anak).
    5. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah di Kabupaten Demak belum sesuai harapan.
  - c. Pangan
    1. Masih adanya Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan penyakit ternak;
    2. Terjadinya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian;
    3. Masih adanya ancaman banjir, kekeringan, iklim ekstrim dan intrusi air laut yang mencemari persawahan;
    4. Masih rendahnya populasi ternak sapi dan kerbau betina produktif;
    5. Belum memadainya sarana dan prasarana usaha pertanian;
    6. Turunnya tingkat kesuburan tanah;
    7. Kurangnya permodalan petani;
    8. Rendahnya harga jual hasil pertanian pada saat panen raya;
    9. Kurangnya minat generasi muda di bidang pertanian;
    10. Potensi daerah rawan pangan di Kabupaten Demak masih tinggi, diantaranya potensi rawan pangan transien oleh banjir, rob dan angin barat serta rawan pangan kronis akibat kemiskinan;
    11. Masih sedikitnya jumlah dan belum optimalnya lumbung pangan masyarakat.
  - d. Pertanahan
    1. Masih banyaknya bidang tanah yang belum bersertifikat.
  - e. Lingkungan Hidup
    1. Masih rendahnya pengawasan terhadap kondisi lingkungan di Kabupaten Demak lemah;
    2. Masih rendahnya kesadaran kegiatan usaha dalam pemeliharaan lingkungan, terlihat dengan meningkatnya kasus pelanggaran hukum lingkungan;
    3. Banyak terjadi pencemaran lingkungan air.
  - f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
    1. Belum semua penduduk memiliki administrasi kependudukan;
    2. Rendahnya kesadaran masyarakat terkait dengan pembaharuan data kependudukan;
    3. Belum tersebarannya sarana dan prasarana pencatatan kependudukan diseluruh kecamatan.

- g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - 1. Belum optimalnya peran kelembagaan masyarakat desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat;
  - 2. Kesiapan pemerintah desa dalam penerapan Undang-Undang tentang desa masih belum optimal.
- h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
  - 1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam rangka mengendalikan kelahiran;
  - 2. Masih kurangnya tenaga petugas lapangan KB;
  - 3. Masih kurangnya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- i. Perhubungan
  - 1. Belum tersedianya perlengkapan jalan di jalan Kabupaten;
  - 2. Belum optimalnya penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
  - 3. Belum optimalnya jaringan trayek dengan jalan;
  - 4. Belum memiliki transportasi massal.
- j. Komunikasi dan Informatika
  - 1. Belum optimalnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah;
  - 2. Belum optimalnya Pengelolaan *e-government* di lingkup Pemerintah Daerah.
- k. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
  - 1. Rendahnya pengelolaan Koperasi;
  - 2. Belum optimalnya Pemberdayaan usaha mikro;
  - 3. Belum optimalnya pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.
- l. Penanaman Modal Daerah
  - 1. Belum optimalnya penyelenggaraan promosi investasi penanaman modal melalui kerjasama investasi dalam dan luar negeri;
  - 2. Belum sinkronisasinya regulasi antar pusat dan daerah dalam penanaman modal;
  - 3. Masih rendahnya realisasi investasi dibandingkan dengan yang mengajukan permohonan.
- m. Kepemudaan dan Olahraga
  - 1. Belum optimalnya pembinaan kepemudaan dan pengembangan organisasi kepemudaan;
  - 2. Belum optimalnya pengembangan dan pembinaan olahraga;
  - 3. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dalam pengembangan olahraga.
- n. Statistik
  - 1. Belum lengkapnya data yang disajikan dalam buku statistik daerah sesuai dengan kebutuhan informasi pembangunan daerah;

2. Belum tepatnya waktu penerbitan buku statistik daerah.
- o. Persandian
1. Pengelolaan persandian belum optimal karena belum sepenuhnya ditangani tenaga ahli persandian sehingga persandian masih sebatas sarana komunikasi antar instansi pemerintah;
  2. Belum optimalnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah.
- p. Kebudayaan
1. Masih perlunya pembinaan, perlindungan dan pelestarian peninggalan sejarah benda purbakala/situs atau benda cagar budaya;
  2. Masih perlunya meningkatkan jumlah grup kesenian (kroncong, karawitan dan tayub);
  3. Masih perlunya pembinaan dan pengendalian organisasi penghayat aliran kepercayaan terhadap Tuhan YME dalam mengamalkan kepercayaannya;
  4. Belum optimalnya promosi budaya daerah melalui festival;
  5. Belum optimalnya fungsi museum, karena masih menjadi satu dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Demak;
  6. Masih terbatasnya tenaga ahli di bidang pengelolaan benda pusaka (museum).
- q. Perpustakaan
1. Masih rendahnya minat baca masyarakat, hal ini dapat dilihat dari jumlah kunjungan dipergustakaan dan tidak berkembangnya perpustakaan desa;
  2. Belum optimalnya pelestarian naskah kuno milik Daerah.
- a. Kearsipan
1. Masih rendahnya sistem duplikasi arsip ke dalam bentuk elektronik;
  2. Masih rendahnya kesadaran OPD untuk melakukan pengelolaan arsip secara baku;
  3. Sedikitnya jumlah arsiparis/pengelola arsip.

### 2.3.1.3 Urusan Pilihan

- a. Kelautan dan Perikanan
1. Belum optimalnya pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat nelayan;
  2. Belum optimalnya pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
- b. Pariwisata
1. Masih rendahnya kualitas produk dan jasa pariwisata serta kurang tersedianya sarana dan prasarana yang memadai di lingkungan objek wisata yang berdampak pada daya saing dan daya jual destinasi baru (bahari dan agro) rendah;

2. Kerjasama pemerintah daerah dengan dunia usaha pariwisata dan masyarakat di lingkungan objek wisata belum terjalin secara optimal, hal ini dikarenakan masih lemahnya jejaring kerjasama, koordinasi serta ketepaduan dalam pengembangan pariwisata. Kondisi tersebut ditunjukkan dengan kondisi destinasi wisata yang tidak banyak perubahan;
  3. Masih rendahnya kreativitas promosi dunia pariwisata terutama dalam memanfaatkan perkembangan teknologi informasi.
- c. Pertanian
1. Belum optimalnya produktivitas dan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
  2. Belum optimalnya produktivitas dan produksi tanaman perkebunan;
  3. Belum optimalnya hasil produksi peternakan;
  4. Belum optimalnya pemasaran hasil produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan;
  5. Masih adanya penyakit ternak dan munculnya penyakit hewan yang dapat menular ke manusia (zoonosis);
  6. Masih tingginya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian.
- d. Perdagangan
1. Belum optimalnya pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;
  2. Kurangnya fasilitas penyimpanan bahan distribusi, berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan;
  3. Belum optimalnya penataan dan pembinaan pedagang kaki lima dan asongan;
  4. Belum optimalnya penyelenggaraan ekspor ditandai dengan nilai ekspor yang semakin menurun;
  5. Belum optimalnya perlindungan hak-hak konsumen.
- e. Perindustrian
1. Kurangnya SDM Industri kecil tentang penguasaan teknologi industri;
  2. Belum tersedianya penataan kawasan industri;
  3. Masih rendahnya pemanfaatan bahan baku lokal;
  4. Masih rendahnya kualitas produk IKM;
  5. Belum optimalnya penerapan industri hijau.
- f. Transmigrasi
1. Rendahnya calon transmigran untuk mendapatkan program transmigrasi;
  2. Terbatasnya kuota dari Provinsi Jawa Tengah.

#### 2.3.1.4 Permasalahan Urusan Penunjang Pembangunan

- a. Perencanaan Pembangunan
  1. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan baik tahunan maupun lima tahunan;
  2. Belum tersedianya data perencanaan yang akurat dan akuntabel;
  3. Belum tersedianya tenaga fungsional perencana.
- b. Keuangan Daerah
  1. Belum optimalnya pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah;
  2. Masih kurangnya kualitas pelaporan keuangan;
  3. Belum optimalnya pengelolaan aset daerah.
- c. Inspektorat
  1. Masih ditemukannya pelaksanaan pembangunan tidak sesuai dengan perencanaan;
  2. Masih kurangnya kualitas tenaga pengawas;
  3. Masih kurangnya kapasitas tenaga APIP.
- d. Kepegawaian
  1. Masih belum optimalnya penataan kepegawaian sebagaimana amanat UU ASN;
  2. Masih ditemukannya ASN yang tidak disiplin;
  3. Masih belum optimalnya kompetensi ASN;
  4. Masih kurangnya jumlah ASN sesuai dengan kebutuhan terutama tenaga kesehatan dan pendidik.
- e. Sekretariat Dewan
  1. Belum optimalnya kapasitas legislatif;
  2. Masih banyak produk hukum yang belum diterbitkan sesuai dengan peraturan.

## **BAB III**

### **KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**

#### **3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

##### **3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah**

Perekonomian daerah merupakan sub sistem dari perekonomian nasional dan dunia. Sebelum diuraikan kondisi ekonomi Kabupaten Demak, akan diuraikan mengenai kondisi perekonomian dunia dan nasional.

###### **1. Kondisi Perekonomian Dunia**

Perkembangan ekonomi global di tahun 2018 diproyeksikan akan membaik, namun Pemerintah tetap mewaspadai berbagai tantangan global yang diperkirakan akan dihadapi di sepanjang tahun 2018. Pertama, pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang diproyeksikan masih akan terus berlanjut. Ekonomi Tiongkok akan melanjutkan pertumbuhan yang berkelanjutan dengan melakukan pengembangan kembali dari manufaktur ke jasa-jasa. Kedua, masih lemahnya harga komoditas utama sebagai akibat dari turunnya permintaan dan lemahnya ekonomi dunia. Sebagai negara yang sebagian besar masih bertumpu pada ekspor komoditas khususnya minyak dan gas bumi, maka Indonesia masih harus menghadapi risiko belum membaiknya harga minyak dunia yang telah mengalami penurunan drastis sejak tahun 2011. Meski diperkirakan membaik, namun peningkatan harga minyak dunia ke depan diperkirakan akan terbatas dengan laju yang relatif lambat. Ketiga, masih berlanjutnya ketidakpastian perekonomian global akibat dinamika di berbagai negara maju. Membaiknya perekonomian Amerika Serikat di tahun 2018 akan signifikan jika proposal pemotongan pajak pemerintah baru sepenuhnya dilaksanakan. Namun jika Amerika melakukan pembangunan kebudayaan yang menimbulkan ketidakpastian tinggi maka akan memundurkan investasi global.

Selain itu, berlakunya MEA juga memberikan peluang dan tantangan tersendiri, mengingat MEA akan membuka peluang yang lebih luas bagi peningkatan ekspor dan pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun juga menimbulkan tantangan yaitu meningkatnya persaingan bagi produk-produk Indonesia yang relatif sejenis dengan produk negara-negara ASEAN. (Nota Keuangan RAPBN Tahun 2018).

Kondisi perekonomian dunia pada kuartal terakhir tahun 2016, ekonomi global masih dibayang-bayangi oleh ketidakpastian, dimana di satu sisi ekonomi AS sudah menunjukkan perbaikan kondisi yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, tingkat pengangguran yang stabil dan kenaikan inflasi. Namun di sisi lain, pertumbuhan ekonomi negara-negara Eropa masih terbatas dan saat ini muncul resiko politik menyusul keluarnya Inggris dari European (Brexit).

Fenomena Brexit menunjukkan kemenangan partai yang mengusung kebijakan populis dan Anti Kemapanan yang kemudian diikuti oleh Perancis dan Italia pada akhir 2016 dan kemungkinan Jerman dan Belanda pada tahun 2017 ini. Sementara ekonomi Jepang masih tertekan dengan dibayangi ketidakberhasilan Abenomics. Namun, dari sisi lain dari dunia, India dan China (dan juga Indonesia) dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan diperkirakan menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi global.

Ekonomi global diperkirakan akan menghadapi keseimbangan baru dimana pertumbuhan ekonomi negara berkembang akan meningkat lebih tinggi dari negara maju, namun upaya negara berkembang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi melalui ekspor akan terhambat karena negara-negara maju akan lebih proteksionis, yang mengakibatkan melambatnya pertumbuhan perdagangan dunia (perdagangan dunia saat ini tumbuh sebesar 2,3 persen, terendah sejak 2009), sehingga dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, negara-negara berkembang harus dapat bergantung pada sumber-sumber domestik seperti konsumsi dan investasi.

## 2. Kondisi Perekonomian Nasional

Dalam rangka menghadapi berbagai tantangan perekonomian global dan memitigasi dampaknya terhadap perekonomian domestik, Pemerintah sebagaimana tertuang pada Nota Keuangan RAPBN Tahun 2018, akan terus berupaya memperkuat fondasi perekonomian nasional agar mampu bertahan dan tetap tumbuh secara berkesinambungan. Untuk itu, dalam tahun 2018 Pemerintah akan menempuh kebijakan ekspansi fiskal dan terarah yang dapat secara efektif meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat dengan fokus untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas

antarwilayah, serta kegiatan ekonomi produktif. Kebijakan fiskal yang ekspansif untuk mendorong perekonomian tersebut harus selaras dengan upaya untuk menjaga kesinambungan fiskal dalam jangka menengah dan sesuai dengan ketersediaan ruang fiskal, mengingat pendapatan negara tahun 2018 sangat dipengaruhi kinerja pendapatan negara tahun 2017 yang kurang optimal. Melambatnya perekonomian domestik pada tahun 2017 akibat melemahnya perekonomian global diperkirakan akan menyebabkan realisasi pendapatan negara lebih rendah daripada targetnya (*shortfall*). Dengan demikian, tantangan pengelolaan pendapatan negara tahun 2018 adalah memobilisasi pendapatan negara tahun 2018 dengan meningkatkan rasio perpajakan terhadap PDB menjadi sekitar 11%.

Beberapa tantangan pembangunan domestik yang perlu menjadi perhatian utama pemerintah mengarahkan agar swasta dan BUMN meningkatkan peran optimal expenditurnya. Usaha-usaha yang telah diisi swasta dan BUMN dilarang masuk adalah penajaman program prioritas, sehingga setiap program betul-betul mendorong produktivitas serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi. Karena kapasitas fiskal terbatas untuk mendorong investasi. Perekonomian nasional masih menghadapi keterbatasan kapasitas produksi dan daya saing sebagai konsekuensi dari terbatasnya ketersediaan infrastruktur, pasokan energi, serta kualitas sumber daya manusia. Oleh sebab itu, Pemerintah akan mendorong kapasitas sektor manufaktur dan industri pengolahan agar tumbuh dan mampu bersaing di pasar internasional. Peningkatan daya saing dan produktivitas industri nasional diupayakan melalui pengembangan sumber daya manusia yang kompetitif, pembaruan permesinan industri, inovasi dan akses terhadap sumber teknologi, serta memanfaatkan jaringan produksi global (*global production network*). Di samping itu, akses masyarakat terhadap pembiayaan akan dipermudah khususnya bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sehingga dapat mendorong tumbuhnya sektor riil secara lebih nyata.

Pada sisi lain, struktur perekonomian domestik dengan laju permintaan dan konsumsi domestik yang tinggi perlu terus dijaga dengan upaya pemerintah menjaga laju inflasi dalam negeri pada tingkat yang rendah 2,5 – 4,5

untuk menjamin daya beli masyarakat. Adapun dari sisi stabilitas ekonom. Pemerintah menjaga nilai tukar pada tingkat aman dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi telah berhasil mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ditandai oleh tren penurunan tingkat kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Meskipun angka kemiskinan cenderung menurun, namun terdapat kecenderungan dimana golongan bawah mengalami pertumbuhan lebih rendah dibandingkan golongan atas. Hal ini berarti capaian pertumbuhan ekonomi masih dibayangi oleh terjadinya kesenjangan pembangunan antar wilayah, karena distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut wilayah yang masih didominasi oleh Provinsi di Sumatera-Jawa-Bali yakni sekitar 80 persen dari total PDB. Sementara itu, tantangan untuk mewujudkan kedaulatan pangan tetap penting bagi bangsa Indonesia, mengingat kebutuhan pangan domestik yang terus meningkat untuk mengimbangi peningkatan laju jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah penduduk tersebut membutuhkan pemenuhan kebutuhan pangan domestik sebagai salah satu prasyarat bagi pelaksanaan pembangunan.

Proyeksi dan tantangan keuangan negara serta kebijakan fiskal pada 2018 pada Penyusunan RKP 2018 dilakukan menggunakan prinsip *money follows program* yang dilaksanakan dengan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial dengan memperhatikan pada pengendalian perencanaan, penguatan perencanaan dan penganggaran, penguatan perencanaan berbasis kewilayahan, dan penguatan integrasi sumber pendanaan. Pada tahun 2018, Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 - 6,1 persen. Untuk mendorong pencapaian target tersebut, pemerintah berupaya untuk berinvestasi secara selektif dan memfasilitasi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Enam sektor utama yang memiliki sumbangan terbesar terhadap pertumbuhan adalah industri pengolahan (terutama nonmigas), informasi dan komunikasi, pertanian, konstruksi, jasa keuangan, dan perdagangan. Sementara itu, tiga sektor prioritas yang akan ditingkatkan perannya terhadap pertumbuhan dan penciptaan lapangan pekerjaan adalah industri pengolahan, pariwisata, dan pertanian.

Konsumsi dan investasi juga menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, dengan kebutuhan investasi sebesar 5.191,5 - 5.293,7 triliun rupiah. Pemerintah pusat juga memastikan pentingnya kontribusi daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dalam RKP 2018, pemerintah mencanangkan 10 Prioritas Nasional dan 30 Program Prioritas yang direncanakan hingga tingkat proyek dengan lokasinya (Provinsi / Kabupaten / Kota) sehingga dapat lebih mudah untuk dikendalikan. Revisi terhadap proyek prioritas harus mendapat persetujuan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan. Kebijakan prioritas nasional penanggulangan kemiskinan fokus pada jaminan dan bantuan sosial tepat sasaran yang meliputi Program Keluarga Harapan bagi 6 juta keluarga termiskin, rastra/bantuan pangan non-tunai bagi keluarga sangat miskin, miskin dan rentan, bantuan iuran kesehatan bagi 94,4 juta penduduk miskin dan rentan (termasuk bayi baru lahir), subsidi energi bagi masyarakat sangat miskin, miskin dan rentan, dan perluasan kepesertaan jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Untuk pemenuhan kebutuhan dasar, pemerintah fokus terhadap percepatan kepemilikan identitas hukum (akta kelahiran, NIK), terfasilitasinya akses terhadap pelayanan kesehatan untuk mengurangi angka *stunting*, penyediaan infrastruktur dasar: sanitasi, air minum, jalan, dan jembatan, bantuan pembiayaan KPR swadaya, sejahtera tapak, dan satuan rumah susun, serta penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi juga dibidik sebagai penggerak ekonomi rakyat, dengan memperhatikan aspek registrasi usaha skala mikro dan kecil, pengembangan sarana dan prasarana usaha bagi UMKM, fasilitasi sertifikasi, standardisasi, merek, dan pengemasan, juga akses UMKM untuk mendapat kredit, dan perbaikan tata kelola dan kelembagaan koperasi.

### 3. Kondisi Perekonomian Provinsi Jawa Tengah

Pada tahun 2018 merupakan tahun terakhir perwujudan visi pembangunan jangka menengah 2013-2018. Karenanya pada tahun tersebut pembangunan diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berdikari. Prioritas program yang dilakukan antara lain penurunan kemiskinan dan

pengangguran, pembangunan infrastruktur, perwujudan kedaulatan pangan dan energi serta perbaikan tata kelola pemerintahan, demokratisasi dan pemantapan kondusivitas wilayah. Fokus pembangunan yang mengarah pada pengurangan kemiskinan dan penurunan disparitas wilayah akan menjadi salah satu agenda penting dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah secara lebih berkeadilan. Implementasi program, dilakukan melalui perencanaan berbasis holistik, tematik dan integratif serta perubahan pola penganggaran dengan pendekatan *money follow program*. Sementara, lokus pembangunan dilakukan melalui pendekatan berbasis spasial dengan melibatkan *multi stakeholder*. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan pencapaian target sasaran prioritas pembangunan yang pada akhirnya mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Pembangunan di Jawa Tengah terus menunjukkan pertumbuhan. Kondisi perekonomian Jawa Tengah berdasarkan publikasi BPS dalam “Beberapa Kondisi Makro Sosial Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Edisi Januari 2017” menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan selama kurun waktu 2011 – 2016 ditunjukkan dengan angka pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif dari sebesar 5,30 persen, 5,34 persen, 5,11 persen, 5,27 persen, 5,47 persen, dan 5,28 persen. Perekonomian Jawa Tengah pada 2016 tumbuh 5,28 persen atau lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 5,02 persen. Lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar dalam perekonomian Jawa Tengah 2016 yakni industri pengolahan sebesar 34,82 persen. Setelah industri pengolahan, menyusul kemudian pertanian dengan pertumbuhan 15,05 persen serta perdagangan besar, eceran dan reparasi mobil, dan sepeda motor yang tumbuh 13,39 persen. Secara keseluruhan ketiga lapangan usaha tersebut mempunyai kontribusi sebesar 63,26 persen terhadap PDRB Jawa Tengah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Jawa Tengah atas dasar harga berlaku, pada 2016 senilai Rp.32,1 juta, meningkat 3,04 persen dibandingkan PDRB per kapita 2015 yang nilainya hanya Rp.29,96 juta. Inflasi menunjukkan angka yang fluktuatif, dimana pada 2011 inflasi tercatat 2,68 persen, 2012 sebesar 4,24 persen, 2013 sebesar 7,99 persen, 2014 sebesar 8,22 persen, 2015 sebesar 2,73 persen dan 2016 sebesar 2,36 persen.

Jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah selama lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan menurun. Pada tahun 2012 penduduk miskin sebanyak 14,98 persen. Pada 2016 tahun penduduk miskin turun menjadi 13,27 persen, namun penurunan tersebut mesti tetap dipercepat melalui perwujudan masyarakat berdikari. Demikian pula dengan jumlah penganggur dan tingkat pengangguran terbuka juga terus menurun, dari 2012 sebesar 5,61 persen, menjadi 4,63 persen pada 2016. Meskipun Pemerintah Provinsi sudah melakukan berbagai upaya penurunan pengangguran, diperlukan peran aktif masyarakat untuk dapat lebih menekan angka pengangguran.

#### 4. Kondisi Perekonomian Kabupaten Demak

Perkembangan ekonomi makro Kabupaten Demak tidak terlepas dari pertumbuhan perekonomian nasional dan Provinsi Jawa Tengah pada umumnya. Berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 dan mempertimbangkan kondisi ekonomi global, maka pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2019 diproyeksikan sebesar 5,4 – 5,8%, dengan asumsi: (1) perekonomian dunia terus mengalami pemulihan, (2) tidak ada gejolak dan krisis ekonomi dunia baru yang terjadi, (3) berbagai kebijakan yang telah ditetapkan dalam agenda pembangunan dapat terlaksana. Untuk mendukung stabilitas ekonomi yang kokoh maka laju inflasi direncanakan pada besaran 2,5 – 4,5 persen. Inflasi yang terkendali memungkinkan nilai tukar dan suku bunga yang kompetitif sehingga mendorong sektor riil bergerak dan berkembang dengan sehat.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Demak mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari Nilai PDRB yang menunjukkan kenaikan dari tahun 2015 sebesar 19.330.295,28 juta rupiah menjadi 20.843.920,87 juta rupiah pada tahun 2016. Sektor industri merupakan sektor penyumbang urutan pertama dalam penyusunan PDRD Kabupaten Demak, yaitu sebesar 27,75% disusul dengan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 24,28%, sektor perdagangan sebesar 15,65%, sektor konstruksi sebesar 8,37% dan sektor jasa pendidikan sebesar 4,19%.

Tingkat pertumbuhan perekonomian Kabupaten Demak Tahun 2016 sebesar 5,04%, namun begitu masih lebih rendah dari pertumbuhan perekonomian Jawa Tengah

sebesar 5,4% dan perekonomian nasional sebesar 5,19 persen. Pemerintah Kabupaten Demak untuk tahun 2019 menargetkan:

1. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan: 6,1% – 6,3 %.
2. Inflasi ditargetkan 4% - 5%.
3. Jumlah penduduk miskin 11,6%.
4. Tingkat pengangguran terbuka di perkirakan 5,23%.

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Demak Tahun 2019 diprioritaskan pada “Penguatan sektor perekonomian (pertanian, perikanan, pariwisata, perindustrian, perdagangan, UMKM) menuju kemandirian pangan. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan ekonomi Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 ditujukan dalam rangka pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan prioritas pada upaya pencapaian daya saing wilayah dan masyarakat Jawa Tengah yang berlandaskan keunggulan sumber daya manusia yang berkualitas, pelayanan dasar yang makin luas, infrastruktur wilayah yang makin berkualitas dan kondusivitas wilayah yang makin mantap serta kemampuan ilmu dan teknologi yang makin meningkat.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian yang berkualitas sebagaimana arahan kebijakan nasional maka peningkatan perekonomian daerah didorong agar mengembangkan potensi unggulan daerah yang menjadi basis ekonomi kerakyatan, menciptakan kondusifitas daerah dan keserasian pertumbuhan ekonomi antar sektor dan antara pusat pertumbuhan perekonomian Kabupaten Demak. Kebijakan peningkatan promosi penanaman modal, peningkatan pariwisata, percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis unggulan daerah.

Upaya untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut dilakukan melalui perbaikan iklim investasi, mendorong berkembangnya sektor riil, penguatan infrastruktur perlu terus diupayakan agar pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan pemerataan kekuatan ekonomi pada semua wilayah dan sektor usaha.

### **3.1.2 Tantangan dan Prospek Pengembangan Perekonomian Daerah**

Beberapa hal yang menjadi tantangan dan prospek pembangunan ekonomi Kabupaten Demak pada tahun 2019 adalah sejalan dengan visi dan misi pembangunan daerah, adalah sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan ekonomi masih kurang optimal, lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata Jawa Tengah.
- b. Masih rendahnya kualitas tenaga kerja yang memasuki pasar kerja, baik pendidikan dan keterampilan di sektor industri sehingga mengakibatkan daya saing yang rendah di pasar kerja. Hal ini berdampak pada cukup tingginya pengangguran (2015) yaitu sebesar 6,02%.
- c. Meningkatnya permintaan produk yang berkualitas menuntut peningkatan standar kualitas bagi produk barang dan jasa termasuk hasil industri dari UMKM dan kerajinan.
- d. Belum terpadunya pelaksanaan penanggulangan kemiskinan (angka kemiskinan tahun 2015 sebesar 14,44% lebih besar dari Jawa Tengah 13,55%), tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 6,02% dan setengah penganggur serta perlindungan sosial melalui program terpadu dan berkelanjutan.
- e. Belum meratanya sarana dan prasarana pendukung (jalan, jembatan, jaringan irigasi, pemenuhan air baku/irigasi, sekolah dan sarana kesehatan) yang dapat menunjang perkembangan perekonomian daerah secara merata dan pertumbuhan penanaman modal yang berkualitas.
- f. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik belum optimal dalam rangka pelayanan perizinan penanaman modal, promosi potensi unggulan daerah dan pengembangan pariwisata serta pengembangan "city branding" dalam rangka peningkatan ekonomi kreatif .

## **3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

### **3.2.1 Arah kebijakan Pendapatan Daerah**

Pendapatan Daerah Kabupaten Demak diperoleh dari beberapa sumber yaitu: Pendapatan Asli Daerah(PAD), Pendapatan Transfer Dana Perimbangan, Pendapatan dari Pemerintah Pusat; Pendapatan dari Pemerintah Provinsi; Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Total Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Demak pada Tahun 2017 sebesar Rp. 2.060.866.621.959,00 dan Tahun 2018

mengalami penurunan menjadi Rp. 1.958.433.585.400,00. Untuk Tahun 2019 pendapatan daerah ditargetkan sebesar 1.906.707.779.000,00. Terjadi penurunan proyeksi pendapatan dari tahun 2018 sebesar Rp. 51.725.806.400,00. Penurunan itu terjadi pada komponen dana bagi hasil pajak dan Dana Alokasi Khusus. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur dan secara rasional dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Total pendapatan daerah Kabupaten Demak Tahun 2017, perkiraan Tahun 2018 dan Target Tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.1  
 Realisasi dan Proyeksi / Target Pendapatan Kabupaten Demak  
 Tahun 2016 sampai Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Tahun Berjalan 2018	Proyeksi / Target pada Tahun Rencana 2019	Proyeksi / Target pada Tahun Rencana 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
<b>4.1</b>	<b>Pendapatan asli daerah</b>	<b>287.457.500.571,00</b>	<b>309.614.748.737,00</b>	<b>275.726.614.400,00</b>	<b>321.647.808.340,00</b>	<b>291.661.090.000,00</b>
4.1.1	Pajak daerah	90.281.108.771,00	128.976.505.206,00	97.007.000.000,00	122.532.000.000,00	108.812.000.000,00
4.1.2	Retribusi daerah	18.564.132.022,00	21.053.350.530,00	21.914.564.400,00	24.866.033.340,00	26.124.040.000,00
4.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	12.602.886.274,00	15.195.096.590,00	15.468.750.000,00	18.346.000.000,00	15.468.750.000,00
4.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	166.009.373.504,00	144.389.796.411,00	141.336.300.000,00	155.723.775.000,00	141.256.300.000,00
<b>4.2</b>	<b>Dana perimbangan</b>	<b>1.266.900.747.202,00</b>	<b>1.230.548.143.827,00</b>	<b>1.223.523.727.000,00</b>	<b>1.109.517.603.000,00</b>	<b>1.223.523.727.000,00</b>
4.2.1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	51.315.790.629,00	44.853.998.071,00	45.489.703.000,00	41.454.624.000,00	45.489.703.000,00
4.2.2	Dana alokasi umum	908.643.744.000,00	892.681.795.000,00	894.376.873.000,00	894.376.873.000,00	894.376.873.000,00
4.2.3	Dana alokasi khusus	306.941.212.573,00	293.012.350.756,00	283.657.151.000,00	173.686.106.000,00	283.657.151.000,00
<b>4.3</b>	<b>Lain-lain pendapatan daerah yang sah</b>	<b>398.101.674.427,00</b>	<b>520.703.729.395,00</b>	<b>459.183.244.000,00</b>	<b>475.722.368.000,00</b>	<b>613.540.278.338,00</b>
4.3.1	Hibah	3.485.693.900,00	9.524.315.300,00	90.458.360.000,00	90.462.680.000,00	90.458.360.000,00
4.3.2	Dana darurat					
4.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari	123.239.631.828,00	145.226.886.757,00	105.062.241.000,00	121.694.000.000,00	105.062.241.000,00

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Tahun Berjalan 2018	Proyeksi / Target pada Tahun Rencana 2019	Proyeksi / Target pada Tahun Rencana 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	pemerintah daerah lainnya					
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	200.677.958.000,00	211.595.493.000,00	263.662.643.000,00	263.565.688.000,00	263.662.643.000,00
4.3.5	Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**)	69.409.448.000,00	61.781.832.000,00	-	-	61.781.832.000,00
	Pendapatan Lainnya	1.288.942.699,00	92.575.202.338,00	-	-	92.575.202.338,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.952.459.922.200,00</b>	<b>2.060.866.621.959,00</b>	<b>1.958.433.585.400,00</b>	<b>1.906.707.779.000,00</b>	<b>2.128.725.095.338</b>

Sumber : BPKPAD Kab. Demak Tahun 2018

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah maka Kebijakan Perencanaan Pendapatan sebagai berikut:

- a. Optimalisasi pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- b. Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
- c. Pengembangan dan peningkatan pengelolaan BUMD.
- d. Optimalisasi pemanfaatan dan pemberdayaan aset.
- e. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana sumber daya manusia yang ada guna meningkatkan pendapatan asli daerah.
- f. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan dana bagi hasil pajak/bukan pajak dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- g. Peningkatan dukungan operasional pemungutan pajak dan retribusi.
- h. Merencanakan penerimaan pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memiliki kepastian hukum dengan perkiraan yang terukur, rasional, dan sesuai dengan potensi riil.

### **3.2.2 Arah kebijakan Belanja Daerah**

Anggaran Belanja Daerah akan mempunyai peran riil dalam peningkatan kualitas layanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian daerah apabila terealisasi dengan baik. Dengan demikian, secara ideal seharusnya Belanja Daerah dapat menjadi komponen yang cukup berperan dalam peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber daya ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Pada gilirannya, apabila kesejahteraan masyarakat telah meningkat maka diharapkan akan berdampak kepada perekonomian daerah secara luas. Untuk menggambarkan seberapa besar belanja pemerintah daerah yang digunakan dalam upaya untuk menyejahterakan penduduk di suatu daerah.

Besarnya belanja daerah di Kabupaten Demak selama lima tahun terakhir juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 besarnya realisasi belanja sebesar Rp 1.986.479.116.398,00 mengalami penurunan apabila dibanding dengan tahun 2016 sebesar 2.065.356.315.666,00 dan tahun 2018 total belanja turun menjadi Rp 2.014.063.460.400,00. Untuk total usulan belanja tahun 2019 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp. 2.087.062.821.520,00.

Secara rinci perkembangan belanja daerah Kabupaten Demak tahun 2016-2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2  
Realisasi dan Proyeksi / Target Belanja Kabupaten Demak  
Tahun 2016 sampai Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Tahun Berjalan 2018	Proyeksi / Target pada Tahun Rencana 2019	Proyeksi / Target pada Tahun Rencana 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
<b>5.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1.074.076.693.553</b>	<b>1.075.852.437.848</b>	<b>1.192.779.782.100</b>	<b>1.274.608.972.785</b>	<b>1.220.905.300.710</b>
5.1.1	Belanja pegawai	752.842.435.733	721.147.838.019	788.813.534.100	830.000.000.000	809.472.481.818
5.1.2	Belanja bunga				4.477.857.785	
5.1.3	Belanja subsidi				1.500.000.000	
5.1.4	Belanja hibah	15.450.795.900	21.136.625.970	44.305.800.000	48.361.884.000	44.824.177.860
5.1.5	Belanja bantuan sosial	3.195.000.000	2.413.450.000	6.274.800.000	8.174.800.000	6.348.215.160
5.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa*	9.452.400.630	10.636.961.859	11.706.990.000	14.868.743.000	14.705.616.947
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa*	292.507.936.040	320.423.773.000	339.678.658.000	361.225.688.000	343.554.808.925
5.1.8	Belanja tidak terduga	628.125.250	93.789.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
<b>5.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>991.279.622.113</b>	<b>910.626.678.550</b>	<b>821.283.678.300</b>	<b>1.485.910.544.679</b>	<b>797.959.026.000</b>
5.2.1	Belanja pegawai	87.694.960.358	115.627.512.210	127.940.329.168	97.726.134.527	-
5.2.2	Belanja barang dan jasa	268.181.913.803	337.740.590.391	347.120.321.847	525.970.993.737	-
5.2.3	Belanja modal	635.402.747.952	457.258.575.949	346.223.027.285	862.213.416.415	-
<b>TOTAL JUMLAH BELANJA</b>		<b>2.065.356.315.666</b>	<b>1.986.479.116.398</b>	<b>2.014.063.460.400</b>	<b>2.760.519.517.464</b>	<b>2.018.864.326.710</b>

Sumber : BPKPAD Kab. Demak Tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas, belanja tidak langsung dalam kurun waktu tahun 2016 – 2018 rata-rata mengalami peningkatan. Peningkatan yang terjadi dari tahun 2017 ke tahun 2018 untuk komponen Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 116.927.344.252 atau naik 10,86%. Kenaikan terjadi pada semua komponen, baik belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan social dan belanja bagi hasil kepada pemerintah desa. Namun, kenaikan terbesar pada komponen belanja hibah yaitu sebesar 109,6%.

Neraca atau laporan posisi keuangan adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode tersebut. Informasi yang dapat disajikan di neraca antara lain posisi sumber kekayaan entitas dan sumber pembiayaan untuk memperoleh kekayaan entitas tersebut dalam suatu periode akuntansi. Posisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak tahun 2016 - 2017 sebagaimana tercantum dalam table berikut.

Tabel 3.3  
Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Demak  
Per 31 Desember 2016 dan 2017

No	Uraian	2016	2017
		(Rp)	(Rp)
1	ASET		
a	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	51.541.049.666,00	105.589.650.586,00
	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
	Kas di Bendahara Pengeluaran	436.834,00	35.016.023,00
	Kas di BLUD	663.901.722,00	6.331.581.099,00
	Kas di Bendahara FKTP	14.736.401.962,00	9.061.541.891,00
	Kas di Bendahara BOS	1.921.617.971,00	3.557.940.338,00
	Kas Lainnya	0,00	0,00
	Setara Kas	0,00	0,00
	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
	Piutang Pendapatan	57.120.353.419,75	65.548.030.559,75
	Piutang Lainnya	0,00	0,00
	Penyisihan Piutang	-24.327.408.016,13	-30.466.019.026,25
	Beban Dibayar Dimuka	220.578.446,17	257.204.459,00
	Persediaan	17.107.082.235,18	18.754.722.277,00
	JUMLAH ASET LANCAR	118.984.014.239,97	178.669.668.206,50
b	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
	Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00
	Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
	Dana Bergulir	382.345.433,00	382.345.433,00

No	Uraian	2016	2017
		(Rp)	(Rp)
	Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
	Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
	Penyisihan Inestasi jangka panjang	-382.345.433,00	-382.345.433,00
	Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
	Investasi Jangka Panjang Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	143.592.494.512,56	161.355.369.295,42
	Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen	143.592.494.512,56	161.355.369.295,42
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	143.592.494.512,56	161.355.369.295,42
c	ASET TETAP		
	Tanah	658.848.258.294,00	1.109.444.711.829,00
	Peralatan dan Mesin	356.309.874.447,27	413.075.269.866,93
	Gedung dan Bangunan	929.977.501.865,45	1.052.852.924.808,58
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.475.088.057.494,92	2.582.331.599.731,44
	Aset Tetap Lainnya	47.455.851.544,98	58.369.531.348,59
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	10.553.788.645,00	59.638.489.004,00
	Akumulasi Penyusutan	-624.196.052.377,69	-747.407.445.935,49
	JUMLAH ASET TETAP	2.854.037.279.913,93	4.528.305.080.653,05
d	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	0,00	0,00
	JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
e	ASET LAINNYA		
	Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	116.320.000,00	898.320.000,00
	Aset Tidak Berwujud	1.510.616.000,00	206.944.533,00
	Aset Lain-lain	227.413.067.729,87	57.596.787.533,48
	JUMLAH ASET LAINNYA	229.040.003.729,87	58.702.052.066,48
	JUMLAH ASET	3.345.653.792.396,33	4.927.032.170.221,45
2	KEWAJIBAN		
a	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	432.909,00	27.217.087,00
	Utang Bunga	0,00	0,00
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
	Pendapatan Diterima Dimuka	3.157.455.335,66	3.760.184.073,67
	Utang Beban	9.918.625.364,00	13.086.648.548,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	933.758.079,00	1.074.690.797,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	14.010.271.687,66	17.948.740.505,67
b	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
	Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	14.010.271.687,66	17.948.740.505,67
3	EKUITAS	3.331.643.520.708,67	4.909.083.429.715,78
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	3.345.653.792.396,33	4.927.032.170.221,45

Dari tabel di atas, jumlah kewajiban dan ekuitas dana meningkat sebesar 47,26 persen. Hal ini didukung meningkatnya Jumlah Investasi Jangka Panjang sebesar 12,37 persen, Jumlah Aset Tetap 58,66 persen, namun Jumlah Aset Lainnya turun 74,37 persen. Adapun Kewajiban Jangka Pendek meningkat sebesar 28,11 persen.

### **3.3 Proyeksi Keuangan Daerah**

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali. Dalam penganggaran pemerintah daerah pembiayaan daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Sementara itu pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh pemerintah daerah.

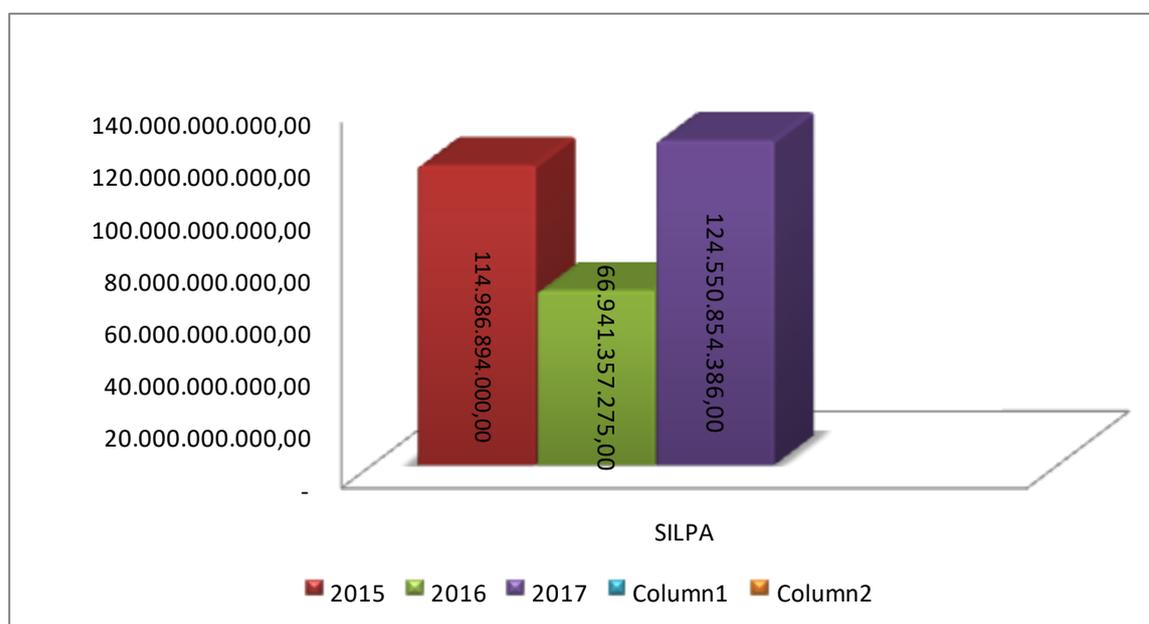
Dalam kurun waktu tahun 2016-2018 penerimaan pembiayaan daerah mengalami penurunan dari sebesar Rp 207.633.750.741,00 pada tahun 2016 turun menjadi Rp 66.963.348.825,00 pada tahun 2017 dan turun kembali pada tahun 2018 menjadi Rp. 64.894.875.000,00. Pengeluaran pembiayaan daerah juga cenderung mengalami penurunan dari sebesar Rp 27.796.000,00 pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp 16.800.000.000,00 pada tahun 2017 dan turun kembali pada tahun 2018 sebesar Rp. 9.265.000.000,00. Selisih pembiayaan netto mengalami penurunan dari sebesar Rp 179.819.993.000,00 pada tahun 2016 menjadi Rp 50.141.357.000,00 pada tahun 2017 dan naik pada tahun 2018 menjadi Rp. 55.629.875.000,00. Secara rinci perkembangan realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Demak tahun 2016-2018 dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 3.3**  
**Realisasi dan Proyeksi / Target Belanja Kabupaten Demak**  
**Tahun 2016 sampai Tahun 2020**

No	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Tahun Berjalan 2018	Proyeksi / Target pada Tahun Rencana 2019	Proyeksi / Target pada Tahun Rencana 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
<b>6.1</b>	<b>Penerimaan pembiayaan</b>	<b>207.633.750.741</b>	<b>66.963.348.825</b>	<b>64.894.875.000</b>	<b>245.400.000.000</b>	<b>60.400.000.000</b>
6.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	207.615.992.677	66.941.357.275	64.894.875.000	95.400.000.000	60.400.000.000
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	150.000.000.000	0
6.1.2	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	17.758.064	21.991.550	0	0	0
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>207.633.750.741</b>	<b>66.963.348.825</b>	<b>64.894.875.000</b>	<b>185.400.000.000</b>	<b>60.400.000.000</b>
<b>6.2</b>	<b>Pengeluaran pembiayaan</b>	<b>27.796.000.000</b>	<b>16.800.000.000</b>	<b>9.265.000.000</b>	<b>65.044.957.820</b>	<b>81.505.534.610</b>
6.2.1	Penyertaan modal (Investasi) daerah	27.796.000.000	16.800.000.000	9.265.000.000	26.000.000.000	26.000.000.000
6.2.3	Pembayaran Pokok Hutang	0	0	0	39.044.957.820	55.505.534.610
	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>27.796.000.000</b>	<b>16.800.000.000</b>	<b>9.265.000.000</b>	<b>65.044.957.820</b>	<b>81.505.534.610</b>
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>179.837.750.741</b>	<b>50.163.348.825</b>	<b>55.629.875.000</b>	<b>180.355.042.180</b>	<b>(21.105.534.610)</b>

Sumber: BPKPAD Kab. Demak tahun 2017

Surplus/defisit menunjukkan selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Jika pendapatan lebih besar daripada belanja, maka terjadi surplus, kalau sebaliknya maka terjadi defisit. Besaran defisit menunjukkan tingkat belanja yang tidak dapat dipenuhi oleh pendapatan daerah. Dalam Kurun tahun 2015-2017 Kabupaten Demak mengalami surplus dan defisit anggaran seperti terlihat pada gambar berikut.



**SILPA Kabupaten Demak Tahun 2015-2017**

Pelampauan Pendapatan atau penghematan belanja pada realisasi APBD sebelumnya akan menghasilkan sisa dana. Sisa dana tersebut dinamakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang disingkat SiLPA. Namun demikian, mengingat bahwa APBD dibuat sebelum berakhirnya tahun anggaran maka SiLPA yang terdapat di APBD merupakan nilai estimasi. Semakin besar SiLPA pada dasarnya menunjukkan semakin besarnya dana publik yang belum atau tidak digunakan dalam belanja atau pengeluaran pembiayaan lain sehingga mengendap di kas daerah sebagai dana idle. Kondisi yang terjadi di Kabupaten Demak selama periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 SiLPA cenderung meningkat. Pada tahun 2015 SiLPA sebesar Rp 114.986.894.000,00 dan mengalami penurunan 2016 menjadi Rp 66.941.367.275,00 dan naik kembali pada tahun 2017 menjadi Rp. 124.550.854.386,00. Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Demak masih banyak dana publik yang belum digunakan dalam belanja maupun pengeluaran yang lain. Sehingga masih ada dana yang mengendap di kas daerah atau tidak terserap.

Besarnya SiLPA pada akhir tahun tentunya menjadi salah satu sumber pembiayaan pada tahun berikutnya untuk

mendanai belanja daerah. Rasio ini diharapkan akan semakin turun mengingat tingginya SiLPA yang terjadi bisa ditengarai oleh karena rendahnya penyerapan belanja daerah, yang pada dasarnya mengindikasikan tidak efisien dan efektifnya perencanaan kegiatan di daerah. Sumber SiLPA selain itu adanya dana dari pusat yang tidak terserap. Sehingga rasio ini juga perlu dicermati oleh pemerintah pusat dalam melakukan kebijakan transfer ke daerah yang efisien dan efektif.

Kebijakan Belanja Daerah memprioritaskan pada pos belanja wajib antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja wajib yang dikeluarkan merupakan pagu indikatif untuk belanja langsung setiap OPD.

Dalam menentukan belanja daerah terdapat 3 elemen penting yaitu Masyarakat, Pemerintah Daerah dan DPRD dengan peran dan fungsinya masing-masing. APBD sebagai perwujudan dari amanah rakyat kepada Pemerintah Daerah dan DPRD digunakan sebaik-baiknya untuk pemberian pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja (berorientasi kepada hasil). Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran, efisiensi penggunaan alokasi anggaran dan efektivitas pelaksanaan Tupoksi masing-masing OPD.

Belanja daerah meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan program/kegiatan. Sementara itu belanja langsung merupakan belanja yang dialokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Penghitungan alokasi belanja langsung untuk pembangunan memperhitungkan kebutuhan pengeluaran yang bersifat wajib dan mengikat, baik pada unsur belanja daerah maupun pengeluaran pembiayaan daerah.

Arah pengelolaan Belanja Daerah tahun 2019 sebagai berikut:

a. Belanja Tidak Langsung

merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, meliputi:

- 1) Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya

yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;

- 2) Belanja Bunga dari pejabat daerah digunakan untuk pembayaran bunga atas pinjaman pemerintah daerah kepada pihak lainnya;
- 3) Subsidi, digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/ jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak;
- 4) Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang/jasa kepada pemerintah daerah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
- 5) Bantuan Sosial, yaitu bantuan sosial organisasi kemasyarakatan antara lain bantuan keagamaan, pendidikan, kemasyarakatan, pengadaan pangan dan bantuan partai politik;
- 6) Belanja Bagi Hasil, meliputi belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada kabupaten/kota;
- 7) Bantuan Keuangan yang bersifat umum maupun khusus kepada pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa;
- 8) Belanja Tak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.

b. Belanja langsung

merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan program dan kegiatan, yang mengarah pada pencapaian visi dan misi Kabupaten Demak meliputi :

- 1) Belanja Pegawai, untuk pengeluaran honorarium PNS, honorarium non PNS dan uang lembur, Belanja Pegawai BLUD, Belanja Jasa Non PNS;
- 2) Belanja Barang dan Jasa, untuk pengeluaran bahan pakai habis, bahan material, jasa kantor, sewa alat berat, sewa perlengkapan, sewa perlengkapan dan alat kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus, perjalanan dinas, beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan,

sosialisasi, bimbingan teknis, perjalanan pindah tugas dan lain sebagainya;

- 3) Belanja Modal, untuk pengeluaran pengadaan tanah, gedung, alat-alat berat, alat-alat angkutan darat bermotor, alat-alat angkutan darat tidak bermotor, alat-alat angkutan air bermotor, alat-alat angkutan air tidak bermotor, alat-alat bengkel, pengolahan

Disamping hal tersebut di atas, Belanja Langsung diharapkan dapat memberikan manfaat secara luas bagi masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip :

- 1) Efisiensi, sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Efektivitas, yang diprioritaskan pada program/kegiatan untuk mendorong program/kegiatan yang mempunyai daya ungkit (*leverage*) atau pengaruh ganda (*multiplier effect*) yang lebih besar misalnya peningkatan infrastruktur, perluasan pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan akses pelayanan kesehatan, peningkatan pelayanan pemerintahan, serta pencapaian visi dan misi Kabupaten Demak.
- 3) Akuntabilitas, kejelasan tolok ukur dan targetnya, yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Demak.
- 4) Transparansi, dimaksudkan bahwa setiap pengeluaran dipublikasikan dan dipertanggung-jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB IV**

### **SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

#### 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

RKPD adalah penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan RKPD Tahun 2019 merupakan tahun ketiga RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 yang diprioritaskan pada *“Penguatan sektor perekonomian (pertanian, perikanan, pariwisata, perindustrian, perdagangan, UMKM) menuju kemandirian pangan”*.

Tahun 2019 merupakan tahap ketiga (2016-2021) RPJPD Kabupaten Demak Tahun 2006-2025. Tahap ketiga RPJPD ditujukan untuk mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, mewujudkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, mewujudkan kualitas pelayanan pendidikan, mewujudkan kehidupan sosial budaya dan kemasyarakatan yang agamis dan demokratis dan mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dengan mempertimbangkan keberlanjutan program pembangunan yang relevan dengan prioritas nasional, RKPD Provinsi Jawa Tengah dan Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Demak.

#### 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019

##### a. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Jangka Menengah Tahun 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019

Berdasarkan RPJMN Tahun 2015-2019, kebijakan pembangunan nasional diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi pembangunan nasional tahun 2015-2019. Visi tersebut adalah *“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*, yang dilakukan melalui 7 misi pembangunan yaitu :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional jangka menengah tersebut, ditetapkan sembilan agenda prioritas yang disebut “Nawa Cita”, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sector-sektor strategis;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Implementasi kesembilan agenda prioritas pembangunan nasional tersebut dijabarkan dalam strategi pembangunan nasional dalam 3 (tiga) dimensi pembangunan yaitu :

1. Dimensi pembangunan manusia meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan, mental/karakter;
2. Dimensi pembangunan sektor unggulan meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pariwisata dan industri;
3. Dimensi pemerataan dan kewilayahan yaitu antar kelompok pendapatan, dan antar wilayah meliputi desa, pinggiran, luar jawa, dan kawasan timur.

Ketiga dimensi tersebut, perlu didukung oleh kondisi kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, serta tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi.

Pembangunan nasional jangka menengah dilaksanakan untuk mencapai sasaran utama pembangunan nasional di tahun 2019, antara lain meliputi :

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 – 5,8%;
2. Laju inflasi sebesar 3,5%;
3. PDB per kapita sebesar Rp.72.217 ribu;
4. Tingkat kemiskinan sebesar 7,0 – 8,0%;
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 71,98;
6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,0 – 5,0%.

Perencanaan pembangunan nasional tahun 2019 dalam rangka mendukung pencapaian sasaran utama pembangunan nasional tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019. Tema RKP Tahun 2019 adalah **“Pemerataan Pembangunan untuk Pembangunan Berkualitas”**. Pendekatan yang digunakan dalam proses perencanaan pembangunan nasional tahun 2019 adalah Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial melalui penguatan kebijakan *Money Follow Program*.

Rencana pembangunan nasional tahun 2019 diprioritaskan pada :

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar;
2. Pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman;
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif;
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air;
5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

b. Prioritas Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2019

Pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2019 diarahkan pada upaya pencapaian sasaran dan target akhir tahap III pembangunan jangka panjang tahun 2015-2019. Dengan memperhatikan hasil kinerja pembangunan tahun sebelumnya, berbagai permasalahan dan isu strategis serta kebijakan pembangunan nasional, maka kebijakan pembangunan daerah tahun 2019 ditujukan untuk **“Peningkatan Daya Saing Daerah Melalui Pemerataan Pembangunan Dan Pemanfaatan Iptek”**. Guna percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah tahun 2019 tersebut, ditetapkan **prioritas pembangunan daerah tahun 2019**, meliputi :

1. Penanggulangan kemiskinan;
2. Penguatan daya saing ekonomi daerah;
3. Kualitas hidup dan daya saing SDM;
4. Pengelolaan sumber daya alam lingkungan hidup;

5. Ketahanan pangan dan energi;
6. Kesenjangan wilayah;
7. Tata kelola pemerintahan.

Prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 tersebut dijabarkan lebih rinci dalam fokus pembangunan, yaitu sebagai berikut :

1. Penanggulangan kemiskinan, difokuskan pada :
  - a. Penyediaan *basic life acces* untuk penduduk miskin perkotaan dan perdesaan melalui penanganan perumahan dan penyehatan lingkungan permukiman (RTLH, sanitasi, air bersih, listrik); penanganan kawasan permukiman kumuh; peningkatan akses pendidikan, kesehatan, pangan, pemberdayaan dan perlindungan sosial bagi PMKS; dan kepemilikan administrasi kependudukan.
  - b. Penguatan *sustainable livelihood* melalui keberantaraan akses terhadap asset, modal, manajemen dan pasar; peningkatan start up wirausaha baru; peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja berkelanjutan.
  - c. Penguatan basis data, basis spasial, berbasis komunitas dan pendampingan yang kontinyu, serta gotong royong pelibatan seluruh komponen potensi (swasta dan pihak lainnya) dalam kesetiakawanan sosial.
2. Penguatan daya saing ekonomi daerah, difokuskan pada :
  - a. Peningkatan produktivitas pertanian dan perkebunan melalui peningkatan kemampuan petani dalam budidaya pertanian; asuransi petani; peningkatan prasarana sarana pertanian termasuk jaringan irigasi; pengembangan teknologi tepat guna di bidang pertanian dan perkebunan; revitalisasi peran balai pertanian.
  - b. Peningkatan kualitas produk pertanian yang berdaya saing melalui peningkatan kemampuan petani dalam pengolahan produk pertanian untuk meningkatkan nilai tambah; serta didukung dengan pengembangan jejaring pemasaran berbasis kelompok (*corporate farming*).
  - c. Peningkatan produksi dan kualitas hasil perikanan melalui peningkatan kapasitas nelayan; peningkatan prasarana dan sarana perikanan tangkap (alat tangkap ramah lingkungan, kapal, TPI); perbaikan kualitas benih dan pakan ikan mandiri.
  - d. Optimalisasi potensi sumber daya hutan melalui peningkatan kualitas tata kelola kehutanan; penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK); peningkatan keterlibatan

masyarakat sebagai mitra usaha kehutanan (hutan tanaman rakyat, hutan rakyat); peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengolahan hasil hutan; serta pemanfaatan sumber daya hutan non kayu.

- e. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil, mikro, dan menengah melalui peningkatan nilai tambah dan diversifikasi produk; hilirisasi industri; mengembangkan inovasi teknologi produksi; keberantaraan akses modal dari perbankan dan lembaga keuangan non perbankan; peningkatan akses pasar dengan mengembangkan digital ekonomi; pengembangan kawasan industri; keberantaraan kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan industri besar; fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk UMKM; serta peningkatan infrastruktur jaringan produksi, distribusi, promosi perdagangan antar daerah provinsi di Indonesia.
  - f. Pengembangan inovasi teknologi dengan pengembangan Technopark serta peningkatan kreativitas dan inovasi masyarakat;
  - g. Peningkatan pariwisata berbasis masyarakat melalui perbaikan prasarana dan sarana, serta manajemen pengelolaan daerah wisata, dan meningkatkan kapasitas pelaku pariwisata; aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata; serta peran serta swasta dan masyarakat dalam industri pariwisata.
  - h. Perbaikan iklim investasi yang semakin kondusif melalui pemberian kemudahan perijinan investasi (perijinan satu pintu, waktu perijinan, dan prosedur perijinan); perbaikan sistem dan layanan perijinan mudah, murah, cepat, tepat; kebijakan investasi sejalan dengan prioritas daerah untuk pengurangan kemiskinan dan peningkatan daya saing wilayah; pengembangan digital investment promotion; pengembangan investasi berbasis produk-produk unggulan kabupaten/kota; serta mendorong perwujudan investasi hijau.
3. Kualitas hidup dan daya saing Sumberdaya Manusia (SDM) difokuskan pada :
- a. Perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan melalui peningkatan keterjangkauan biaya pendidikan melalui sekolah gratis untuk pendidikan menengah dan khusus; pengembangan kurikulum berbasis skill, knowledge, attitude; pengembangan learning culture; penguatan pendidikan kejuruan dan vokasi estandar nasional dan/atau estandar internasional; meningkatkan

kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik; meningkatkan manajemen mutu penyelenggaraan pendidikan; mengoptimalisasi peran lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam mendukung pengembangan pendidikan; mengefektifkan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam membangun strategi peningkatan kualitas pendidikan; pengembangan teknologi informasi dalam mendukung pengembangan pendidikan; dan peningkatan pengembangan pendidikan khusus dan inklusi sesuai kewenangan provinsi.

- b. Peningkatan upaya promotif dan preventif dengan tetap memperbaiki upaya kuratif dan rehabilitatif melalui peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan; peningkatan dan pemerataan prasarana dan sarana kesehatan; pengembangan SIM RS Rujukan Online; peningkatan kualitas dan pemerataan cakupan tenaga kesehatan; serta peningkatan capaian wilayah Open Defecation Free (tidak buang air besar sembarangan).
- c. Mempersiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi, kualifikasi, dan berdaya saing tinggi melalui penguatan program pendidikan link and match berbasis demand-driven; mendorong peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja berbasis kompetensi (estándar, pelatihan, sertifikasi kompetensi berstandar nasional dan/atau internasional bagi lulusan pendidikan kejuruan dan vokasi dalam mendukung demand tenaga kerja ke depan; mendorong kebijakan pengembangan pusat-pusat ekonomi baru; mengembangkan budaya inovatif; dan mendorong kebijakan afirmatif untuk pemanfaatan tenaga kerja local.
- d. Pemanfaatan Bonus Demografi melalui peningkatan kualitas penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang didukung peran lintas sector/program antara lain: pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan investasi.
- e. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak, serta pembangunan keluarga melalui peningkatan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik; peningkatan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak; peningkatan kesejahteraan dan perlindungan hak anak; serta peningkatan bina keluarga balita, bina keluarga remaja dan bina keluarga lansia.
- f. Peningkatan peran serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) melalui penguatan pengetahuan dan

- ketrampilan dalam mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- g. Pengembangan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi untuk peningkatan minat dan budaya baca masyarakat.
  - h. Peningkatan kesadaran dan pemberdayaan kepemudaan melalui peningkatan dan pengembangan generasi muda mandiri dan berdikari, pengembangan kepedulian dan kepeloporan pemuda dalam pembangunan, peningkatan daya tangkal pemuda terhadap pengaruh destruktif, pemberdayaan organisasi kepemudaan dan kepramukaan.
  - i. Pembibitan, pembinaan dan pemasyarakatan serta kelembagaan olahraga melalui penyelenggaraan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PLOP), penyelenggaraan kuantitas dan kualitas kompetisi olahraga berkelanjutan, pengembangan olahraga unggulan daerah, peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga dan pembudayaan/pemassalan olahraga, peningkatan kualitas sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan, peningkatan mutu dan manajemen organisasi olahraga, dan pengembangan industri olahraga.
  - j. Pembinaan dan pengembangan kebudayaan melalui pengembangan seni budaya, pelestarian cagar budaya, dan pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
4. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, difokuskan pada:
- a. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui rehabilitasi hutan dan lahan, perhutanan sosial, konservasi daerah hulu dan tangkapan air berbasis pemberdayaan masyarakat; perkuatan Lembaga Masyarakat Di sekitar Hutan (LMDH); pengelolaan sumber daya air dengan konservasi sumber air, pengendalian banjir, pengendalian pemanfaatan air tanah; pengelolaan, pengendalian perijinan dan pengawasan usaha pertambangan; pengelolaan wilayah pesisir dengan rehabilitasi kawasan mangrove, terumbu karang dan pesisir; pengelolaan lingkungan dengan pengendalian pencemaran air, tanah, dan udara, pengelolaan limbah secara komunal berbasis kawasan dan masyarakat, serta peningkatan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. Penanggulangan bencana berbasis pengurangan risiko bencana melalui peningkatan kapasitas, memperkuat kebijakan dan kelembagaan, pengembangan sistem

informasi, penanganan tematik daerah rawan bencana, memperkuat kesiapsiagaan dan penanganan darurat, serta mengembangkan sistem rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

5. Ketahanan pangan dan energi, dengan fokus pada :
  - a. Perwujudan ketahanan pangan masyarakat dan daya saing pangan melalui peningkatan ketersediaan pangan dengan mempertahankan luasan lahan pertanian; penyediaan infrastruktur pengolahan, penyimpanan, meningkatkan kewirausahaan, manajemen dan bisnis petani serta distribusi pangan; peningkatan aksesibilitas pangan dengan menjaga stabilitas harga dan pasokan; peningkatan konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) dengan pengembangan diversifikasi pangan, membangun kesadaran masyarakat terhadap pangan beragam, serta peningkatan kuantitas, nilai tambah dan keragaman produk pangan; peningkatan mutu dan keamanan pangan; pengembangan dan penerapan inovasi teknologi paska panen.
  - b. Pemerataan akses energi dan listrik melalui penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan dengan meningkatkan koordinasi dengan PLN sebagai penyedia jaringan listrik dan pengembangan listrik perdesaan; pengembangan listrik murah dan hemat; pengembangan energi baru terbarukan dengan pemanfaatan biogas, biomassa, gas rawa, mikro hidro dan tenaga surya; serta budaya hemat energi.
6. Kesenjangan wilayah, dengan fokus pada :
  - a. Penguatan infrastruktur konektivitas melalui peningkatan kehandalan dan keselamatan jalan – jembatan mendukung pengembangan kawasan strategis dan pemerataan antara wilayah, serta menghubungkan pantura-pansela dan daerah perbatasan; pengembangan angkutan umum lintas regional, perkotaan – perdesaan; peningkatan sarana prasarana simpul dan pepaduan moda transportasi (terminal, pelabuhan, bandara dan stasiun).
  - b. Pemerataan prasarana sarana dasar dan ekonomi melalui penyediaan rumah umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah; peningkatan jaringan air minum layak berbasis kawasan dan masyarakat; meningkatkan kualitas dan kapasitas pasar, pusat perdagangan, dan pusat jasa lainnya.
  - c. Menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di wilayah selatan, barat dan timur yang diwujudkan dengan penetapan kawasan peruntukan industri baru wewenang

provinsi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan dukungan dana untuk pengembangannya serta meningkatkan peran dan fungsi perkotaan yang semula Pusat Kegiatan Lokal (PKL) menjadi Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp).

7. Tata kelola pemerintahan, difokuskan pada :
  - a. Peningkatan pelayanan publik dengan membangun pemerintah yang melayani melalui upaya perkuatan keterbukaan informasi, transparansi, serta mendorong partisipasi publik.
  - b. Perwujudan pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang inovatif, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi; membangun sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja melalui penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; meningkatkan pengawasan melalui perkuatan kapabilitas Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) dan perkuatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP); meningkatkan pengendalian produk hukum, dan penegakan perda; meningkatkan profesionalisme ASN melalui peningkatan kinerja, kompetensi, disiplin, dan penataan ASN.
  - c. Perwujudan kelembagaan birokrasi yang profesional melalui perbaikan tata laksana organisasi; peningkatan efisiensi dan efektivitas kelembagaan dengan melakukan evaluasi berkala pada kinerja kelembagaan menuju struktur berbasis kinerja; peningkatan profesionalisme ASN dalam upaya-upaya clean and clear government dan menerapkan “keperantaraan dan enterpreneur” dalam tata kelola pemerintahan.
  - d. Peningkatan kualitas kehidupan demokrasi dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan serta kondusivitas wilayah Jawa Tengah dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Pemilu Legislatif.

Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 merupakan upaya untuk mencapai target sasaran pembangunan Tahun 2019 yang meliputi:

- a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 – 5,6%;
- b. Inflasi sebesar  $4 \pm 1\%$ ;
- c. PDRB/kapita sebesar Rp.28,6 juta;
- d. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,33 – 4,43%;
- e. Kemiskinan sebesar 11,01 – 12,01%.

c. Prioritas Pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2019

Pembangunan daerah Kabupaten Demak tahun 2019 diarahkan pada upaya pencapaian sasaran dan target akhir tahap III pembangunan jangka panjang 2016-2021. Pembangunan jangka panjang tahap III diprioritaskan pada :

1. Mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui:
  - a. Perekonomian dikembangkan dengan fokus utama untuk memperkuat perekonomian daerah namun tetap berorientasi pada penguatan daya saing ekonomi daerah baik pada tingkat regional maupun dalam percaturan ekonomi nasional.
  - b. Struktur ekonomi diperkuat dengan memposisikan sektor industri sebagai sector unggulan yang memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDRB, seimbang dengan sector pertanian dalam arti luas, jasa dan perdagangan.
  - c. Perlu adanya peningkatan investasi daerah dalam taraf yang berarti sehingga dapat mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
  - d. Sektor pariwisata perlu dikembangkan secara lebih profesional sehingga mampu mendorong kegiatan ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, perluasan kesempatan kerja serta menjaga kelestarian budaya, utamanya yang bernuansa religius.
  - e. Kebijakan sector ketenagakerjaan diarahkan pada penciptaan kesempatan kerja yang seluas-luasnya di lapangan kerja formal serta peningkatan kesejahteraan pekerja di sector informal.
  - f. Peningkatan nilai tambah di sector pertanian dalam arti luas dalam upaya untuk pembangunan perdesaan, pengentasan kemiskinan, pemerataan ekonomi untuk masyarakat miskin sekaligus untuk memperkuat ketahanan dan swasembada pangan.
  - g. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana transportasi, telekomunikasi, perumahan/permukiman, persampahan dan drainase, energi serta air bersih/air minum sebagai penunjang aktivitas ekonomi daerah serta menumbuhkan sumber-sumber pembiayaan yang tangguh guna mendukung perekonomian daerah.
2. Mewujudkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat melalui :
  - a. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui Peningkatan upaya

kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan manajemen kesehatan.

- b. Pembangunan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat diarahkan pada pengembangan sistem layanan kesehatan dengan indikator adanya kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan dan obat-obatan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, adanya komunikasi kepada masyarakat berkaitan dengan semua persoalan kesehatan masyarakat, adanya pelayanan kesehatan oleh tenaga dokter dan paramedis yang profesional, adanya proses pelayanan kesehatan yang tepat, cepat, ramah dan nyaman, serta adanya prasarana kesehatan yang memadai dan representatif.
3. Mewujudkan kualitas pelayanan pendidikan, melalui:
    - a. Peningkatan perbaikan sarana dan menambah prasarana pendidikan
    - b. Peningkatan mutu dan perluasan kesempatan belajar khususnya pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun dengan prioritas meningkatkan daya tampung dan bantuan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu, cacat ataupun bertempat tinggal terpencil kurang dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan agar mendapatkan kesempatan belajar dan kesempatan meningkatkan ketrampilan.
    - c. Perlu adanya pengembangan pendidikan yang berorientasi kesepadanan dan kesetaraan melalui pengembangan kurikulum local pada sekolah umum dengan pengembangan sekolah kejuruan, sesuai pasar kerja yang dibutuhkan.
    - d. Pengembangan budaya baca di kalangan masyarakat khususnya jajar pendidikan melalui optimalisasi perpustakaan, menyediakan bahan bacaan bermutu dan pengembangan metode pengajaran yang merangsang anak didik untuk memiliki kultur baca.
    - e. Peningkatan mutu pendidikan dasar melalui sekolah unggulan, mengembangkan dan memberdayakan SLTP Terbuka.
    - f. Peningkatan kesejahteraan guru dengan memberikan tambahan honorarium mengajar, honorarium kelebihan jam mengajar serta penghargaan bagi guru-guru yang berprestasi.
    - g. Peningkatan pendidikan masyarakat (luar sekolah) dengan cara: a) menyelenggarakan berbagai kegiatan pembinaan, kursus dan pelatihan kepada masyarakat melalui penyelenggaraan kelompok-kelompok belajar, kursus,

kelompok belajar usaha (KBU), optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK), dan b) meningkatkan ketrampilan dan keahlian kerja melalui pelatihan institusional dengan On The Job Training di perusahaan.

4. Mewujudkan kehidupan sosial budaya dan kemasyarakatan yang agamis dan demokratis melalui:
  - a. Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk yang diarahkan pada peningkatan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang terjangkau
  - b. Penanggulangan kemiskinan yang diarahkan pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap dengan mengutamakan prinsip kesetaraan.
  - c. Peningkatan pelayanan pendidikan yang mencakup semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan secara bermutu dan terjangkau disertai dengan pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar
  - d. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan manajemen kesehatan
  - e. Pemanfaatan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan
  - f. Peningkatan kerukunan hidup beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa dan harmonis.
5. Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik melalui:
  - a. Peningkatan tingkat pendidikan aparatur Pemerintah Kabupaten Demak, baik pendidikan formal maupun informal
  - b. Peningkatan sarana prasarana pelayanan melalui program e-government.
  - c. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah melalui peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah
  - d. Peningkatan kepastian hukum, perlindungan hukum, kesadaran hukum serta pelayanan hukum berdasarkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, teratur, lancar serta berdaya saing.

Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan RKPD Kabupaten Demak Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,1% – 6,3%
2. Angka kemiskinan sebesar 10,6%
3. Tingkat pengangguran Terbuka sebesar 5,23%
4. Total Fertility Rate sebesar 1,8%

Dengan mendasarkan pada permasalahan pembangunan di Kabupaten Demak Tahun 2019, maka dapat dirumuskan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Pengurangan angka kemiskinan
2. Pertumbuhan ekonomi
3. Tingkat angka pengangguran
4. Perwujudan dan peningkatan good governance
5. Pengembangan infrastruktur

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 tersebut dijabarkan lebih rinci dalam fokus pembangunan, yaitu sebagai berikut :

1. Pengurangan angka kemiskinan, dengan fokus pada:
  - a. Penanganan rumah tidak layak huni berdasarkan data PBDT 2015.
  - b. Peningkatan kualitas dan pendampingan petani
  - c. Pembangunan kapasitas petani budidaya dalam mencapai sertifikasi CBIB
  - d. Peningkatan kualitas ruang kelas
  - e. Peningkatan sekolah memiliki laboratorium dan perpustakaan
2. Pertumbuhan ekonomi, dengan fokus pada:
  - a. Pembangunan pasar/rehabilitasi
  - b. Pembangunan Sub Terminal;
  - c. Pelatihan dan pendampingan pada usaha mikro;
  - d. Peningkatan kapasitas pelaku perdagangan dalam rangka peningkatan ekspor;
  - e. Penataan PKL;
3. Pengurangan Tingkat Angka Pengangguran, dengan fokus pada:
  - a. Peningkatan kualitas dan ketrampilan nelayan budidaya dan tangkap;
  - b. Pembangunan dan rehabilitasi destinasi pariwisata.
4. Perwujudan dan peningkatan good governance, dengan fokus pada:
  - a. Sinkronisasi penyusunan EPlanning, EBudgeting dan E Evaluasi;
  - b. Peningkatan kinerja dan kapasitas Aparatur Sipil Negara;
  - c. Peningkatan sarana prasarana pelayanan publik;

- d. Pembangunan Shelter penanganan korban kekerasan perempuan dan anak;
  - e. Sistem pelayanan publik yang mudah diakses (pelayanan pendidikan, kesehatan dan administrasi kependudukan)
  - f. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga;
  - g. Pembinaan pemuda dan atletik
5. Pengembangan infrastruktur, dengan fokus pada:
- a. Rehabilitasi jalan rusak dan sedang;
  - b. pembangunan embung di wilayah selatan dan jaringan;
  - c. pembangunan PAMSIMAS, pembangunan jalur perpipaan PDAM;
  - d. Peningkatan akses sanitasi;
  - e. Rehabilitasi drainase;
  - f. Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier.

Penjabaran keterkaitan fokus pada masing-masing prioritas pembangunan, indikator dan target kinerja, serta program prioritas pembangunan daerah tahun 2019 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.2  
Keterkaitan Prioritas dan Fokus Pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2019 dengan Prioritas Provinsi dan Nasional

No	Prioritas dan Fokus Pembangunan Tahun 2019 Kabupaten Demak	Prioritas RKPD 2019 Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Nasional
1	Pengurangan angka kemiskinan, dengan fokus pada:	Prioritas 1 Penanggulangan kemiskinan	Prioritas 1 Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar
	a) Penanganan rumah tidak layak huni berdasarkan data PBDT 2015		
	b) Peningkatan kualitas dan pendampingan petani		
	c) Pembangunan kapasitas petani budidaya dalam mencapai sertifikasi CBIB		
	d) Peningkatan kualitas ruang kelas		
	e) Peningkatan sekolah memiliki laboratorium dan perpustakaan		
	f) Pemberian beasiswa melalui beasiswa miskin daerah		
	g) Pengadaan sarana prasarana Rumah Sakit		

No	Prioritas dan Fokus Pembangunan Tahun 2019 Kabupaten Demak	Prioritas RKPD 2019 Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Nasional
2	Pertumbuhan ekonomi, dengan fokus pada:	Prioritas 2 Penguatan daya saing ekonomi daerah	Prioritas 3 Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian industry dan jasa produktif
	a) Pembangunan pasar/rehabilitasi		
	b) Pembangunan Sub Terminal		
	c) Pelatihan dan pendampingan pada usaha mikro		
	d) Peningkatan kapasitas pelaku perdagangan dalam rangka peningkatan ekspor		
	e) Penataan PKL		
3	Pengurangan tingkat angka pengangguran, dengan fokus pada:	Prioritas 1 Penanggulangan kemiskinan	Prioritas 1 Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar
	a) Peningkatan kualitas dan ketrampilan nelayan budidaya dan tangkap	Prioritas 3 Kualitas hidup dan daya saing SDM	
	b) Pembangunan dan rehabilitasi destinasi pariwisata		
4	Perwujudan dan peningkatan good governance, dengan fokus pada:	Prioritas 7 Tata kelola pemerintahan	Prioritas 1 Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar
	a) Sinkronisasi penyusunan E Planning, E Budgeting dan E Evaluasi		
	b) Peningkatan kinerja dan kapasitas Aparatur Sipil Negara		
	c) Peningkatan sarana prasarana pelayanan publik		
	d) Pembangunan Shelter penanganan korban kekerasan perempuan dan anak		
	e) Sistem pelayanan public yang mudah diakses (pelayanan pendidikan, kesehatan dan administrasi kependudukan)		
	f) Pembangunan CCTV di setiap pelayanan public dan area publik		
	g) Peningkatan sarana dan prasarana olahraga		
	h) Pembinaan pemuda dan atletik		
5	Pengembangan infrastruktur, dengan fokus pada:	Prioritas 4 Pengelolaan	Prioritas 2 Pengurangan

No	Prioritas dan Fokus Pembangunan Tahun 2019 Kabupaten Demak	Prioritas RKPD 2019 Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Nasional
	a) Rehabilitasi jalan rusak ringan dan sedang	Sumberdaya Alam-LH dan penanggulangan bencana	kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman
	b) Pembangunan embung di wilayah selatan dan jaringan		
	c) Pembangunan PAMSIMAS, pembangunan jalur perpipaan PDAM		
	d) Peningkatan akses sanitasi		
	e) Rehabilitasi drainase		
	f) Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier		

## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH**

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Demak tahun 2019 yang ditujukan untuk mewujudkan peningkatan, pengembangan, dan penguatan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat, maka program dan kegiatan prioritas daerah dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu: Program prioritas yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah; dan Program prioritas yang berhubungan dengan permasalahan layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. Penjabaran program prioritas ke dalam pelaksanaan urusan pemerintahan disusun dengan mengacu pada prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2019 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 6 (enam) urusan pilihan dan 5 (lima) fungsi penunjang urusan pemerintahan. Berikut ini diuraikan program yang akan dilaksanakan pada tahun 2019.

#### **5.1 Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

##### **1. Pendidikan**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
- c. Program Pendidikan Non Formal
- d. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- e. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
- f. Program Pendidikan Tinggi

##### **2. Kesehatan**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
- b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- c. Program Pengawasan Obat dan Makanan
- d. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- e. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
- f. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
- g. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

- h. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
- i. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya
- j. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
- k. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
- l. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
- m. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
- n. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
- o. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD (Operasional BLUD)
- p. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

### 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
- b. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
- d. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
- e. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
- f. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
- g. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- h. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- i. Program Perencanaan Tata Ruang
- j. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

### 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Lingkungan Sehat Perumahan
- b. Program Pengembangan Perumahan
- c. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- d. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

### 5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
- b. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

- c. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
- d. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
- e. Program Pendidikan Politik Masyarakat
- f. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- g. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
- h. Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

## 6. Sosial

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- b. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
- c. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
- d. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

## 5.2 Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

### 1. Tenaga Kerja

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
- b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
- c. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

### 2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
- b. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
- c. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

### 3. Pangan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)
- b. Program peningkatan kesejahteraan petani
- c. Program peningkatan hasil produksi pemasaran pertanian/perkebunan

- d. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
  - e. Program peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
  - f. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
4. Pertanahan
- Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :
- a. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
5. Lingkungan Hidup
- Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
- a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
  - b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
  - c. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
  - d. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
  - e. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Program yang akan dilaksanakan adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan.
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- a. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
  - b. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
  - c. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
  - d. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
  - e. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- a. Program Keluarga Berencana
  - b. Program Pelayanan Kontrasepsi
  - c. Program Pembinaan Peran serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
  - d. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
  - e. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

## 9. Perhubungan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
- b. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
- c. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
- d. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
- e. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
- f. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

## 10. Komunikasi dan Informatika

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
- b. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
- c. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
- d. Program Kerjasama Informasi dan Mas Media.

## 11. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
- b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
- c. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
- d. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.

## 12. Penanaman Modal

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
- b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
- c. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya Sarana dan Prasarana Daerah

## 13. Kepemudaan dan Olahraga

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
- b. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
- c. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
- d. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga

- e. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
- f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

14. Statistik

Program yang akan dilaksanakan adalah Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah.

15. Kebudayaan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Pengembangan Nilai Budaya
- b. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
- c. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
- d. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

16. Perpustakaan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
- b. Program Peningkatan Layanan Perpustakaan

17. Kearsipan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
- b. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
- c. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
- d. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

### **5.3 Urusan Pilihan**

1. Kelautan dan Perikanan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
- b. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
- c. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
- d. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
- e. Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut

2. Pariwisata

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
- c. Program Pengembangan Kemitraan.

### 3. Pertanian

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura
- b. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
- c. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
- d. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

### 4. Energi dan Sumber Daya Mineral

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

### 5. Perdagangan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
- b. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
- c. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
- d. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

### 6. Perindustrian

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
- b. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
- c. Program Penataan Struktur Industri
- d. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

## **5.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**

### 1. Perencanaan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Data/Informasi
- b. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- c. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
- d. Program Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya
- e. Program Kerjasama Pembangunan
- f. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
- g. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
- h. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar
- i. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

2. Kepegawaian

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- d. Program Fasilitasi Pindah/purna Tugas PNS

3. Pengawasan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
- b. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
- c. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

4. Keuangan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

5. Sekretariat Dewan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
- b. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media

6. Sekretariat Daerah

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- b. Program Penataan Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
- c. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
- d. Program Pendidikan Politik Masyarakat
- e. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH dan Wakil KDH
- f. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- g. Program Reformasi Birokrasi
- h. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
- i. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
- j. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

- k. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
- l. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
- m. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
- n. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
- o. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
- p. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi
- q. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
- r. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM
- s. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- t. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- u. Program Pengembangan Nilai Budaya
- v. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- w. Program Pendidikan Non Formal
- x. Program Wajib Belajar Sembilan Tahun
- y. Program Pendidikan Anak Usia Dini
- z. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga
- aa. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup
- bb. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
- cc. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
- dd. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah, direncanakan program yang bersifat pendukung operasional Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
Fokus kegiatan pada penyediaan jasa surat menyurat, jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  
Fokus kegiatan pada pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, serta peningkatan sarana dan prasarana kantor.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur  
Fokus kegiatan pada pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  
Fokus kegiatan pada pendidikan dan pelatihan formal.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja  
Fokus kegiatan pada laporan kinerja Perangkat Daerah.

**BAB VI**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

**6.1 Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2019**

Dalam rangka upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah tahun 2019, maka ditetapkan target pada indikator kinerja utama daerah tahun 2019 sebagai berikut.

Tabel 6.1.  
Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Demak  
Tahun 2019

No	Sasaran Pembangunan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2019
1	Meningkatnya kerukunan antar/intra umat beragama	Kasus konflik antar umat beragama	Tidak Ada	Tidak ada
2	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang memiliki pendidikan pasca sarjana	Persen	9,21
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur	Meningkatkan nilai LKJIP	Indeks	BB
4	Meningkatnya nilai laporan keuangan daerah	Nilai opini BPK	Indeks	WTP (Untuk LKPD 2018)
5	Terwujudnya Smart City	Jumlah Sistem Informasi pelayanan publik berbasis IT	Unit Sistem	1 unit
6	Meningkatnya produktivitas dan produksi pertanian, perkebunan dan peternakan	Produksi pertanian tanaman pangan utama		
		padi	Ton	650.447
		Jagung	Ton	219.425
		Kacang hijau	Ton	37.392
7	Meningkatnya produksi perikanan dan kelautan	Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	5.900
8	Meningkatnya ketersediaan, distribusi, keanekaragaman dan keamanan pangan	Ketersediaan Pangan Utama	Ton	386.462
9	Meningkatnya perkembangan industri kecil dan menengah	Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah	Persen	0,69
10	Meningkatnya nilai ekspor, kualitas pasar dan penataan PKL	Persentase lokasi PKL yang ditata	Persen	40
		Persentase pasar yang memenuhi persyaratan	Persen	33
		Nilai bersih ekspor perdagangan	Rupiah	18.445.353
11	Meningkatnya kapasitas UMKM dan koperasi	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil	Persen	1,30
		Persentase koperasi aktif	Persen	82
12	Menurunnya angka pengangguran	TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)	Persen	5,23
13	Meningkatnya kontribusi pendapatan pariwisata dalam PAD	Jumlah pendapatan dari sektor pariwisata	Rupiah	2M
14	Meningkatnya pelestarian keragaman dan kekayaan budaya daerah	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Persen	80
15	Meningkatnya kualitas kondisi jalan dan jembatan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	94,54
16	Meningkatnya kualitas drainase	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persen	56,26
17	Terpeliharanya jaringan irigasi yang berkelanjutan	Persentase Luas daerah irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	90,31

No	Sasaran Pembangunan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2019
18	Terpenuhinya sara dan prasarana permukiman yang sehat, teratur dan berkelanjutan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	Unit	83.834
19	Meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	Persen	71
20	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase tersedianya luasan RTH public sebesar 20% dari luas wilayah kawasan perkotaan	Persen	6
21	Meningkatnya pelayanan perhubungan darat	Persentase sarana perlengkapan jalan dalam kondisi baik	Persen	70
22	Meningkatnya partisipasi pendidikan pada jenjang pendidikan dasar PAUD dan pendidikan non formal	Angka Harapan lama sekolah	Tahun	13,3
23	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan dasar PAUD dan Dikdas	APK SMP/MTs	Persen	96
24	Meningkatnya jumlah kunjungan perpustakaan	Pertumbuhan kunjungan perpustakaan	Persen	5,98
25	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan	AKI ( Angka Kematian Ibu )	Persen/100.000 Klh	102
		AKB ( Angka Kematian Bayi )	Persen/1.000 Klh	7,1
		Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk	Persen/100.000 Penduduk	0,358
26	Meningkatnya Penanganan PMKS dan Penanggulangan kemiskinan secara terpadu	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan sosial	Persen	32,54
27	Menurunnya angka kriminalitas	Angka kriminalitas yang ditandatangani	Persen	66
28	Meningkatnya penegakan peraturan daerah	Persentase Penegakan Peraturan Daerah	Persen	100
29	Meningkatnya kesadaran Masyarakat dalam penanganan bencana	Jumlah Desa Tangguh Bencana	Desa	3
30	Meningkatnya partisipasi pemuda dan olahraga	Jumlah medali olahraga yang diterima	Unit	149
		Persentase organisasi pramuka aktif	Persen	85
31	Meningkatnya pelestarian Kesenian Lokal	Jumlah Event Kesenian	Unit	4
32	Terkendalinya pertumbuhan penduduk	Total Fertility Rate ( TFR)	Persen	2,08
33	Meningkatnya Partisipasi dan Keswadayaan Masyarakat dalam Pembangunan	Tingkat Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	Persen	21
34	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dan anak	Menurunnya kasus kekerasan terhadap anak	Kasus	55
		Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang ditandatangani	Kasus	19
35	Meningkatnya jumlah investasi baik PMA maupun PMDN	Nilai Investasi PMA ( juta )	Us\$ (.000)	50.968,69
		Nilai Investasi PMDN (Juta)	Rupiah (Juta)	2.162.052
36	Meningkatnya jumlah Perjanjian dan non perjanjian yang dilayani oleh PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu )	Jumlah ijin yang dilayani PTSP ( Pelayanan Terpadu Satu Pintu )	Dok	7.050
37	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik berdasarkan Standart Pelayanan	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai Survei Kepuasan Masyarakat )	Nilai	82,31
38	Penghargaan Kota Terbersih	Penghargaan kota terbersih	Indeks	adipura

Sumber: RPJMD Kab. Demak Tahun 2016-2021

## **BAB VII PENUTUP**

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Demak Tahun 2019 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2016 – 2021, memperhatikan arahan kebijakan Nasional dan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 050/0196604 tentang Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan serta Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2019 serta Surat Bupati Demak Nomor 050/0016 tentang Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan untuk Penyusunan RKPD Tahun 2019.

Prioritas pembangunan tahun 2019 mengikuti prinsip *money follow priority programs* dan berorientasi pada pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Hasil capaian pembangunan diharapkan mampu memberikan kebermanfaatn langsung kepada masyarakat secara adil dan merata. Dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh pihak (peran aktif masyarakat, dunia usaha dan akademisi). Dokumen RKPD Kabupaten Demak Tahun 2019 diharapkan mampu mensinergiskan seluruh pelaku pembangunan dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program kegiatan.

Sehubungan hal tersebut untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah, maka RKPD Kabupaten Demak Tahun 2019 harus menjadi pedoman oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan tahun 2019 dan menjadi landasan bagi penyusunan KUA-PPAS dan RAPBD Kabupaten Demak tahun 2019.

RKPD sebagai pedoman bagi OPD untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terutama berkaitan dengan pencapaian prioritas, menangani permasalahan dan kendala serta pelaporan pencapaian sasaran pembangunan daerah. RKPD Kabupaten Demak Tahun 2019 juga menjadi wadah seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah termasuk dunia usaha/dunia industri dan masyarakat dalam pelaksanaan program/kegiatan partisipasi dan swadaya dalam pembangunan daerah.

Selain itu, program dan kegiatan pembangunan dalam pelaksanaannya, mempertimbangkan seluruh potensi dan pembiayaan yang tersedia baik dari Pemerintah Pusat, anggaran Provinsi Jawa Tengah dan APBD Kabupaten Demak melalui sinkronisasi dan sinergitas dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan. Pelaksanaan program/kegiatan RKPD Kabupaten Demak 2019 adalah pelaksanaan Visi Pembangunan : “Terwujudnya Masyarakat Demak Yang Agamis Lebih Sejahtera, Mandiri, Maju, Kompetitif, Kondusif, Berkepribadian dan Demokratis”.